



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

LAPORAN KINERJA



20
25

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM**



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **"Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025"** dapat selesai tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan memperhatikan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum secara terukur, beserta analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi perbaikan kinerja ke depan. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 yang selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum maupun Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk evaluasi kinerja dan perumusan strategi kebijakan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025.

Jakarta, 23 Januari 2026

Direktur Jenderal



Rachman Arief Dienaputra



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DJPI dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan laporan ini mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Nomor 75/KPTs/Dp/2025 tentang Rencana Strategis DJPI Tahun 2025-2029.

A. ISU STRATEGIS

Penyelenggaraan KPBU infrastruktur pekerjaan umum di Indonesia menghadapi enam isu strategis utama yang mempengaruhi efektivitas program pembiayaan infrastruktur:

1. Kompleksitas Regulasi dan Kelembagaan

Kerangka regulasi KPBU masih menghadapi tantangan harmonisasi lintas sektor, khususnya dalam aspek penetapan tarif, pengelolaan aset, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta keselarasan dengan regulasi sektoral. Di sektor sumber daya air, pelaksanaan KPBU tahap operasi dan pemeliharaan terkendala ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2019, yang memerlukan penyesuaian kebijakan operasional.

2. Kapasitas dan Komitmen Pemerintah Daerah

Kesiapan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan KPBU masih terbatas, ditandai dengan rendahnya kapasitas fiskal untuk mendukung komitmen pendanaan jangka panjang dan minimnya sumber daya manusia yang memahami mekanisme KPBU secara komprehensif. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses penyiapan proyek hingga tahap transaksi.

3. Keterbatasan Dukungan Pendanaan dan Kelayakan Proyek

Ekosistem pembiayaan KPBU menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan kapasitas pasar modal dan lembaga pembiayaan, rendahnya minat investor akibat profil risiko yang tinggi, menurunnya kelayakan finansial proyek, serta terbatasnya dukungan pendanaan pemerintah. Hal ini mendorong kebutuhan eksplorasi skema pembiayaan alternatif dan kreatif.

4. Integrasi Perencanaan yang Belum Optimal

Perencanaan proyek KPBU terkendala lemahnya integrasi sistem hulu-hilir, terutama di sektor air minum yang mengalami kesulitan dalam mekanisme pembayaran air curah akibat pemisahan pengelolaan. Di sektor persampahan, keterlibatan DPRD dalam penetapan *tipping fee* dan fragmentasi pengelolaan sampah menjadi hambatan. Tantangan lain meliputi kompleksitas tinggi proyek, ketidakpastian regulasi, minimnya proyek percontohan di luar jalan tol, serta proses pembebasan lahan yang memakan waktu.

5. Keberlanjutan Kinerja Proyek

Keberlangsungan operasional proyek KPBU rentan terhadap risiko tarif yang tidak mencerminkan kemampuan bayar masyarakat, ketidakpastian pendapatan, serta risiko operasional dan pasar. Kendala spesifik mencakup ketidakpastian permintaan layanan, tingginya biaya operasional, lemahnya kinerja dan *creditworthiness* BUMD sebagai mitra, ketidakpastian pembayaran khususnya di sektor persampahan, serta keterbatasan infrastruktur pendukung.

6. Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Permasalahan teknis proyek KPBU sering bersumber dari lemahnya koordinasi lintas sektor, yang mengakibatkan ketidaksesuaian standar teknis, kompleksitas integrasi sistem, dan risiko kegagalan teknologi. Di sektor air minum, perbedaan wilayah administrasi hulu-hilir, tingginya tingkat kehilangan air (*Non-Revenue Water*/NRW), rendahnya penyerapan air curah, dan *idle capacity* menjadi kendala utama. Sementara di sektor air limbah, keterbatasan teknologi pengolahan, tingginya biaya operasional, dan lemahnya sistem pemantauan kualitas efluen masih menjadi tantangan.

B. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) DJPI Tahun 2025 mengalami dua kali revisi untuk menyesuaikan target kinerja dengan perkembangan kebijakan dan kondisi anggaran:

1. **PK Awal** (31 Januari 2025): Ditetapkan dengan anggaran Rp98.961.375.000 untuk mendukung Program Dukungan Manajemen dengan target IKSP: (1) Tingkat Ketersediaan KPBU yang Siap Dikerjasamakan sebesar 100%, dan (2) Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen sebesar 99,96%.
2. **PK Revisi Pertama** (30 September 2025): Dilakukan penyesuaian target IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen berdasarkan draft Renstra DJPI 2025-2029, tanpa perubahan anggaran.
3. **PK Revisi Kedua** (29 Desember 2025): Anggaran disesuaikan menjadi Rp101.827.973.000 dengan target IKSP selaras dengan Renstra DJPI 2025-2029 yang telah final.

C. KAPASITAS ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

DJPI didukung oleh kapasitas organisasi yang solid dengan realisasi anggaran sebesar Rp86.195.367.000 atau 84,65% dari pagu DIPA (Rp101.827.973.000) dan 91,39% dari pagu efektif (Rp94.312.373.000). Struktur organisasi terdiri dari 5 unit kerja: Sekretariat Ditjen PI, Direktorat PSSPP, Direktorat PPISDA, Direktorat PPIBM, dan Direktorat PPICK.

Kekuatan SDM mencapai 344 orang yang terdiri dari PNS, PPPK, dan Tenaga Pendukung Individual. Aset BMN berjumlah 2.518 unit dengan kondisi: 1.420 unit (56,4%) dalam kondisi baik, 132 unit (5,2%) cukup baik, dan 966 unit (38,4%) rusak.

D. CAPAIAN KINERJA

DJPI berhasil mencapai kinerja yang melampaui target pada seluruh indikator utama:

Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif	100,00	110,96	110,96
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	86,81	93,41	107,61
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00	102,59	102,59
SK-1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK 1 Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	84,72	93,21	110,02
IKK 2 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	73,21	89,58	122,36
IKK 3 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	72,79	77,89	107,00
IKK 4 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72,16	83,82	116,16
IKK 5 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	72,50	79,51	109,67
IKK 6 Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi	80,01	93,98	117,46
SK-2 Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			
IKK 1 Tingkat Implementasi Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur	100,00	112,50	112,50
IKK 2 Tingkat Implementasi Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur	100,00	117,50	117,50
SK-3 Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas			
IKK 1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100,00	103,33	103,33
IKK 2 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	100,00	118,00	118,00
IKK 3 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	100,00	104,00	104,00
IKK 4 Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek	103,33

IKK 5 Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek	100,00
---	----------	----------	--------

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen DJPI dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan akselerasi penyiapan proyek KPBU, dengan pencapaian tertinggi pada indikator Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan yang melampaui target 110,96%.

E. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Capaian kinerja DJPI ditopang oleh faktor internal dan eksternal yang saling memperkuat:

1. Faktor Internal:

- Kepemimpinan aktif dan berkelanjutan dalam perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja;
- Tata kelola administrasi yang tertib melalui pengelolaan kearsipan konsisten berbasis digital;
- Layanan pendukung yang efektif (keuangan, hukum, kepegawaian, komunikasi publik, pengelolaan aset);
- Sistem pelaporan *monitoring* bulanan yang sistematis dan berbasis data;
- Koordinasi antar unit kerja yang efektif mendukung ketercapaian target proyek KPBU;
- Penerapan SPBE dan pengembangan sistem informasi sebagai inovasi digitalisasi proses bisnis; dan
- Kemajuan regulasi KPBU melalui Peraturan Menteri PUPR yang telah memasuki tahap penetapan dan penomoran dengan Kementerian Hukum.

2. Faktor Eksternal:

- Koordinasi efektif dengan unit organisasi di luar DJPI serta kementerian/lembaga terkait;
- Kolaborasi produktif dengan pemerintah daerah dalam penyelarasan kebijakan, dukungan teknis, dan percepatan penyiapan proyek;
- Penguatan kemitraan dengan pelaku ekosistem investasi infrastruktur domestik dan internasional; dan
- Responsivitas pihak eksternal dalam pemberian masukan teknis dan klarifikasi dokumen yang mendukung validasi data dan kepatuhan terhadap ketentuan sektoral

F. KENDALA DAN TANTANGAN

Meskipun mencapai target kinerja, DJPI menghadapi sejumlah kendala yang perlu diantisipasi:

- Perbedaan komitmen dan pandangan antara DJPI dengan mitra eksternal, khususnya pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lintas sektor, yang berdampak pada

- 
- keterlambatan tahapan penyiapan dan transaksi proyek;
2. Keterbatasan pemahaman dan kesiapan fiskal sebagian pemerintah daerah yang menghambat komitmen jangka panjang dalam skema KPBU;
 3. Keterlambatan dan ketidaklengkapan penyediaan data dari mitra eksternal yang menghambat proses penyiapan dokumen, evaluasi kinerja, dan perumusan rekomendasi kebijakan;
 4. Perubahan kebutuhan teknis dan penyesuaian alokasi anggaran nasional yang mempengaruhi dinamika pelaksanaan program; dan
 5. Ekosistem regulasi nasional yang masih memerlukan penyempurnaan agar lebih operasional, adaptif, dan mendukung percepatan pelaksanaan KPBU, meskipun Rancangan Peraturan Menteri KPBU telah memasuki tahap harmonisasi.

G. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Untuk mengatasi kendala dan meningkatkan efektivitas program, DJPI merekomendasikan langkah strategis berikut:

1. Percepatan penyusunan regulasi teknis dan pedoman pelaksanaan KPBU untuk meningkatkan efisiensi proses penyiapan dan transaksi serta menarik minat investor;
2. Penguatan mekanisme komunikasi dan koordinasi melalui pemanfaatan platform data bersama dan penjadwalan koordinasi rutin dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
3. Penyediaan umpan balik terstruktur kepada pemangku kepentingan melalui pendampingan teknis, asistensi dokumen, dan koordinasi lintas unit;
4. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, dan *workshop* bagi pegawai DJPI dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi dalam perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan skema KPBU serta pembiayaan kreatif; dan
5. Eksplorasi skema pembiayaan alternatif dan kreatif untuk mengatasi keterbatasan dukungan pendanaan konvensional dan meningkatkan kelayakan proyek KPBU.

Dengan implementasi rekomendasi ini, DJPI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang handal, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	3
1.3.1 Struktur Organisasi	3
1.3.2 Sumber Daya Manusia.....	10
1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis	11
1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan	13
1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia	15
1.3.2.4 Pengembangan Kompetensi SDM.....	19
1.4 Sarana dan Prasarana	24
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik	25
1.4.2 Transformasi Digital.....	30
1.5 Isu Strategis Unit Organisasi.....	31
1.6 Sistematika Laporan.....	40
BAB II PERENCANAAN KINERJA	41
2.1 Rencana Strategis.....	41
2.1.1 Visi dan Misi.....	42
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi	43
2.1.3 Program dan Kegiatan	62
2.2 Perjanjian Kinerja	63
2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal.....	64
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir	65
2.2.3 Kronologi Perubahan PK.....	66
2.3 Metode Pengukuran	67
2.3.1 Program Dukungan Manajemen.....	67
2.4 Target Kinerja DJPI Tahun 2025 Berdasarkan Renstra.....	70
2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra	70
2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Renstra 2025 – 2029.....	74
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	75
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	75

3.2 Capaian Kinerja	78
3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	79
3.2.1.1 Capaian Kinerja SS-6: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien Dan Efektif	79
3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Program DJPI	90
3.2.2.1 Capaian Kinerja SP 1 Pada IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	91
3.2.2.2 Analisis Capaian Kinerja Capaian Kinerja SP 1 Pada IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	92
3.2.2.3 Capaian Kinerja SP 2 pada IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	94
3.2.2.4 Analisis Capaian Kinerja SP 2 pada IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	102
3.2.3 Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon II	103
3.2.3.1 Capaian IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	104
3.2.3.2 Analisis Capaian IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	104
3.2.3.3 Capaian IKK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	107
3.2.3.4 Analisis Capaian IKK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.....	108
3.2.3.5 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.....	112
3.2.3.6 Analisis Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	113
3.2.3.7 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga.....	116
3.2.3.8 Analisis Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga.....	117
3.2.3.9 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya.....	120
3.2.3.10 Analisis Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya.....	122
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja	125
3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	125
3.3.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra).....	129
3.3.3 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMN Tahun 2025- 2029	129

3.3.4 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Unit Organisasi/Instansi Sejenis (<i>Benchmarking</i>)	132
3.4 Analisis Realisasi Anggaran	136
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	137
3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025	141
3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan Tahun Sebelumnya	147
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	148
3.6 Penghargaan Inovasi Atas Kinerja.....	150
3.7 Inovasi dan/atau Kinerja Lain	153
BAB IV PENUTUP	163
4.1 Simpulan Umum	164
4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan	165
4.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan	167
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	168
LAMPIRAN.....	169

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status	12
Tabel 1. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Tabel 1. 3	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan	14
Tabel 1. 4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	16
Tabel 1. 5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	18
Tabel 1. 6	Rekapitulasi Jumlah Pejabat Fungsional di DJPI Tahun 2025	23
Tabel 1. 7	Daftar Nama Jabatan Fungsional di DJPI Tahun 2025.....	23
Tabel 1. 8	Daftar BMN DJPI	26
Tabel 1. 9	Laporan BMN di Neraca	29
Tabel 2. 1	PK Awal DJPI Tahun 2025.....	65
Tabel 2. 2	PK Akhir DJPI Tahun 2025	65
Tabel 2. 3	Kronologis Perubahan Target PK DJPI Tahun 2025	66
Tabel 2. 4	Target Kinerja DJPI Tahun 2025.....	71
Tabel 2. 5	Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	71
Tabel 2. 6	Target Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	72
Tabel 2. 7	Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	72
Tabel 2. 8	Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga.....	73
Tabel 2. 9	Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya.....	73
Tabel 2.10	Target Kinerja DJPI Berdasarkan Renstra	74
Tabel 3. 1	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP DJPI TA. 2025.....	75
Tabel 3. 2	Capaian SS-6 pada Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/ Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	80
Tabel 3. 3	Rincian Capaian SS-6 pada IKSS-5 Berdasarkan Indikator Kontributor	81
Tabel 3. 4	Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	81
Tabel 3. 5	Capaian Proyek KPBU Penyiapan dan Siap Dikerjasamakan Tahun 2025 (Investasi)	85

Tabel 3. 6	Capaian Kinerja Sasaran Program DJPI Tahun 2025	90
Tabel 3. 7	Rincian Capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI).....	91
Tabel 3. 8	Rincian Capaian IKSP 1 Berdasarkan Indikator Kontributor.....	95
Tabel 3. 9	Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	96
Tabel 3. 10	Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU TA. 2024 (Proyek).....	99
Tabel 3. 11	Capaian IKK Setditjen PI	104
Tabel 3. 12	Capaian IKK Direktorat PSSPP.....	107
Tabel 3. 13	Capaian Kinerja Direktorat PPISDA	112
Tabel 3. 14	Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air.....	115
Tabel 3. 15	Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan.....	116
Tabel 3. 16	Capaian Kinerja Direktorat PPIBM.....	117
Tabel 3. 17	Proyek KPBU Bina Marga Tahap Penyiapan dan Siap Dikerjasamakan.....	120
Tabel 3. 18	Capaian Kinerja Direktorat PPICK	121
Tabel 3. 19	Proyek KPBU Sektor Cipta Karya pada Tahap Penyiapan.....	123
Tabel 3. 20	Proyek KPBU Sektor Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	124
Tabel 3. 21	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program DJPI 2020-2024 terhadap PK	127
Tabel 3. 22	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program DJPI 2025 terhadap PK.....	128
Tabel 3. 23	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program DJPI 2025 terhadap Renstra.....	129
Tabel 3. 24	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja DJPI terhadap DJBM.....	132
Tabel 3. 25	Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja KPBU Kementerian PU dengan Kementerian Keuangan.....	134
Tabel 3. 26	Perbandingan Capaian Kinerja terkait KPBU antara DJPI dengan DJPPR	135
Tabel 3. 27	Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tiap Unit Kerja di lingkungan DJPI.....	143
Tabel 3. 28	Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana	144
Tabel 3. 29	Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Program	145
Tabel 3. 30	Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja.....	146
Tabel 3. 31	Perbandingan Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 dan 2025	148



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Fungsi Organisasi DJPI	3
Gambar 1. 2	Struktur Organisasi DJPI	4
Gambar 1. 3	Implementasi <i>Core Values</i> ASN BERAKHLAK	11
Gambar 1. 4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status	13
Gambar 1. 5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Gambar 1. 6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	19
Gambar 2. 1	Visi Kementerian PU.....	42
Gambar 2. 2	Rapat Pembahasan Konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2025	65
Gambar 3. 1	Data RPJMN.....	131
Gambar 3. 2	Pohon Anggaran Pagu Awal DJPI 2025	139
Gambar 3. 3	Pohon Anggaran Pagu Revisi DJPI 2025	140
Gambar 3. 4	Kronologis Revisi DIPA DJPI 2024 (BA 033)	141
Gambar 3. 5	Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan	142
Gambar 3. 6	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	147
Gambar 3. 7	Peringkat III Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Pekerjaan Umum Kategori Unit Organisasi	151
Gambar 3. 8	Juara I Transformasi Digital Tahun 2025 Kategori Unit Organisasi	152
Gambar 3. 9	Sistem Manajemen Anti Penyuapan(SMAP).....	153
Gambar 3. 10	Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Proyek Sitinjau Lauik.....	155
Gambar 3. 11	Pelaksanaan Kegiatan CreatIFF 2025	156
Gambar 3. 12	Greenhouse Gas Emissions Reduction in Infrastructure (GERIN)	158
Gambar 3. 13	Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Bogor – Serpong (Via Parung)	158
Gambar 3. 14	Smart Risk Management Dashboard.....	159
Gambar 3. 15	Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021	161
Gambar 3. 16	Aplikasi E-JFAPI	162
Gambar 3. 17	Aplikasi SIDIA DJPI (Sistem Informasi Digitalisasi Inventarisasi Aset Data BMN).....	162



Gambar 3. 18 Aplikasi DIMonev DJPI (Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi DJPI)	163
Gambar 3. 19 Aplikasi POSESIP (Portal Database Informasi Pemeriksaan).....	163

DAFTAR ISTILAH

AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
BA	: Berita Acara
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BMN	: Barang Milik Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
DIMonev DJPI	: Digitalisasi <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
DIPA	: Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran
Direktorat PPIBM	: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga
Direktorat PPICK	: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
Direktorat PPISDA	: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Direktorat PSSPP	: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
DJPI	: Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
E-JFAPI	: <i>Electronic</i> Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
ESG	: <i>Environment, Social, and Governance</i>
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKSP	: Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKU	: Indikator Kinerja Utama
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian PU	: Kementerian Pekerjaan Umum
KPBU	: Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Monev	: <i>Monitoring</i> dan Evaluasi
MR	: Manajemen Risiko
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
PK	: Perjanjian Kinerja
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
POSESIP	: Portal Database Informasi Pemeriksaan
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDA	: Sumber Daya Air
SDM	: Sumber Daya Manusia



Setditjen PI	: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
SIDIA DJPI	: Sistem Informasi Digitalisasi Inventarisasi Aset Data BMN
SIMPUL KPBU	: Sistem Informasi Manajemen Proyek Unggulan KPBU
SK	: Sasaran Kegiatan
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SP	: Sasaran Program
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SRMD	: <i>Smart Risk Management Dashboard</i>
SS	: Sasaran Strategis
TNDE	: Tata Naskah Dinas Elektronik
TTE	: Tanda Tangan Elektronik
Uker	: Unit Kerja
Unor	: Unit Organisasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) sebagai entitas unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum memiliki kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan SAKIP. Salah satu komponen penting dalam penilaian penyelenggaraan SAKIP adalah Pelaporan Kinerja.

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Secara umum, Laporan Kinerja menjelaskan tingkat pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja DJPI Tahun 2025 bertujuan untuk mengimplementasikan SAKIP secara efisien dan efektif serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dan representasi akuntabilitas kinerja DJPI. Dalam menyusun laporan ini, DJPI telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah selaku koordinator penyusunan laporan kinerja internal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, serta dengan Kementerian PAN dan RB sebagai koordinator laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, diharapkan laporan kinerja DJPI dapat memenuhi standar pelaporan akuntabilitas baik internal Kementerian Pekerjaan Umum maupun nasional, sehingga mampu meningkatkan kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan dan



peningkatan kinerja.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perpres Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, DJPI merupakan unit organisasi yang menangani pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2025 – 2029. Selain itu, DJPI juga ditetapkan sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Simpul KPBU di Kementerian PUPR. Tugas dan fungsi DJPI adalah sebagai berikut.

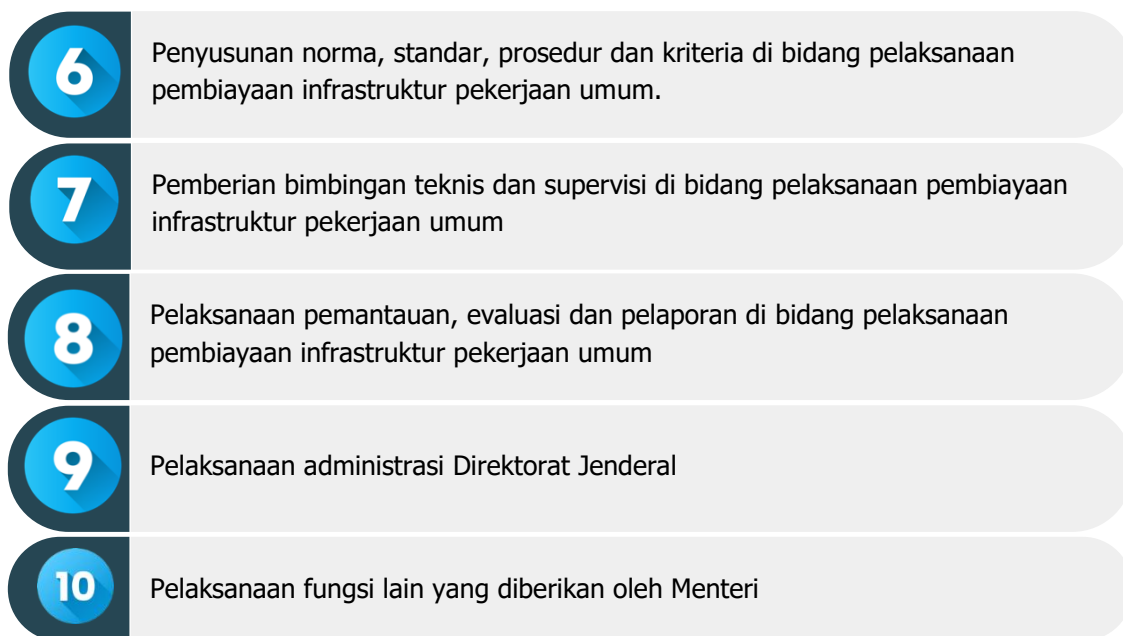
A. Tugas

DJPI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

DJPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1 Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3 Koordinasi dan sinkronasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum
- 4 Penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum
- 5 Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum

- 
- 
- | | |
|----|---|
| 6 | Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum. |
| 7 | Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum |
| 8 | Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum |
| 9 | Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal |
| 10 | Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri |

Gambar 1. 1 Fungsi Organisasi DJPI

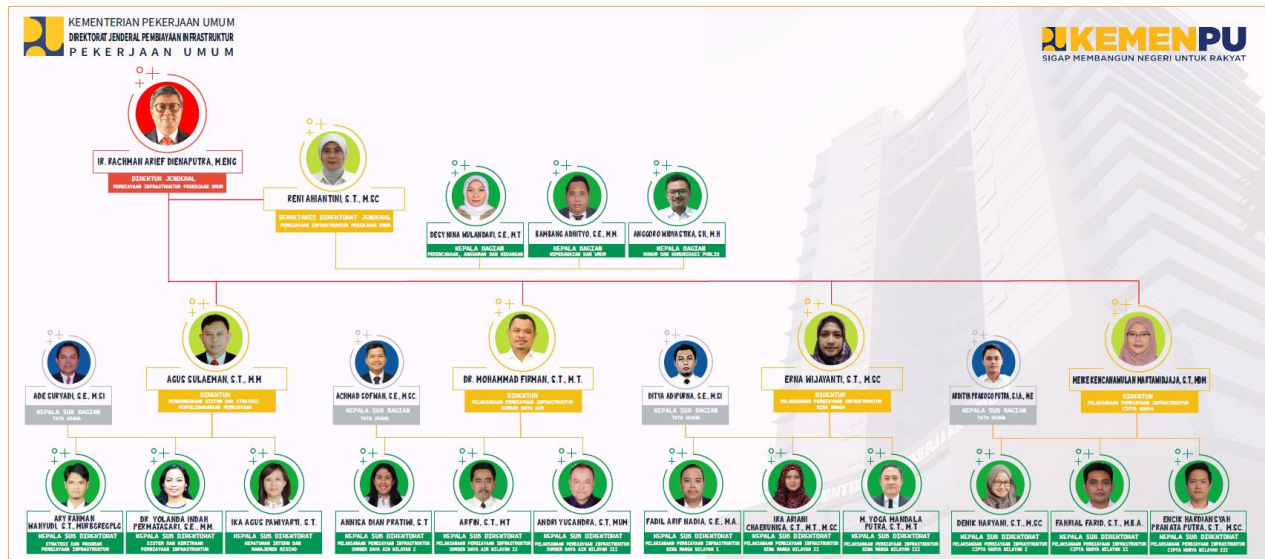
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Perpres Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, DJPI terdiri atas 5 (lima) Unit Kerja Eselon II sebagai berikut:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.
2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.
3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.
4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga.
5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi DJPI

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal

Fungsi :

- a. penyiapan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan pembinaan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran serta keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah di Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;

- 
- g. pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai dan jabatan fungsional;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - i. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
 - j. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
 - k. koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum; dan
 - l. pelaksanaan urusan komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum didukung oleh tiga Bagian, terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan.
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;

b. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan pengembangan strategi, rencana strategis, dan program pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan

- 
- strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
 - e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
 - g. pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
 - h. pelaksanaan kemitraan dan kerja sama dalam dan/atau luar negeri di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
 - i. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum; dan
 - k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan didukung oleh tiga Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur.
- b. Sub Direktorat Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur.
- c. Sub Direktorat Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko.
- d. Sub Bagian Tata Usaha.



3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

c. pengusulan rencana program, kegiatan dan anggaran di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

d. koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

e. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

f. pelaksanaan penyiapan perjanjian kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

g. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

j. pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat; dan

k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air didukung oleh tiga Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah I.
- b. Sub Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah II.

- 
- c. Sub Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah III.
 - d. Sub Bagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga.

- Fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
 - c. pengusulan rencana program, kegiatan dan anggaran di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
 - d. koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
 - e. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
 - f. pelaksanaan penyiapan perjanjian kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
 - g. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
 - j. pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat; dan
 - k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga didukung oleh tiga Sub Direktorat dan satu bagian, yaitu:

- 
- a. Sub Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah I.
 - b. Sub Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah II.
 - c. Sub Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah III.
 - d. Sub Bagian Tata Usaha

5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- c. pengusulan rencana program, kegiatan dan anggaran di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- d. koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- e. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- f. pelaksanaan penyiapan perjanjian kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- g. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- j. pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.



Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya didukung oleh tiga Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I.
- b. Sub Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II.
- c. Sub Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III.
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting dan utama dalam proses pencapaian kinerja organisasi. Peran strategis SDM menentukan arah tata kelola instansi pemerintahan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan SDM perlu menjadi perhatian dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan asta cita Presiden dan Wakil Presiden nomor 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”. Fokus pembangunan SDM juga menjadi salah satu arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional yaitu penguatan SDM ASN sebagai modal utama yang berfokus pada peningkatan kompetensi digital, penguatan integritas, dan pengembangan profesionalisme ASN dalam menghadapi disrupsi global dan meningkatnya kompleksitas tuntutan pelayanan publik.

Dalam kerangka organisasi, terdapat keterkaitan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencapaian target kinerja organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan sasaran program dan kegiatan, tetapi juga dihasilkan dari peran serta kontribusi kinerja individu melalui pencapaian sasaran kinerja pegawai (SKP).

Core Values BerAKHLAK merupakan orientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif kolaborasi hal tersebut selayaknya dimiliki oleh ASN. DJPI merupakan satu-satunya unit organisasi pada Tahun 2025 yang melaksanakan acara terkait Sosialisasi Kode Etik, Disiplin, *Core Values* BerAKHLAK dan Mutasi Pegawai, sehingga mendapatkan

apresiasi dari Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. *Core Values* ASN BerAKHLAK merupakan budaya kerja yang menciptakan sikap profesional, tanggung jawab serta siap menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai insan Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan Sosialisasi Kode Etik, Disiplin, *Core Values* BerAKHLAK dan Mutasi Pegawai di lingkungan DJPI dilaksanakan pada Tanggal 6 November 2025.



Gambar 1. 3 Implementasi *Core Values* ASN BERAKHLAK

Pengelolaan kinerja pegawai di DJPI pada tahun 2025 mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Untuk mendukung hal tersebut dan mewujudkan pegawai ASN yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional, DJPI secara rutin menyelenggarakan *workshop* atau internalisasi, pelatihan dan evaluasi pengembangan kompetensi bagi pegawainya. Dengan demikian, pengelolaan kinerja individu dan organisasi di DJPI dapat berjalan sinergis untuk mendorong peningkatan kinerja DJPI secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Pegawai ASN.

Rekapitulasi SDM dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, meliputi: status, golongan, jabatan, pendidikan dan usia. Pengelompokan berdasarkan jenis kelamin dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Berikut merupakan analisis SDM di DJPI tahun 2025.

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

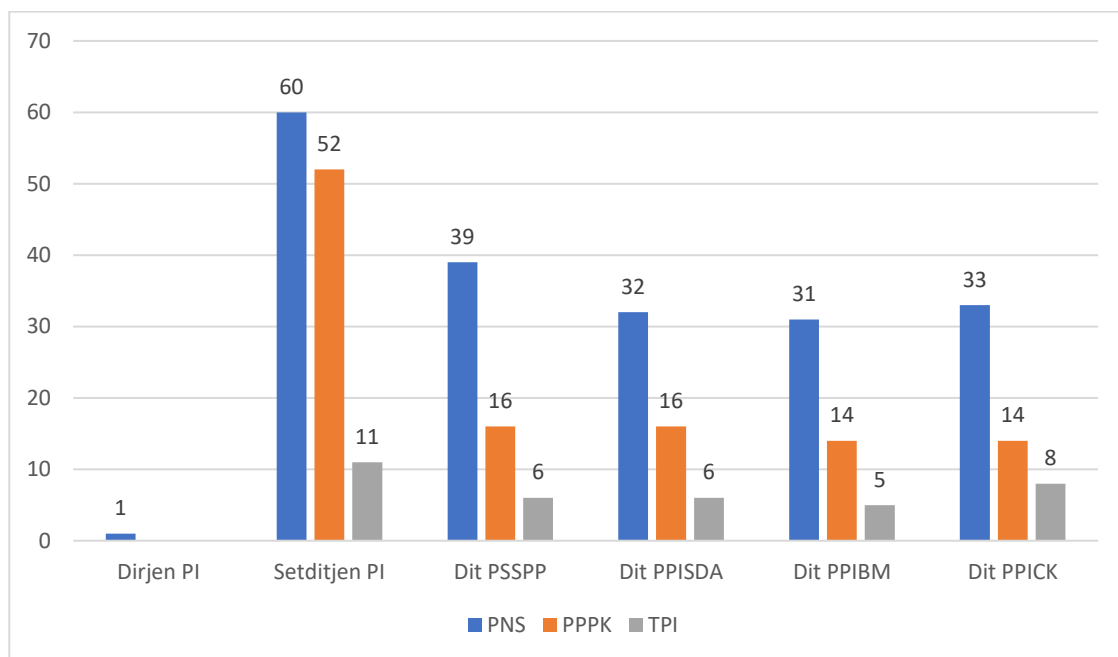
Jumlah pegawai di lingkungan DJPI pada tahun 2025 adalah sebanyak 344 pegawai. Jika dilihat berdasarkan status kepegawaiannya, jumlah ini terdiri dari 308

ASN (89,5%) dan 36 non-ASN (10,5%). Adapun total kebutuhan pegawai di lingkungan DJPI berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada tahun 2025 adalah sebanyak 601 pegawai. Dengan demikian terdapat selisih kebutuhan pegawai yang cukup besar. Jika dibandingkan dengan jumlah ASN yang ada pada tahun 2025, selisih antara kebutuhan dengan jumlah ASN yang ada adalah sebanyak 293 pegawai. Gap dari kebutuhan ini kemudian menjadi dasar dari adanya pegawai Non PNS yang terdiri dari Tenaga Pendukung Individual (TPI). Jika dilihat dari jumlah pegawai di lingkungan DJPI baik ASN maupun non ASN sebanyak 344 pegawai, maka diketahui bahwa masih terdapat gap kebutuhan pegawai sebanyak 257 pegawai. Oleh karena itu, kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih cukup besar. Untuk dapat mencapai target kinerja, DJPI perlu mengusulkan penambahan formasi ASN kepada Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana (BKO), Kementerian PU melalui pengadaan CASN. Penambahan ASN ini penting untuk memenuhi kebutuhan pegawai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DJPI secara optimal. Selain itu, DJPI juga telah menyusun program pengembangan kompetensi bagi ASN yang ada saat ini, sehingga kapasitas dan kinerja ASN dapat terus ditingkatkan.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status

No	Unit Kerja	ASN				Non ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		PPNPN		TPI		
		P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	32	28	8	44	0	0	2	9	123
3	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	17	22	7	9	0	0	4	2	61
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	16	16	4	12	0	0	4	2	54
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	16	15	4	10	0	0	4	1	50
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	19	14	7	7	0	0	0	8	55
Total		100	96	30	82	0	0	14	22	344

Sumber: Nota Dinas Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Nomor 196/ND/Ps.2/2025 Hal Penyampaian Data Kelengkapan Penyusunan Laporan Kinerja DJPI PU Tahun 2025



Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

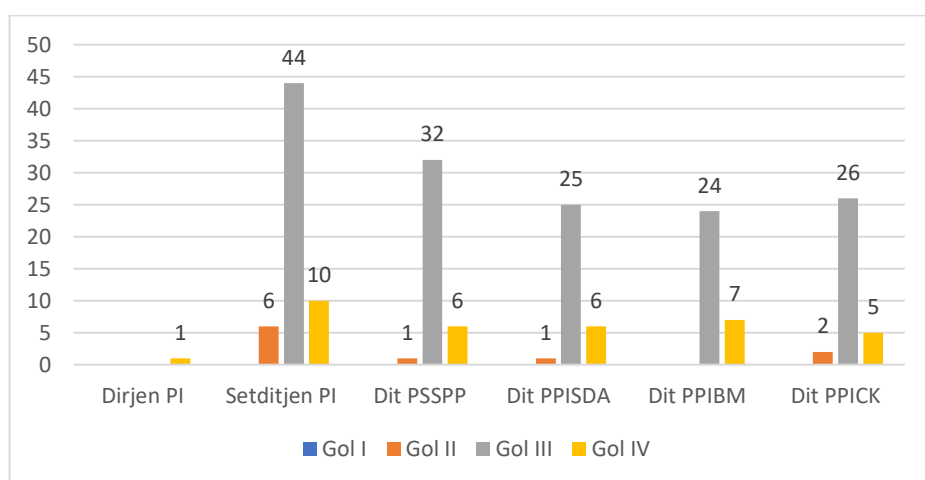
PNS di lingkungan DJPI tahun 2025 sebanyak 196 orang didominasi oleh pegawai golongan III sejumlah 151 orang (77,04%). Sementara itu, pegawai golongan II dan IV secara berurutan berjumlah 10 orang (5,10%) dan 35 orang (17,86%). Dominasi PNS golongan III ini mengindikasikan mayoritas PNS DJPI masih berada pada level penata dalam jenjang karir kepegawaian. Oleh karena itu, DJPI terus mendorong peningkatan jumlah PNS pada golongan yang lebih tinggi, khususnya golongan IV, melalui mekanisme promosi jabatan yang objektif serta pelaksanaan pengembangan karier secara berkelanjutan. Upaya ini penting untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan yang memadai, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi DJPI secara lebih efektif dan profesional.

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan							
		I		II		III		IV	
		P	L	P	L	P	L	P	L
1	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	-	-	5	1	20	24	7	3

No	Unit Kerja	Golongan							
		I		II		III		IV	
		P	L	P	L	P	L	P	L
3	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	-	-	1	14	18	3	3
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	-	-	-	1	15	10	1	5
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	-	-	-	-	12	12	4	3
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	-	-	2	-	14	12	3	2
Total		0	0	7	3	75	76	18	17

Sumber: Nota Dinas Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Nomor 196/ND/Ps.2/2025 Hal Penyampaian Data Kelengkapan Penyusunan Laporan Kinerja DJPI PU Tahun 2025



Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Berdasarkan kelompok jabatannya, jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 214 orang (69,71%). Sementara itu, jumlah Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 69 orang (22,48%), sedangkan sebanyak 20 orang (6,51%) merupakan gabungan dari jumlah pegawai dengan jenis jabatan Eselon I, II, III dan IV.

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

No	Jenis Jabatan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		P	L	P	L	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum					
	Eselon I	0	0	0	0	0
	Eselon II	1	0	0	0	1
	Eselon III	1	2	0	0	3
	Eselon IV	0	0	0	0	0

No	Jenis Jabatan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		P	L	P	L	
	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	4	2	5	38	49
	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	26	24	3	6	59
2	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan					
	Eselon II	0	1	0	0	1
	Eselon III	2	1	0	0	3
	Eselon IV	0	1	0	0	1
	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	0	1	0	4	5
	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	15	18	7	5	45
3	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air					
	Eselon II	0	1	0	0	1
	Eselon III	1	2	0	0	3
	Eselon IV	0	1	0	0	1
	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	1	1	2	3	7
	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	14	11	2	9	36
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga					
	Eselon II	1	0	0	0	1
	Eselon III	1	2	0	0	3
	Eselon IV	1	0	0	0	1
	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	3	0	0	2	5
	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	10	13	4	8	35
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya					
	Eselon II	1	0	0	0	1
	Eselon III	1	2	0	0	3
	Eselon IV	0	1	0	0	1
	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	0	0	1	2	3
	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	17	11	6	5	39
Total		100	95	30	82	307

Sumber: Nota Dinas Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Nomor 196/ND/Ps.2/2025 Hal Penyampaian Data Kelengkapan Penyusunan Laporan Kinerja DJPI PU Tahun 2025

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Dalam mendukung agenda transformasi SDM yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pegawai berbasis kompetensi, DJPI secara berkelanjutan menyelenggarakan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan formal, baik

melalui skema tugas belajar maupun pemberian beasiswa. Upaya ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan strategis serta tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi DJPI. Program pengembangan pendidikan formal tersebut merupakan bagian integral dari pengelolaan dan pengembangan karier PNS, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan kapasitas analitis, sikap, dan kepribadian profesional guna mendukung kinerja organisasi secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, jumlah pegawai DJPI berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 344 orang dengan mayoritas berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 187 orang (54,36%) dan Master (S-2) sebanyak 94 orang (27,33%), sedangkan pada Pendidikan Doktor (S-3) di DJPI sebanyak 3 orang (0,87%). Komposisi tingkat pendidikan tersebut mencerminkan komitmen DJPI dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal sebagai salah satu strategi utama untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi. DJPI secara berkelanjutan mendorong pegawai agar terus mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan, sehingga mampu memperkuat kapasitas individu, mendukung profesionalisme kerja, serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian kinerja dan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	ASN				Non ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		Honorar		TPI		
		P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU									
	S2		1							1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum									
	S2	17	11		1					29
	S1	10	16	4	15			2	7	45
	DIPLOMA	5	1		2					17
	SMA			3	21				2	26
	SMP			1	4					5
	SD				1					1
3	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan									

No	Pendidikan	ASN				Non ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		Honoror		TPI		
		P	L	P	L	P	L	P	L	
	S3	1								1
	S2	5	11					1	1	18
	S1	11	10	6	5			3	1	36
	DIPLOMA		1	1	1					3
	SMA				1					1
	SMP				1					1
	SD				1					1
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air									
	S3		2							2
	S2	4	7							11
	S1	12	6	1	10			4	2	35
	DIPLOMA			1						1
	SMA		1	2	2					5
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga									
	S2	8	8					1		17
	S1	8	7	3	9			3	1	31
	DIPLOMA			1						1
	SMA				1					1
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya									
	S2	9	8						1	18
	S1	8	6	5	5				7	31
	DIPLOMA	2		1						3
	SMA			1	1					2
	SMP				1					1
Total		100	96	30	82	0	0	14	22	344

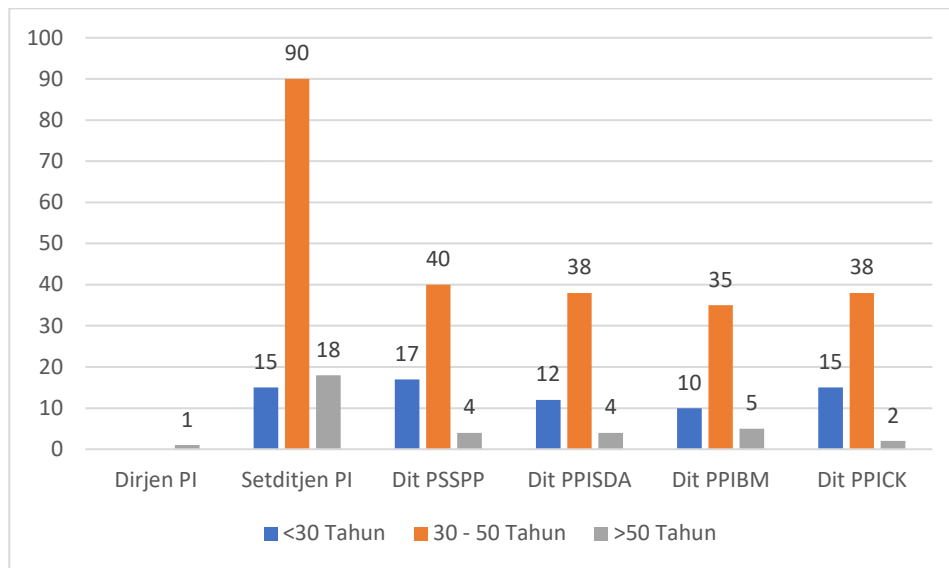
Sumber: Nota Dinas Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Nomor 196/ND/Ps.2/2025 Hal Penyampaian Data Kelengkapan Penyusunan Laporan Kinerja DJPI PU Tahun 2025

Berdasarkan kategori usia, pegawai di lingkungan DJPI tahun 2025 mayoritas berusia antara 30 tahun s.d 50 tahun yang berjumlah 240 orang (69,77%). Sementara itu, pegawai dengan usia di bawah 30 tahun sebanyak 69 orang (20,06%) dan pegawai di atas 50 tahun sebanyak 34 orang (9,88%) merupakan pegawai dengan usia di atas 50 tahun.

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	ASN				Non ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		Honorer		TPI		
		P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum									
	Di bawah 30 Tahun									0
	30 Tahun s.d 50 Tahun									0
	Di atas 50 Tahun		1							1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum									
	Di bawah 30 Tahun	9	4	1					1	15
	30 Tahun s.d 50 Tahun	17	21	5	39			1	6	89
	Di atas 50 Tahun	6	3	2	5			1	2	19
3	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan									
	Di bawah 30 Tahun	6	4	2				4	1	17
	30 Tahun s.d 50 Tahun	10	16	5	8				1	40
	Di atas 50 Tahun	1	2		1					4
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air									
	Di bawah 30 Tahun	9	2		1					12
	30 Tahun s.d 50 Tahun	7	10	4	11			4	2	38
	Di atas 50 Tahun		4							4
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga									
	Di bawah 30 Tahun	4	3					3		10
	30 Tahun s.d 50 Tahun	11	11	4	7			1	1	35
	Di atas 50 Tahun	1	1		3					5
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya									
	Di bawah 30 Tahun	9	4	1	1					15
	30 Tahun s.d 50 Tahun	8	10	6	6				8	38
	Di atas 50 Tahun	2								2
Total		93	100	96	30	82	0	0	14	22

Sumber: Nota Dinas Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Nomor 196/ND/Ps.2/2025 Hal Penyampaian Data Kelengkapan Penyusunan Laporan Kinerja DJPI PU Tahun 2025



Gambar 1. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

1.3.2.4 Pengembangan Kompetensi SDM

Pengembangan pegawai dan pengelolaan jabatan fungsional merupakan upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, serta kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya. Bagi DJPI, dua aspek ini menjadi elemen penting untuk memperkuat profesionalisme aparatur dan memastikan kualitas pelaksanaan tugas organisasi. Pengembangan pegawai dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan dan pendidikan formal, peningkatan kompetensi teknis maupun nonteknis, penguatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial, serta pengembangan keterampilan hidup dan perencanaan karier. Selain itu, evaluasi dan penilaian kinerja menjadi bagian penting untuk memastikan setiap pegawai memperoleh umpan balik yang konstruktif dan peluang pengembangan yang sesuai.

Sementara itu, pengelolaan jabatan fungsional bertujuan mengoptimalkan peran pejabat fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi masing-masing. Upaya ini ditempuh melalui perencanaan karier yang lebih terarah, pengelolaan struktur organisasi yang efektif, pengaturan tugas dan kewenangan yang jelas, serta pengelolaan kinerja yang berbasis capaian. Penguatan sistem informasi dan teknologi juga menjadi bagian integral untuk mendukung proses administrasi dan pengembangan jabatan fungsional secara lebih efisien. Dengan penerapan strategi



pengembangan SDM yang terarah serta pengelolaan jabatan fungsional yang optimal, kualitas pelayanan DJPI kepada masyarakat diharapkan semakin meningkat, sekaligus memperkuat kontribusi organisasi dalam pencapaian target dan kinerja DJPI secara keseluruhan.

A. Pengembangan Pegawai

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai, DJPI melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum telah menyusun daftar Kebutuhan Akan Diklat (KAD) di lingkungan DJPI. Data tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan yang dapat diselenggarakan secara mandiri (*in-house*) oleh DJPI bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, KAD juga dimanfaatkan untuk memetakan kebutuhan pengiriman pegawai DJPI untuk mengikuti berbagai program pelatihan, pendidikan, dan diklat yang dilaksanakan oleh instansi di luar DJPI. Jenis pelatihan atau diklat yang dipilih harus selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, serta relevan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas harian pegawai. Dengan demikian, setiap program pengembangan SDM dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kinerja organisasi.

Strategi pengembangan pegawai di lingkungan DJPI dilaksanakan melalui dua model utama. Pertama, pengembangan melalui jalur pendidikan akademik profesional, yang bertujuan meningkatkan kompetensi formal pegawai pada jenjang Diploma (D3), Sarjana (S-1), Magister (S-2), hingga Doktor (S-3). Kedua, pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan pegawai, yang mencakup Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, serta Diklat Teknis sesuai kebutuhan keahlian dan tuntutan pekerjaan. Melalui pendekatan tersebut, pengembangan kapasitas pegawai diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan DJPI.

Pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan formal merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan DJPI. Program pendidikan formal ini dapat didanai melalui anggaran DIPA BPSDM Kementerian PUPR maupun melalui pembiayaan dari lembaga atau negara sponsor yang menawarkan dukungan pendidikan. Ketentuan mengenai status pegawai selama



menempuh pendidikan juga telah diatur secara jelas. Apabila pendidikan dilaksanakan pada jam kerja dan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah atau sponsor, pegawai akan ditetapkan dalam status tugas belajar. Sebaliknya, apabila pendidikan ditempuh di luar jam kerja dengan menggunakan biaya pribadi, pegawai diberikan status izin belajar (biaya mandiri). Pengaturan ini bertujuan memastikan keberlangsungan tugas kedinasan sekaligus memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya.

Selain melalui pendidikan formal, pengembangan kapasitas pegawai juga dilaksanakan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan (diklat). Program diklat ini mencakup beragam bentuk penguatan kompetensi, seperti peningkatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan unit kerja, pengembangan keterampilan manajerial dan kepemimpinan, serta pemenuhan kompetensi fungsional bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Baik pendidikan formal maupun diklat memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kesempatan pengembangan karier kepada pegawai yang telah menunjukkan kinerja baik serta komitmen tinggi dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan demikian, program-program pengembangan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi dan investasi jangka panjang bagi kemajuan SDM DJPI.

Untuk mendukung penguatan kompetensi secara lebih merata, pegawai ASN di lingkungan DJPI juga secara rutin mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, *workshop*, seminar, maupun bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kegiatan peningkatan kapasitas ini diselenggarakan baik oleh DJPI, BPSDM Kementerian PUPR, kementerian/lembaga lain, maupun mitra kerja internasional. Keterlibatan pegawai dalam program-program tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan substantif, tetapi juga membuka kesempatan bagi pegawai untuk memperluas jejaring profesional serta mengadopsi praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan tugas DJPI.

Seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri, didokumentasikan secara lengkap dan disajikan pada lampiran laporan kinerja. Dokumentasi ini menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas program pengembangan SDM, sekaligus menjadi rujukan dalam



perencanaan kebutuhan pelatihan pada periode berikutnya. Dengan pendekatan pengembangan SDM yang terencana, terarah, dan berkelanjutan, DJPI diharapkan mampu membangun aparatur yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur ke depan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, berbagai pelatihan atau kegiatan bimbingan teknis diikuti oleh pegawai ASN di lingkungan DJPI pada setiap bidang pekerjaan. Rincian mengenai pendidikan dan pelatihan, *workshop*, serta seminar yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, disampaikan pada lampiran laporan kinerja.

B. Pengelolaan Jabatan Fungsional

Penataan jabatan fungsional diterapkan melalui implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Regulasi ini menggantikan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Revisi tersebut dilakukan sebagai bentuk transformasi SDM, salah satunya dengan menciptakan manajemen jabatan fungsional yang lincah dan profesional.

Perubahan ini merupakan bagian dari transformasi reformasi birokrasi tahun 2025 *Dynamic Governance*, yaitu birokrasi semakin efektif, efisien dan bersih dengan ciri *agile* dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia. Oleh karena itu, perlu didukung dengan SDM yang berkualitas dan berkompeten guna menjawab berbagai tantangan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.

Jabatan Fungsional ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional yang bersangkutan. Pola pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dengan arah kebijakan serta sasaran kinerja unit organisasi.

Pada hakikatnya, Jabatan Fungsional diposisikan sebagai jalur strategis dalam pengembangan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), baik Pegawai

Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Konsepsi Jabatan Fungsional tidak hanya menekankan aspek penugasan, tetapi juga mengandung strategi pembinaan karier yang sistematis dan berkelanjutan, yang mendorong peningkatan kompetensi, keahlian, dan kinerja ASN sejak tahap awal perjalanan karier hingga jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, Jabatan Fungsional berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data Jabatan Fungsional yang disusun pada tahun 2025, terdapat 214 jabatan fungsional di DJPI. Jumlah Pejabat Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas DJPI Tahun 2025, adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 6 Rekapitulasi Jumlah Pejabat Fungsional di DJPI Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	59
2	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	45
3	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	36
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	35
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	39
Total		214

Sumber: Hasil Analisis 2025

Tabel 1. 7 Daftar Nama Jabatan Fungsional di DJPI Tahun 2025

No	Nama Jabatan Fungsional	Rumpun JF	Jumlah
1	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	PUPR	81
2	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	PUPR	4
3	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	PUPR	6
4	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	PUPR	2
5	Pengelola Sumber Daya Air	PUPR	5
6	Teknik Jalan dan Jembatan	PUPR	2
7	Teknik Pengairan	PUPR	2



No	Nama Jabatan Fungsional	Rumpun JF	Jumlah
8	Teknik Tata Bangunan & Perumahan	PUPR	1
9	Teknik Penyehatan Lingkungan	PUPR	1
10	Analisis Anggaran	Non PUPR	3
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Non PUPR	6
12	Perencana	Non PUPR	7
13	Analisis Kebijakan	Non PUPR	36
14	Pranata Komputer	Non PUPR	10
15	Pranata Keuangan APBN	Non PUPR	4
16	Arsiparis	Non PUPR	20
17	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Non PUPR	11
18	Pranata Humas	Non PUPR	8
19	Analisis Hukum	Non PUPR	4
20	Perancang Peraturan Perundang Undangan	Non PUPR	1
Jumlah			214

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Jumlah Pejabat Fungsional di lingkungan DJPI mengalami peningkatan pada Tahun 2025, dari semula sebanyak 204 pejabat pada tahun 2024 menjadi 214 pejabat pada tahun 2025. Peningkatan tersebut tidak signifikan walaupun telah dilakukan pengangkatan CPNS dan PPPK. Hal itu disebabkan karena dalam periode yang sama terdapat pegawai yang memasuki masa purnabakti, adanya mutasi pegawai ke luar DJPI, serta pegawai yang diberhentikan.

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran merupakan komponen penting yang berperan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya berfungsi untuk mempermudah serta mempercepat proses kerja, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas aparatur dan kualitas hasil kerja. Dukungan fasilitas kerja yang optimal memungkinkan pegawai melaksanakan tugas secara lebih efektif dan efisien, sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan



Perumahan Rakyat (PUPR) didukung oleh sarana dan prasarana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). Oleh karena itu, pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian PUPR harus dilakukan secara tertib, akuntabel, dan berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan aset. Penggunaan dan pemanfaatan BMN yang efektif diharapkan mampu menunjang fungsi pelayanan Kementerian PUPR kepada masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Lebih lanjut, ketersediaan dan pengelolaan BMN yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PUPR, tetapi juga membuka peluang optimalisasi nilai manfaat aset melalui fungsi *budgeter*. Pemanfaatan BMN secara produktif dan berkelanjutan berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, sehingga pengelolaan aset negara tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh.

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Pada tahun 2024, DJPI memiliki 122 jenis BMN yang terdiri dari gedung kantor, kendaraan dinas, dan peralatan kantor. Dari jumlah tersebut, sebagian besar BMN di DJPI berada dalam kondisi baik dan layak untuk mendukung operasional DJPI. Namun begitu, terdapat beberapa BMN yang kondisinya perlu mendapatkan perhatian karena mengalami kerusakan. Oleh karena itu, DJPI secara berkala melakukan perawatan dan perbaikan BMN yang rusak. Selain itu, penggantian BMN yang sudah rusak dan tidak layak pakai dilakukan melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan BMN yang baik, diharapkan seluruh BMN DJPI dapat dimanfaatkan dan berfungsi dengan maksimal untuk mendukung operasional DJPI secara maksimal dalam memberikan pelayanan prima.

Pada tahun 2025, DJPI melaksanakan beberapa renovasi dan pemeliharaan bangunan gedung dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor. Renovasi dan pemeliharaan bangunan gedung dilakukan seiring dengan perpindahan ruang kerja DJPI dari gedung sebelumnya di Jl. Raden Patah I no.1 menjadi pindah ke Gedung G di Jl. Pattimura no.20. Seluruh pekerjaan tersebut diselesaikan tepat waktu dan mengacu pada prinsip efisiensi serta ramah lingkungan. Dengan renovasi dan

pemeliharaan tersebut, diharapkan sarana dan prasarana DJPI dapat lebih representatif serta mendukung peningkatan kinerja pegawai. Berikut ini adalah daftar BMN DJPI Per Desember 2025.

Tabel 1. 8 Daftar BMN DJPI

No	Nama BMN	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
1	<i>A.C. Split</i>	27	25	2	0
2	<i>Acces Control System</i>	4	2	0	2
3	<i>Acces Point</i>	6	6	0	0
4	<i>Air Cleaner</i>	15	15	0	0
5	Alat Dapur Lainnya (<i>Cooker Hood Portable</i>)	1	1	0	0
6	Alat Musik Modern/Band	1	1	0	0
7	Alat Penghancur Kertas	38	27	1	10
8	Alat Studio Lainnya	2	2	0	0
9	<i>Camera Conference</i>	15	10	2	3
10	<i>Camera Digital</i>	21	14	4	3
11	<i>Camera Video</i>	3	1	0	2
12	<i>Cctv - Camera Control Television System</i>	38	9	8	21
13	<i>Digital Multimeter</i> (Alat Ukur Universal)	1	1	0	0
14	Dispenser	7	4	1	2
15	Drone	7	6	0	1
16	<i>Filing Cabinet</i> Besi	47	39	0	8
17	<i>Finger Print Time And Attendance</i> A.C.S	6	6	0	0
18	<i>Focusing Screen/Layar Lcd Projector</i>	4	4	0	0
19	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	6	6	0	0
20	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. Ii	1	1	0	0
21	<i>Handy Cam</i>	2	1	0	1
22	<i>Handy Talky</i> (Ht)	22	16	0	6
23	<i>Hard Disk</i>	16	14	0	2
24	Hasil Kajian/Penelitian	1	1	0	0
25	<i>Heater</i> (Alat Rumah Tangga Lainnya)	2	2	0	0
26	Kamera Digital	1	1	0	0
27	Karpet	10	0	4	6
28	Kipas Angin	2	2	0	0
29	<i>Kitchen Set</i>	2	0	0	2
30	Kursi Besi/Metal	303	149	0	154

No	Nama BMN	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
31	Kursi Fiber Glas/Plastik	71	50	6	15
32	Kursi Kayu	50	22	0	28
33	Lampu Blitz Kamera	1	1	0	0
34	Lap Top	14	13	1	0
35	Lcd Projector/ <i>Infocus</i>	21	18	1	2
36	Lemari Besi/Metal	55	49	3	3
37	Lemari <i>Display</i>	2	2	0	0
38	Lemari Es	8	7	1	0
39	Lemari Kayu	40	4	1	35
40	Lemari Penyimpan	7	1	3	3
41	Lensa Kamera	8	8	0	0
42	<i>Locker</i>	4	0	2	2
43	Meja Kerja Kayu	113	77	0	36
44	Meja Komputer	1	1	0	0
45	Meja Makan Besi	1	1	0	0
46	Meja Makan Kayu	4	4	0	0
47	Meja Marmer	4	4	0	0
48	Meja Rapat	34	27	1	6
49	Meja Resepsionis	21	18	1	2
50	Meja Telepon	1	1	0	0
51	Mesin <i>Barcode</i>	2	2	0	0
52	Mesin Bor	1	1	0	0
53	Mesin Cuci	1	1	0	0
54	Mesin Jilid	2	2	0	0
55	<i>Mic Conference</i>	1	1	0	0
56	Monitor	3	3	0	0
57	Nakas	16	16	0	0
58	<i>Note Book</i>	129	93	11	25
59	Oven Listrik	2	2	0	0
60	P.C Unit	338	272	29	37
61	Peralatan Jaringan Lainnya	77	3	0	74
62	Pintu Elektrik (Yang Memakai Akses)	10	0	0	10
63	<i>Portable Air Conditioner</i> (Alat Pendingin)	2	2	0	0
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	248	183	21	44
65	Rak Besi	36	36	0	0
66	<i>Router</i>	5	1	0	4
67	<i>Scanner</i> (Peralatan Personal Komputer)	37	28	1	8

No	Nama BMN	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
68	Sepeda Motor	1	1	0	0
69	Server	2	2	0	0
70	Sofa	14	13	0	1
71	<i>Sound System</i>	1	1	0	0
72	<i>Station Wagon</i>	4	4	0	0
73	Suv Listrik	1	1	0	0
74	<i>Switch</i>	17	8	0	9
75	Tablet Pc	17	10	7	0
76	<i>Telephone Mobile</i>	3	3	0	0
77	Televisi	57	43	2	12
78	<i>Tripod Camera</i>	1	1	0	0
79	<i>Ultra Mobile P.C</i>	1	1	0	0
80	<i>Video Conference</i>	2	0	1	1
81	<i>Voice Recorder</i>	2	2	0	0
82	<i>White Board</i>	7	3	1	3
83	<i>Wireless</i>	1	1	0	0
84	<i>Wireless Access Point</i>	16	0	16	0
85	<i>Software Komputer</i>	2	2	0	0
86	<i>Camera Adaptor</i>	1	1	0	0
87	Kaca Hias	2	1	0	1
88	Kursifiber Glass/Plastik	1	1	0	0
89	<i>Laser Pointer</i>	1	0	1	0
90	<i>White Board Electronic</i>	1	1	0	0
91	<i>Elektrik Thermometer</i>	5	0	0	5
92	Notebook	1	0	0	1
93	Pabx	1	0	0	1
94	Printer	2	0	0	2
95	Kursi Fiber Glass/Plastik	4	0	0	4
96	<i>Cubikal</i>	279	0	0	279
97	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1	0	0	1
98	<i>Wastafel Portable</i>	1	0	0	1
99	<i>Uninterruptible Power Supply (Ups)</i>	1	0	0	1
100	Ukiran Kayu Dan Sejenisnya	6	0	0	6
101	<i>Telephone (PABX)</i>	24	0	0	24
102	<i>Switcher Combination</i>	1	0	0	1
103	Rak Server	1	0	0	1

No	Nama BMN	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
104	Lan Card	2	0	0	2
105	Lampu-Lampu Kristal	2	0	0	2
106	Mesin Ketik Listrik	1	0	0	1
107	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1	0	0	1
108	Mesin Penghitung Uang	2	0	0	2
109	Mesin <i>Fotocopy Electronic</i>	2	0	0	2
110	Mesin Absensi	2	0	0	2
111	<i>Filing Cabinet</i> Kayu	9	0	0	9
112	Digital <i>Thermometer</i>	1	0	0	1
113	Data <i>Patch</i> Panel	6	0	0	6
114	Unit Power Supply	1	0	0	1
115	<i>Storage Modul Disk</i> (Peralatan Mainframe)	1	0	0	1
116	<i>Buffet</i>	14	0	0	14
117	<i>Rackmount</i>	1	0	0	1
118	Brankas	1	0	0	1
119	Peralatan Fitnes	5	0	0	5
120	<i>Bracket Standing</i> Peralatan	1	0	0	1
121	Alat Kantor Lainnya	1	0	0	1
122	Layar Film / <i>Projector</i>	2	0	0	2
Total	122	2518	1420	132	966

Sumber: Nota Dinas Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Nomor 196/ND/Ps.2/2025 Hal Penyampaian Data Kelengkapan Penyusunan Laporan Kinerja DJPI PU Tahun 2025

Tabel 1. 9 Laporan BMN di Neraca

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	160,617,672
132111	Peralatan dan Mesin	43,031,165,392
134113	Jaringan	80,500,000
135121	Aset Tetap Lainnya	201,320,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(38,834,209,152)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(65,849,000)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(199,100,000)
162121	Hak Cipta	2,850,000
162151	Software	1,278,579,500
162171	Hasil Kajian/Penelitian	16,123,870,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4,546,957,979
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(4,494,171,609)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(256,500)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,278,579,500)
J U M L A H		20,553,694,782

Sumber: Laporan BMN DJPI Tahun 2025



Berdasarkan data BMN DJPI, per tanggal 31 Desember 2025, tercatat 14 BMN yang dilaporkan pada akun neraca dengan jumlah sebesar Rp20.553.694.782. Pengelolaan serta pendataan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan DJPI telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemutakhiran data BMN dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh BMN tercatat secara lengkap dan akurat. Pendataan BMN bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi BMN secara menyeluruh, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya, serta mengoptimalkan pemanfaatan BMN dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan tersedianya data BMN yang akurat, diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan DJPI dapat lebih optimal dalam menunjang pencapaian kinerja DJPI.

1.4.2 Transformasi Digital

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, DJPI terus berupaya mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung pencapaian kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum, pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) telah memudahkan komunikasi dan proses pengambilan keputusan di DJPI. Selain itu, penggunaan TNDE juga berdampak pada efisiensi anggaran belanja (ATK) dan pengadaan ruang rapat, karena mampu mengurangi kebutuhan rapat di luar kantor. Saat ini DJPI memiliki delapan ruang rapat yang digunakan secara optimal untuk mendukung kinerja organisasi.

Dalam rangka mendukung pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut, inovasi yang dilakukan di tingkat Kementerian PUPR dan yaitu melalui aplikasi di DJPI TNDE, dan aplikasi Bravo. Di samping itu, DJPI juga mengelola dan mengembangkan beberapa aplikasi penunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Bidang PUPR (SIPADU), merupakan aplikasi lelang KPBU.
2. *Dashboard* Sistem Informasi Manajemen Proyek Unggulan KPBU (SIMPUL KPBU), merupakan aplikasi yang digunakan oleh Pimpinan untuk melakukan *monitoring* status dan progres proyek KPBU di lingkungan DJPI.

- 
3. *Inpassing*, merupakan aplikasi yang membantu proses penyesuaian pegawai ke Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Aplikasi ini berfungsi untuk menilai dan *memonitor* pegawai berdasarkan dokumen persyaratan jabatan.
 4. Sistem Informasi Pengelolaan JF API (e-JFAPI) merupakan platform sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan secara terintegrasi, transparan, dan berbasis data terkini. Sistem ini dirancang sebagai sarana pengelolaan *database* JF API yang dapat diakses secara *real-time* dan *up-to-date*, serta mendukung seluruh proses manajemen jabatan fungsional, mulai dari pendaftaran akun, pengajuan pindah jabatan, kenaikan jenjang, pelaksanaan uji kompetensi, hingga penerbitan hasil uji kompetensi dan surat rekomendasi.

1.5 Isu Strategis Unit Organisasi

Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen memenuhi kebutuhan infrastruktur nasional melalui berbagai strategi percepatan dan inovatif. Sebagai institusi pengembang infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan berbagai upaya strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur Pekerjaan Umum. Selama periode 2020 - 2024, capaian pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum di masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

1. **Sumber Daya Air**, capaian kinerja paket pembiayaan KPBU pada proyek sektor sumber daya air yang siap dikerjasamakan Tahun Anggaran 2024, yaitu PLTA Tiga Dihaji 40MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan, dengan nilai investasi sebesar Rp920.400.000.000 dan status progres dalam tahapan penunjukan langsung dan pembentukan Badan Usaha Pelaksana. Adapun paket pembiayaan proyek KPBU pada sektor sumber daya air pada tahapan perencanaan dan penyiapan, yaitu :
 - a. Daerah Irigasi Jambo Aye, Aceh, dengan nilai investasi sebesar Rp1.840.000.000.000 dan status progres dalam tahapan Prastudi Kelayakan;
 - b. Daerah Irigasi Lhok Guci, Aceh, dengan nilai investasi sebesar Rp3.320.000.000.000 dan status progres dalam tahapan Persiapan Lelang;

- 
- c. Bendungan Lambakan, Kalimantan Timur, dengan nilai investasi sebesar Rp7.220.000.000.000 dan status progres dalam tahapan identifikasi;
 - d. Bendungan Saddang, Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sebesar Rp3.010.000.000.000 dan status progres dalam tahapan identifikasi;
 - e. Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan nilai investasi sebesar Rp1.650.000.000.000 dan status progres dalam tahapan Penyepakatan atas Perubahan Konsorsium dan Perpanjangan Waktu Penyiapan Proyek;
 - f. Revitalisasi dan Optimalisasi Sistem Interkoneksi HLD Wilayah Sungai Lombok Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan nilai investasi sebesar Rp1.580.000.000.000 dan status progres dalam tahapan persiapan transaksi;
 - g. Bendungan Bodri, Jawa Tengah, dengan nilai investasi sebesar Rp2.073.000.000.000. Status progres dalam tahapan *Readiness Criteria* Pengadaan Tanah untuk dilanjutkan ke Tahap Transaksi yang ditargetkan dapat dimulai pada Kuartal II 2026.
 - h. PLTM Leuwikeris 7,4 MW pada Bendungan Leuwikeris, Jawa Barat, dengan nilai investasi sebesar Rp255.830.000.000 dan status progres dalam tahapan evaluasi *Feasibility Study*;
 - i. Bendungan Merangin, Jambi, dengan nilai investasi Rp7.850.000.000.000 dan status progres dalam tahapan *Final Business Case* Studi Kelayakan yang menggunakan bantuan *Project Facility Development* (PDF) dari Kementerian Keuangan. Namun, bantuan PDF dihentikan oleh Kementerian Keuangan pada April 2025 karena *Availability Payment* (AP) dinilai terlalu besar dan terhambat Undang-undang SDA Pasal 57 di mana Operasi dan Pemeliharaan tidak masuk lingkup KPBU. Progres lainnya untuk Bendungan Merangin bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sudah terbit tahun 2023 untuk kawasan non-hutan seluas 741 Ha, sisanya 111 Ha untuk kawasan hutan produksi masih dalam proses KKPR; dan
 - j. Bendungan Cidanau, Banten, dengan nilai investasi Rp1.720.000.000.000 dan status progres dalam tahapan Penyusunan Studi Kelayakan, status bulan April-September 2024. Bendungan Cidanau ini dihentikan karena dialihkan dari KPBU ke Mekanisme Perizinan Berusaha.



2. Bina Marga, selama tahun 2020-2024 DJPI telah berhasil merealisasikan 7 (tujuh) proyek pada sektor bina marga, yaitu:

- a. Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang, dengan nilai investasi Rp9.405.000.000.000 dengan status progres dalam tahap penyiapan (penyelesaian penyusunan Studi Kelayakan dan perhitungan *financial modelling*), dan telah dilaksanakan Konsultasi Publik.
- b. Jalan Tol Malang-Kepanjen, dengan nilai investasi Rp10.640.000.000.000 dengan status progres dalam tahap penyiapan, dan telah dilaksanakan Konsultasi Publik.
- c. Jalan Tol Pluit-Bandara, dengan nilai investasi Rp12.835.000.000.000 dengan status progres dalam tahap penyiapan. Pemrakarsa telah menyampaikan Dokumen Studi (BD, ROW Plan dan DPPT) kepada Menteri PUPR;
- d. Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, dengan nilai investasi sebesar Rp25.400.000.000.000 dengan status progres dalam tahap pelelangan ulang, dikarenakan perlu revaluasi studi kelayakan karena adanya pergeseran trase yang akan berdampak signifikan terhadap biaya investasi;
- e. Fly Over Sitinjau Lauik, dengan nilai investasi Rp2.793.000.000.000 dengan status progres dalam tahap persiapan penandatanganan PKS;
- f. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi, dengan nilai investasi Rp21.012.000.000.000 dengan status progres dalam tahap transaksi;
- g. Jalan Tol Palembang – Betung, dengan nilai investasi Rp14.981.000.000.000 dengan status progres dalam tahap transaksi.

3. Cipta Karya, Selama tahun 2020-2024 DJPI telah berhasil merealisasikan 6 (enam) proyek pada sektor infrastruktur permukiman, yaitu:

- a. Proyek Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindangheula, dengan nilai investasi sebesar Rp12.835.000.000.000, dengan status progres dalam tahap penyiapan;
- b. Proyek SPAM Bitung, dengan nilai investasi sebesar Rp271.000.000.000, dengan status progres dalam tahap penyiapan;

- 
- c. Proyek SPAM Regional Lombok, dengan nilai investasi sebesar Rp745.000.000.000, dengan status progres dalam tahap penyiapan;
 - d. SPAM – SPAL IKN, dengan nilai investasi sebesar Rp15.920.000.000.000, dengan status progres dalam tahap penyiapan;
 - e. SPAM Regional Ir. H. Juanda/ Jatiluhur II, dengan nilai investasi sebesar Rp12.700.000.000.000, dengan status progres dalam tahap penyiapan; dan
 - f. SPAM Regional Ayung I, dengan nilai investasi sebesar Rp1.515.240.238.000, dengan status progres dalam tahap penyiapan.

Selama periode 2020-2024, kontribusi proyek KPBU terhadap total kebutuhan dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp2.058 Triliun yaitu mencapai 21,40% atau sebesar Rp440,4 Triliun. Sektor sumber daya air berkontribusi sebesar Rp45,09 Triliun, sektor jalan dan jembatan berkontribusi sebesar Rp372,53 Triliun, sektor permukiman berkontribusi sebesar Rp20,32 triliun, dan sektor perumahan berkontribusi sebesar Rp2,46 triliun. Kontribusi tersebut terdiri dari proyek prioritas yang memasuki tahap penyiapan sampai dengan transaksi, dan telah mencapai tahap penandatanganan kerja sama/kontrak KPBU (PKS). Rincian proyek KPBU dalam tahap penyiapan dan transaksi pada masing-masing sektor yaitu 12 proyek sektor sumber daya air, 24 proyek sektor jalan dan jembatan, 5 proyek sektor permukiman, dan 4 proyek sektor perumahan. Selain itu, terdapat 13 proyek sektor jalan dan jembatan serta 2 proyek sektor permukiman yang telah mencapai Tahap Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan total nilai proyek sebesar Rp198,4 triliun.

Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Unit Organisasi yang secara khusus menangani pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum, yaitu DJPI. Amanat untuk penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi DJPI, mengingat besarnya *funding gap* penyediaan infrastruktur yang ada.

Isu strategis lainnya yang dihadapi DJPI yang berpotensi menghambat pelaksanaan skema tersebut, antara lain sebagai berikut:



1. Regulasi dan Kelembagaan

Kompleksnya regulasi dan kebijakan terkait KPBU masih menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan untuk menerapkan skema tersebut. Regulasi mengenai KPBU saat ini masih kurang mengatur penetapan tarif, pengelolaan aset, serta pembagian kewenangan antara pemerintah dan badan usaha. Struktur kelembagaan KPBU belum dapat menggambarkan kewenangan institusi yang terlibat berdasarkan skema Kerja sama yang dijalankan. Selain itu, belum terdapat regulasi yang mampu mentransformasi durasi pelaksanaan KPBU agar lebih tepat efisien, regulasi terkait KPBU dan regulasi yang berlaku terkait penyediaan infrastruktur juga masih kurang harmonis.

Beberapa regulasi yang berlaku saat ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan skema KPBU. Sebagai contoh, regulasi terkait pelaksanaan operasi dan pemeliharaan proyek KPBU sektor sumber daya air masih terkendala oleh Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pasal 57 ayat (8) yang mengatur bahwa skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha swasta atau negara lain dalam pendanaan penyediaan prasarana sumber daya air tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

2. Kapasitas dan Komitmen Pemerintah Daerah

Kapasitas dan komitmen pemerintah secara umum masih tergolong rendah dalam melaksanakan skema KPBU. Kapasitas fiskal pemerintah pusat yang terbatas menyebabkan pelaksanaan proyek penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU lebih tinggi risiko. Pemerintah daerah belum memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan skema KPBU. Kapasitas ini terlihat dari masih terbatasnya kemampuan fiskal daerah serta minimnya sumber daya manusia yang memahami pelaksanaan KPBU. Hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan KPBU. Selain keterbatasan kapasitas, rendahnya komitmen pemerintah daerah juga diakibatkan oleh regulasi KPBU yang sulit diimplementasikan di tingkat daerah, besarnya risiko yang perlu ditanggung PJPB daerah, serta kurangnya



insentif/fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan KPBU di daerah.

3. Keterbatasan Dukungan Pendanaan dan Kelayakan Proyek

Implementasi skema pembiayaan kreatif dan KPBU dalam penyediaan infrastruktur menghadapi sejumlah tantangan pendanaan. Kapasitas pasar untuk proyek KPBU skala besar masih terbatas, hal ini tercermin dari rendahnya partisipasi *bidder* dan dominasi perusahaan dalam negeri di sektor jalan tol. Di sisi lain, *lender* lokal masih memiliki kapasitas pendanaan yang terbatas, dengan proses *due diligence* yang memakan waktu akibat ketidakpastian kelayakan proyek. Selain itu, minat investor asing pada proyek *greenfield* tergolong rendah karena risiko yang tinggi. Kelayakan finansial proyek infrastruktur saat ini cenderung menurun dan permintaan dukungan konstruksi terus meningkat. Keterbatasan alokasi porsi pendanaan pemerintah untuk dukungan konstruksi menambah kompleksitas permasalahan sehingga dibutuhkan alternatif pendanaan lain untuk pelaksanaan proyek KPBU. Lebih lanjut, tata cara evaluasi kemampuan badan usaha dalam pengadaan infrastruktur juga belum dapat menggambarkan kredibilitas dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.

4. Proses Perencanaan Kurang Terintegrasi

Proses perencanaan proyek KPBU sering kali terkendala oleh kurangnya integrasi proses hulu ke hilir dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, yang mengakibatkan perencanaan yang tidak matang. Sebagai contoh pada sektor air minum, pemisahan pekerjaan hulu dan hilir menyebabkan kesulitan pembayaran tagihan air curah. Pada sektor persampahan, kurangnya keterlibatan DPRD dalam perencanaan *tipping fee* dan belum terintegrasinya pengelolaan sampah hulu-hilir menjadi hambatan. Kompleksitas tinggi, ketidakpastian regulasi, dan minimnya proyek percontohan untuk proyek KPBU selain jalan tol menghambat pengembangan model KPBU. Selain itu, ketersediaan lahan dan proses pembebasan lahan yang memakan waktu lama juga menjadi tantangan umum dalam perencanaan proyek KPBU.



5. Kinerja dan Keberlanjutan Proyek

Kinerja dan keberlanjutan proyek pembiayaan kreatif dan KPBU sering kali terhambat oleh tantangan terkait tarif, daya beli masyarakat, dan kepastian pendapatan. Secara umum, proyek KPBU rentan terhadap risiko operasional dan pasar, serta membutuhkan model bisnis yang berkelanjutan. Tantangan utama meliputi ketidakpastian permintaan pasar, fluktuasi biaya operasional, dan perubahan kebijakan pemerintah. Di sektor air minum, tarif yang tinggi dapat menghambat keterjangkauan layanan, sementara kinerja BUMD Air Minum yang kurang baik dan *creditworthiness* yang rendah menjadi masalah utama. Di sektor persampahan, ketidakpastian pembayaran *Availability Payment*, *tipping fee*, dan pembelian *by-product* menjadi krusial. Selain itu, ketidakpastian pendapatan akibat belum terealisasinya bangkitan dari infrastruktur program pemerintah lain juga menjadi kendala, seperti pada kasus Jalan Tol Manado-Bitung yang diharapkan mendukung KEK Pariwisata Bitung dan Likupang, target penyelesaian rencana pembangunan kawasan pariwisata tidak sejalan dengan rencana jalan tol sebagai akses pendukung kawasan tersebut.

6. Kurangnya Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Sektor

Permasalahan teknis dalam proyek KPBU infrastruktur sering kali muncul akibat kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar sektor. Secara umum, tantangan teknis meliputi ketidaksesuaian standar teknis, kompleksitas integrasi sistem, dan risiko kegagalan teknologi. Di sektor air minum, contohnya, penyelenggaraan air baku di hulu dan SPAM di hilir yang berbeda wilayah administrasi menimbulkan ketidaksinkronan pelaksanaan. Isu lain termasuk tingginya angka *Non-Revenue Water* (NRW), tidak optimalnya penyerapan air curah, ketidakmerataan ketersediaan air baku, dan tingginya *idle capacity*. Sementara itu, di sektor air limbah, penggunaan teknologi yang kurang maksimal, seperti mahalnya teknologi pengolahan dan kurangnya pemantauan kualitas efluen, menjadi kendala utama.

7. Proses bisnis yang tumpang tindih dalam pelaksanaan KPBU di DJPI

Permasalahan ini mencerminkan bahwa mekanisme kerja antar unit belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Tumpang tindih tersebut dapat



muncul dalam bentuk duplikasi kewenangan, pengulangan tahapan verifikasi dan evaluasi, maupun perbedaan prosedur antar unit yang berimplikasi pada tidak efisiennya pelaksanaan tugas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan, menurunkan efektivitas koordinasi, serta menciptakan kebingungan bagi para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Selain itu, ketidakjelasan alur bisnis dapat berisiko menghasilkan inkonsistensi dalam proses pengambilan keputusan maupun pengawasan proyek. Dengan demikian, diperlukan upaya penataan ulang dan harmonisasi proses bisnis agar setiap unit kerja memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pelaksanaan KPBU yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan DJPI.

Meskipun dihadapkan pada tantangan penyediaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang sangat besar, DJPI optimis untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat peraturan perundang-undangan. DJPI memiliki aspek strategis/kemampuan dalam menjawab isu strategis yang dihadapi dengan terbukanya peluang untuk melakukan reformasi kebijakan penyelenggaraan KPBU dalam bidang Pekerjaan Umum serta pengembangan skema pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif.

Beberapa potensi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah terkait potensi di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum. Adapun potensi di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Terdapat simpul KPBU yang berperan sebagai pusat koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan proyek infrastruktur berbasis KPBU.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPI) sebagian besar telah memiliki sertifikasi *Public-Private Partnership* (PPP) tingkat internasional .
3. Regulasi yang mendukung tata kelola KPBU.
4. Implementasi KPBU di Indonesia mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian



Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

5. Kolaborasi dengan lembaga internasional dan negara mitra.
6. Pada tahap perencanaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyusun rencana umum proyek KPBU berdasarkan masukan dari unit organisasi teknis, yang berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur berbasis KPBU.
7. Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masif.
8. Digitalisasi dalam pengelolaan proyek KPBU semakin diperkuat guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.
9. Pengembangan berbagai skema kerja sama dalam KPBU agar dapat mengakomodasi karakteristik proyek yang beragam.

Selain potensi-potensi di atas, DJPI telah menyusun Rencana Strategis DJPI TA 2025 – 2029 untuk dalam rangka sinkronisasi dengan Renstra Kementerian PU TA 2025 – 2029, Rencana Umum Proyek KPBU dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan dalam pengembangan dan penyusunan prioritas jalan tol nasional dengan menyeimbangkan pembangunan antar wilayah dan kawasan di Indonesia, penyusunan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi bisnis proses pelaksanaan KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum, serta pembagian wewenang yang lebih jelas, efektif, dan efisien dalam rangka percepatan pelaksanaan KPBU dan sebagai upaya pemenuhan *funding gap* penyediaan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum melalui sumber pendanaan non-APBN. Selain itu, DJPI akan melakukan reformasi sektor KPBU bidang Pekerjaan Umum yaitu:

Sektor Sumber Daya Air melalui KPBU yang mendukung Energi Baru Terbarukan, *Global Water and Resilience Fund*, *Endowment Fund*, dan *Hybrid Annuity Model*.

Sektor Jalan dan Jembatan melalui implementasi *Land Value Capture*, *Estafet Financing*, *Hybrid Annuity Model*, *Minimum Revenue Guarantee*, dan *VGFinancing*.



Sektor Permukiman melalui implementasi *Source-to-tap*, *New Business Model*, adanya standardisasi tarif air minum, dan pengembangan konsep *Global Water Fund*.

1.6 Sistematika Laporan

Laporan kinerja ini disusun secara sistematis dan terstruktur yang mengacu pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR, dan memperhatikan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Buku Panduan Penulisan Laporan Kinerja Kementerian PU sebagaimana telah diedarkan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pada laporan kinerja DJPI tahun 2025 diuraikan penjelasan dari masing-masing Bab dan Subbab. Sistematika laporan kinerja DJPI tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, isu strategi, dan sistematika laporan.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan, sasaran dalam Renstra dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra DJPI 2025 - 2029, PK DJPI 2025, metode pengukuran, dan target kinerja tahun pelaporan dalam pemenuhan target Renstra

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran DJPI 2025, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja unit organisasi, analisis perbandingan kinerja unit organisasi, analisis realisasi anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya.



4. BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

5. Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, antara lain meliputi Perjanjian Kinerja, Bukti Dukung Capaian Kinerja, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, dan Dokumentasi Kegiatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

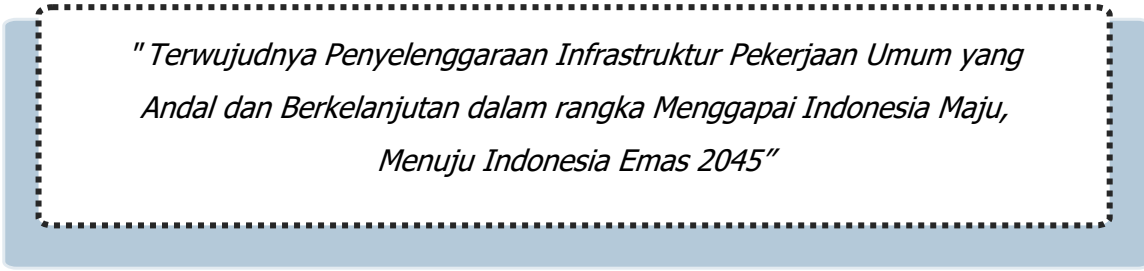
Rencana strategis (Renstra) DJPI tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk periode lima tahun ke depan. Pada tahun 2025, telah ditetapkan Renstra DJPI tahun 2025 – 2029. Renstra ini berisikan tujuan, sasaran program, arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan yang disinergikan dengan tugas dan fungsi DJPI dalam mendukung



pembangunan infrastruktur serta pencapaian sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum yang selaras dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR 2025 - 2029 adalah sebagai berikut.



"Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Gambar 2. 1 Visi Kementerian PU

Visi ini menjadi panduan utama dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program Kementerian PU selama periode 2025-2029, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian PU tahun 2025 - 2029, maka Kementerian PU menetapkan Misi Kementerian yang merupakan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Renstra Kementerian PU tahun 2025 - 2029. Adapun misi Kementerian PU tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
3. Meningkatkan akses infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;

- 
5. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
 6. Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
 7. Meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan beberapa tujuan Kementerian dalam 2025-2029 yang terdiri dari:

1. Meningkatkan ketahanan air nasional;
2. Memperkuat kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
3. Memperkuat akses infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas;
5. Meningkatkan pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
6. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya; dan
7. Memperkuat peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

2.1.2.1 Arahan Nasional untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum

Sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN 2025-2029, Pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu indikator berpengaruh dalam penguatan fondasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejumlah pencapaian yang telah diraih seperti pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan transportasi guna memperlancar arus barang dan orang antarwilayah serta peningkatan akses terhadap air bersih, listrik, dan layanan sanitasi, harus selalu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi. Di samping itu, beberapa aspek yang masih perlu diperkuat bersama para *stakeholders* juga masih menjadi tantangan



di tingkat nasional, seperti pemanfaatan, pemeliharaan, dan keberlanjutan infrastruktur yang sudah dibangun serta pemerataan akses infrastruktur di wilayah terpencil dan perbatasan. Hal ini menjadi petunjuk bahwa fokus akan keberlanjutan peningkatan kualitas infrastruktur dan perluasan aksesibilitas perlu didorong bersama guna pemanfaatan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok negeri.

Pembangunan Infrastruktur yang unggul dan persisten harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup, dan keseimbangan antara keduanya melalui ketersediaan sumber daya alam. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah batasan kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya, seperti limbah.

Pertimbangan dalam pengembangan infrastruktur berlandaskan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut juga perlu dihadapkan dengan kapasitas ruang fiskal, di mana terintegrasinya sistem pendanaan atau pembiayaan terpadu dapat menjadi solusi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan.

Dokumen RPJMN 2025-2029 menjelaskan sejumlah batasan yang perlu menjadi acuan dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum yang adil dan ekstensif, seperti lokasi kawasan lindung baik di darat dan perairan, tutupan hutan primer, habitat flora & fauna, perubahan iklim serta potensi kebencanaan. Batasan ini erat hubungannya dengan proses perencanaan infrastruktur Pekerjaan Umum yang harus memperhatikan kesesuaian dan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, di mana perencanaan yang tepat akan berdampak pada pemanfaatan ruang fiskal negara secara optimal, hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju. Kebutuhan pendanaan akan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum menuntut tingginya akurasi perencanaan dan pemrograman infrastruktur demi terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum yang andal, operatif, paripurna dan membawa kebermanfaatan secara langsung dan luas bagi masyarakat.

2.1.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah



Sesuai amanat UU SPPN No. 25 Tahun 2024, Renstra PU 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMN 2025-2029 bidang ke-PU-an mengadopsi *highlight* intervensi kewilayahan yang diarahkan dalam RPJMN sebagai indikasi intervensi kewilayahan pembangunan jangka menengah Kementerian PU. *Highlight* intervensi kewilayahan dalam RPJMN tersebut telah dijabarkan secara operasional untuk setiap kawasan prioritas di seluruh provinsi di Indonesia. Kawasan prioritas dalam Renstra PU 2025-2029 juga mengacu pada kawasan yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 sesuai dengan tema pengembangan yang meliputi kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air, dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi/rawan bencana.

Selanjutnya, dilakukan identifikasi dari kawasan tersebut yang memiliki terkait lingkup penanganan intervensi terkait pekerjaan umum untuk dicantumkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029.

Berikut hasil identifikasi untuk kawasan/lokasi prioritas di wilayah Indonesia yang selanjutnya diidentifikasi arahan pengembangan kewilayahannya dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Wilayah Sumatera

Sumatera diarahkan untuk menjadi “Mata Rantai Utama Bio industri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan” dalam RPJMN 2024-2029. Tema pengembangan sejalan dengan potensi wilayah Sumatera yang sektor perekonomiannya bertumpu pada komoditas primer. Hal ini didukung dengan posisi geografis Sumatera yang berada di jalur utama global *maritime trade route* Selat Malaka yang dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan perdagangan dan mobilisasi logistik nasional dan internasional.

Kontribusi tinggi dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perkembangan wilayah Sumatera belum dioptimalkan karena diversifikasi industri yang tidak maksimal. Tidak meratanya infrastruktur dasar dan pendukung industri menjadi



penghambat pertumbuhan ekonomi wilayah. Perlunya peningkatan konektivitas antardaerah dan antarpulau untuk mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan memperkuat rantai industri di Sumatera. Pengolahan komoditas primer yang belum optimal dan eksploitatif, menyebabkan kerusakan lingkungan berupa kebakaran hutan, abrasi dan penurunan luas lahan pertanian pangan. Dengan arahan untuk mewujudkan ekosistem bio industri Sumatera diharapkan menjadi pendekatan pengembangan yang tepat dalam mewujudkan perekonomian wilayah berbasis sumber daya alam lokal yang berkelanjutan.

2. Wilayah Jawa

Wilayah Jawa dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk menjadi “Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”. Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan Pulau Jawa namun tingkat pelayanan kawasan perkotaan dan metropolitan di Jawa masih inefisien ditinjau dari rendahnya capaian *Metropolitan Performance Index* (MPI) Pulau Jawa. Meskipun dengan kuantitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur fisik dan sosial yang tersedia masih belum terintegrasi dan merata sehingga menghambat hilirisasi dan diversifikasi ekonomi yang berdampak pada ketimpangan kesejahteraan antarwilayah yang tinggi.

Indikasi kesenjangan dapat dilihat salah satunya dari tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih rendah. Kesenjangan ini perlu diatasi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang memadai serta penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi layak. Tingginya konsentrasi penduduk dan intensitas pembangunan di wilayah Jawa, yang berlokasi di jalur cincin api (ring of fire) dan zona pertemuan dua lempang tektonik, menjadikannya sebagai kawasan dengan kerentanan tinggi mengingat tingginya resiko bencana gempa dan tsunami. Di samping itu, alih fungsi lahan yang masif mengakibatkan tingginya resiko penurunan air muka tanah dan banjir, utamanya di area perkotaan.

3. Wilayah Bali Nusa Tenggara



Wilayah Bali–Nusa Tenggara diarahkan untuk menjadi “Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional” dalam RPJMN 2025–2029. Bali–Nusa Tenggara merupakan wilayah dengan destinasi dan atraksi pariwisata yang beragam meliputi daya tarik alam, kebudayaan tradisi lokal, dan ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulannya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dalam konstelasi pariwisata Bali–Lombok–Labuan Bajo, tarikan aktivitas pariwisata Bali sangat tinggi sehingga mengalami tourism spillover yang dapat dimanfaatkan oleh NTB dan NTT.

Bali merupakan salah satu daerah dengan indeks quality tourism tertinggi di tingkat nasional sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki capaian indeks quality tourism yang rendah sehingga hal ini menjadi indikasi belum optimalnya sektor kepariwisataan Bali Nusa–Tenggara baik dari segi infrastruktur maupun kualitas pelayanan wisata. Sektor pariwisata berpotensi untuk memperluas diversifikasi ekonomi wilayah akan tetapi diversifikasi ekonomi wilayah Nusa Tenggara masih belum optimal. Tidak meratanya dukungan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi menghambat konektivitas antarwilayah dan antarpulau berdampak pada kesenjangan intensitas kegiatan ekonomi di kabupaten/kota tertentu dan sulitnya akses terhadap destinasi pariwisata. Selain itu, rendahnya akses air minum dan sanitasi layak juga menjadi persoalan kebutuhan dasar yang perlu ditangani agar dapat memenuhi demand masyarakat setempat serta wisatawan.

4. Wilayah Kalimantan

Wilayah Kalimantan diarahkan untuk menjadi “Superhub Ekonomi Nusantara” dalam RPJMN 2025–2029 yang diharapkan mendukung pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara. Wilayah Kalimantan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensial untuk kegiatan hilirisasi (peningkatan nilai tambah) serta penciptaan sektor-sektor ekonomi baru yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi wilayah Kalimantan relatif lebih aman untuk dibangun dan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan karena risiko bencana yang rendah dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Namun belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas berdampak pada kurang berkembangnya



pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, keterbatasan air, pangan, dan energi mengakibatkan perekonomian daerah masih tergantung pada sektor hulu, lambatnya proses hilirisasi serta diversifikasi industri pengolahan. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar di wilayah Kalimantan akan berpengaruh pada daya tampung wilayah dalam menghadapi peningkatan aktivitas industri maupun kebutuhan dasar masyarakat setempat.

5. Wilayah Sulawesi

Wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi “Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA” dalam RPJMN 2025-2029. Posisi geografis yang strategis, menjadikan Sulawesi berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN); hub dan pintu gerbang internasional KTI (Kawasan Indonesia Timur); serta Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik yang mendukung pergerakan barang dan logistik, serta jalur perdagangan dan investasi. Sulawesi mempunyai komoditas unggulan yang beragam mulai sumber daya alam (komoditas pertanian, perkebunan, perikanan tangkap), sumber daya mineral (nikel dan tembaga), pariwisata, energi, serta cadangan minyak bumi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun, kurang memadainya SPM di kawasan perkotaan, belum meratanya konektivitas serta sarana dan prasarana antar daerah mengakibatkan belum optimalnya kegiatan penyangga ekonomi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan afirmasi, sehingga ketimpangan wilayah masih terjadi di Sulawesi. Selain itu, risiko bencana hidrometeorologi dan geologi yang cukup tinggi berpotensi mempengaruhi kinerja pembangunan/pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Sulawesi.

6. Wilayah Maluku

Wilayah Maluku diarahkan menjadi “Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia” dalam RPJMN 2025-2029, untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah yang berupa lautan sebesar >80%. Kondisi geografis ini, menjadikan Provinsi Maluku sebagai produsen tuna-cakalang-tongkol terbesar kedua di Indonesia. Komoditas unggulan pertanian lainnya yaitu pala (tertinggi ke-2) dan kelapa (tertinggi ke-4) di Indonesia, Selain itu terdapat potensi diversifikasi pangan mulai dari padi, sagu, kedelai, maupun ubi. Ekosistem Bahari, kekayaan sejarah dan budaya yang ada di



dimanfaatkan untuk pengembangan destinasi pariwisata, potensi pertambangan nikel dan gas bumi serta energi terbarukan menjadikan potensi Wilayah Maluku menjadi beragam.

Potensi wilayah yang melimpah dan bervariasi, ternyata belum mampu dioptimalkan, hal ini ditunjukkan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai TPT Provinsi Maluku lebih tinggi dibandingkan nasional. Kondisi ini terjadi karena masih terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada kabupaten/kota tertentu dikarenakan belum meratanya infrastruktur, konektivitas intra dan antar pulau. IPM di wilayah Maluku lebih rendah dari nilai nasional dikarenakan masih rendahnya akses air minum layak dan sanitasi layak. Nilai indeks risiko bencana yang berkategori tinggi di Wilayah Maluku dan banyaknya kawasan konservasi di kawasan pertumbuhan sehingga perlu disesuaikan dalam proses perencanaan dan penataan kawasannya.

7. Wilayah Papua

Wilayah Papua diarahkan untuk “Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif” dalam RPJMN 2025-2029 dikarenakan sebagian besar nilai IPM berkategori sedang serta persentase penduduk miskin (PPM) dan ketertinggalan daerah yang masih tinggi. Kondisi tersebut tidak berkesesuaian dengan potensi wilayah Papua yang melimpah dan beragam mulai dari komoditas perikanan tangkap, komoditas perkebunan, komoditas pertanian, potensi pariwisata (ekosistem bahari), potensi pertambangan minyak dan gas bumi serta energi terbarukan. Kondisi ini terjadi karena pengembangan komoditas unggulan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi belum dilakukan secara optimal, salah satu penyebabnya yaitu belum meratanya pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga ketimpangan/disparitas antar wilayah dan antar golongan masih tinggi di wilayah Papua.

Selain itu, tantangan yang harus dihadapi dalam mengoptimalkan pembangunan/pengembangan kawasan pertumbuhan yaitu indeks risiko bencana berkategori tinggi (banjir, longsor, tsunami, dan gempa bumi) serta banyaknya kawasan konservasi yang berada di kawasan pertumbuhan yang perlu diakomodir dalam proses perencanaan dan penataan kawasannya.



2.1.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam mewujudkan pembangunan/pengembangan infrastruktur yang terarah dan tepat sasaran untuk mencapai pembangunan nasional, Kementerian PU telah menetapkan 4 (empat) prinsip dalam pelaksanaan sasaran dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum periode 2025–2029. Prinsip tersebut terdiri dari: prinsip ketahanan; prinsip keberlanjutan; prinsip kesetaraan; dan prinsip infrastruktur cerdas. Secara kolektif, prinsip-prinsip ini menjadi landasan yang terstruktur untuk menentukan kebijakan yang efektif dan koheren. Keempat prinsip tersebut akan dijelaskan secara lebih menyeluruh sebagai berikut:

1. Prinsip Ketahanan

Prinsip pertama, ketahanan, menekankan kapabilitas infrastruktur pekerjaan umum untuk bertahan dan beradaptasi dengan berbagai tantangan seperti bencana alam, gangguan teknologi, hingga faktor manusia. Ketahanan sangat penting agar infrastruktur dapat terus berfungsi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Infrastruktur yang berketahanan dapat menjamin bahwa kegiatan ekonomi dapat terus berlanjut, menekan biaya pemulihan pasca bencana, dan meningkatkan daya tarik investasi. Sebaliknya, infrastruktur yang kurang tangguh atau berketahanan dapat memicu dampak negatif yang berpotensi menurunkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menggarisbawahi prinsip ketahanan dalam pengarusutamaan pembangunan berketahanan iklim. Pembangunan berketahanan iklim ini disebutkan sebagai kombinasi dari adaptasi, manajemen risiko bencana, dan inisiatif peningkatan ketahanan. Tujuannya agar dapat memperkuat sistem pembangunan dalam menghadapi pengaruh negatif bahaya iklim pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum merumuskan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 dengan menerapkan pembangunan berketahanan iklim ke dalam penyediaan infrastruktur yang juga diselaraskan dengan prinsip ketahanan. Beberapa wujud konkret dari prinsip tersebut adalah: 1) pembangunan bendungan dan kolam retensi sebagai pengendali banjir; 2) pembangunan sabo dam untuk



mengendalikan aliran lahar dan sedimen 3) pembangunan permukiman tahan bencana; 4) pembangunan infrastruktur transportasi dengan fungsi ganda sebagai struktur mitigasi bencana; 5) memonitor ancaman bencana banjir dan kekeringan untuk diinformasikan kepada masyarakat setempat.

2. Prinsip Keberlanjutan

Di sisi lain, suatu proyek infrastruktur harus mampu digunakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan berfokus pada pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang memperhitungkan sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial sesuai tiga pilar keberlanjutan. Tujuan dari infrastruktur yang berkelanjutan adalah untuk memenuhi tuntutan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam pengembangan/pembangunan infrastruktur konvensional dapat berdampak pada kerusakan dan fragmentasi ekosistem serta penggunaan sumber daya secara berlebihan.

Pembangunan/pengembangan infrastruktur mempengaruhi semua tujuan dari lima dari tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 3, 6, 7, 9, dan 11). Prinsip keberlanjutan ditegaskan dalam RPJMN 2025–2029 melalui pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diinisiasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengarusutamaan SDGs ini diimplementasikan melalui berbagai strategi yang tercantum di berbagai dokumen perencanaan, salah satunya yaitu dalam Rencana Strategis.

Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum periode 2025–2029, pengarusutamaan SDGs diadopsi dalam bentuk prinsip keberlanjutan. Contoh nyata perwujudan prinsip keberlanjutan ini di antaranya: 1) pembangunan dan standarisasi bangunan gedung hijau (*green building*); 2) pemanfaatan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di bendungan dan waduk; 3) pembangunan permukiman ramah lingkungan; 4) pengelolaan sampah berbasis *waste to energy*; serta 5) optimalisasi penggunaan air melalui *greywater reuse*.

3. Prinsip Kesetaraan



Prinsip kesetaraan berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan gender, disabilitas, dan inklusi sosial ke dalam pengembangan infrastruktur pekerjaan umum sehingga terciptanya akses dan penggunaan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menekankan pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dalam proses pembangunan yaitu pembangunan manusia bertumpu pada akses infrastruktur yang setara terhadap seluruh kelompok masyarakat, di mana keadilan spasial diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang responsif gender.

Dalam proses penyusunan Renstra untuk periode 2025–2029, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengintegrasikan PUG dalam penyelenggaraan infrastruktur – mulai dari pemrograman, perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan – melalui prinsip kesetaraan. Renstra ini menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur yang memenuhi prinsip "*Infrastructure for All*", yaitu universal, inklusif, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Selain itu, Renstra ini juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) lewat kebijakan dan program yang responsif gender.

Strategi yang diadopsi meliputi peningkatan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan infrastruktur, penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung PUG, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan dan pembangunan yang responsif gender. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG juga menjadi fokus utama untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas program. Dengan kata lain, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan internal yang lebih eksplisit dalam mengakomodasi PUG pada penyelenggaraan infrastruktur, baik dalam penyusunan standar, pedoman teknis, maupun dalam praktik penganggaran responsif gender



Rangkaian implementasi infrastruktur yang inklusif tertuang dalam program-program PU di antaranya: 1) Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; 2) Pembangunan fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas; 3) Program GESIT-KIAT (*Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure* - Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur) 2022 2025; 4) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU); 5) Program Prasarana Strategis dan 6) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

4. Prinsip Infrastruktur Cerdas

Infrastruktur cerdas mengacu pada komponen saling terkait yang menggunakan teknologi untuk memperoleh data, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan performa kota cerdas secara keseluruhan. Penggunaan infrastruktur cerdas digital memungkinkan untuk memperkuat pemahaman dan pengawasan operasional, serta optimalisasi sumber daya yang terbatas di dalam suatu daerah. Prinsip infrastruktur cerdas menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi untuk menyediakan data secara real-time dan berkelanjutan dari infrastruktur pekerjaan umum. Tujuan diberlakukannya prinsip ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan mengenai kebijakan infrastruktur dan operasi ke depan.

Dalam RPJMN 2025–2029, infrastruktur cerdas termasuk dalam pengarusutamaan transformasi digital, di mana disebutkan upaya-upaya seperti: 1) perluasan akses dan peningkatan layanan digital dan telekomunikasi; 2) mendorong pembangunan serta memperkuat pusat data dan ekosistem terkait; 3) menegakkan kedaulatan digital lewat peningkatan keamanan dan perlindungan data pribadi serta menciptakan lingkungan digital yang kondusif; 4) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan 5) membangun tata kelola yang dapat mendorong pertumbuhan ekosistem digital yang bermanfaat bagi pemerintah, industri, dan masyarakat.

Beberapa bagian dari pengarusutamaan transformasi digital yang berkaitan dengan sektor infrastruktur diadopsi ke dalam prinsip infrastruktur cerdas yang digunakan pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum periode 2025–2029. Strategi aplikasi prinsip infrastruktur cerdas tersebut dapat dilihat dalam: 1) pengembangan



SIH3 (sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi); 2) pengembangan sistem informasi sumber daya air; 3) pengembangan hunian cerdas (*smart living*); serta 4) penggunaan *Building Information Modeling* (BIM), yaitu gambaran digital dari suatu objek terbangun (bangunan, jembatan, jalan) yang dimanfaatkan untuk mendukung proses desain, konstruksi, dan operasi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Keempat prinsip yang telah dijabarkan di atas memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Melalui arah kebijakan dan strategi utama yang telah disusun, diharapkan tujuan pembangunan infrastruktur dapat tercapai dengan optimal.

2.1.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur

Arah kebijakan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung pembangunan nasional tercermin melalui prioritas pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang berbasis inovasi dan kolaborasi strategis. Keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi pemerintah dalam konteks pembangunan berkelanjutan menuntut solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan, adaptasi perubahan iklim, serta pencapaian target *net-zero emission* yang memerlukan dukungan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan.

Kompleksitas tantangan pembangunan infrastruktur membutuhkan kolaborasi sinergis antara sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang andal dan inklusif. Untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan APBN dalam mendukung pembangunan nasional, diperlukan kerangka kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum diarahkan pada:

1. Pengembangan dan perluasan sumber pendanaan serta pembiayaan infrastruktur, baik konvensional maupun syariah;
2. Optimalisasi pemanfaatan instrumen pendanaan dan pembiayaan jangka panjang untuk penyediaan layanan infrastruktur;
3. Mengembangkan serta memaksimalkan model kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;

- 
4. Mengembangkan model bauran pembiayaan (blended finance) yang optimal untuk penyediaan layanan infrastruktur;
 5. Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development dalam mendorong percepatan ketersediaan layanan infrastruktur; dan
 6. Penguatan tata kelola dan kemitraan strategis dalam penyediaan layanan infrastruktur.

Dukungan pembiayaan melalui investasi swasta dan penugasan kepada BUMN dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur maupun proyek prioritas pemerintah lainnya. Pendanaan ini disalurkan melalui berbagai skema, seperti investasi langsung, KPBU, akuisisi, skema spending to invest, dan/atau penugasan pemerintah. Investasi BUMN dalam infrastruktur sosial dan ekonomi juga perlu diselaraskan dengan arah dan prioritas pembangunan nasional. Sementara itu, pendanaan dari masyarakat diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan dasar dan infrastruktur sosial, serta dikembangkan lebih lanjut guna membiayai infrastruktur ekonomi melalui integrasi dengan berbagai sumber pendanaan lainnya.

Strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kapasitas pendanaan maupun pembiayaan di sektor infrastruktur pekerjaan umum meliputi:

1. Pengembangan dan perluasan sumber pendanaan serta pembiayaan, baik konvensional maupun syariah, melalui strategi antara lain: (i) pengembangan dan pemanfaatan instrumen pendanaan dan pembiayaan syariah seperti wakaf produktif dan infaq linked sukuk untuk infrastruktur, (ii) optimalisasi nilai finansial dan ekonomi aset infrastruktur seperti Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) melalui model pengelolaan dana abadi (endowment fund);
2. Optimalisasi pemanfaatan instrumen pendanaan dan pembiayaan jangka panjang untuk penyediaan layanan infrastruktur, melalui pemanfaatan surat berharga atau sukuk negara untuk membiayai proyek infrastruktur;
3. Mengembangkan serta memaksimalkan model kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat, melalui strategi, antara lain: (i) pengembangan mekanisme pengadaan layanan infrastruktur (delivery



mechanism), di antaranya seperti Kontrak Berbasis Kinerja (KBK), Kerja Sama Pemanfaatan Aset (KSP), Sewa/Leasing, dan lainnya, (ii) pengembangan model non-farebox revenue dan model tarif kreatif lainnya.

4. Mengembangkan model bauran pembiayaan (blended finance) yang optimal untuk penyediaan layanan infrastruktur, melalui strategi antara lain: (i) meningkatkan kapasitas dukungan konstruksi guna meningkatkan kelayakan proyek KPBU, dan (ii) memobilisasi sumber pendanaan dan pembiayaan, seperti hibah, project finance loan, untuk mendukung percepatan ketersediaan layanan infrastruktur;
5. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development dalam mendorong percepatan ketersediaan layanan infrastruktur, melalui strategi antara lain: (i) implementasi model bisnis BUMN yang terintegrasi dengan Rantai Nilai (Value Chain) infrastruktur, dan (ii) penetrasi pasar infrastruktur baru melalui model bisnis inovatif BUMN ; dan
6. Penguatan tata kelola dan kemitraan strategis infrastruktur, melalui strategi antara lain: (i) transformasi dan perbaikan sistem penyelenggaraan investasi infrastruktur, dan (ii) pengembangan atau penguatan kelembagaan pendukung pembiayaan infrastruktur.

Selanjutnya, strategi tersebut perlu didukung dengan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan, termasuk isu yang masih perlu dituntaskan di antaranya terkait perbaikan regulasi. Selain itu, masih terdapat kurang jelasnya peran dan tanggung jawab antar lembaga pemerintahan mengakibatkan kesenjangan dalam implementasi audit dan alokasi sumber daya.

2.1.2.5 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 2025-2029

Berdasarkan kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 dan isu strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, maka ditetapkan Kebijakan Umum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada tahun 2025 – 2029, yaitu:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum. Fokus pada penyusunan kerangka regulasi yang mendukung percepatan



dan inovasi pembiayaan, termasuk revisi dan harmonisasi peraturan untuk mempermudah implementasi KPBU dan skema pembiayaan kreatif lainnya.

2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum terhadap pusat - pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan kawasan prioritas (dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah/RPIW). Menyelaraskan pembiayaan infrastruktur dengan kebijakan pengembangan wilayah untuk memaksimalkan dampak ekonomi dan sosial, serta mendukung sinergi antar sektor dalam pengembangan kawasan strategis.
3. Peningkatan partisipasi sektor swasta maupun investor asing mengingat keterbatasan kapasitas pendanaan domestik dalam pembiayaan infrastruktur.
4. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum. Memperkuat kapasitas dan fungsi Simpul KPBU sebagai pusat koordinasi dan fasilitasi proyek-proyek infrastruktur, termasuk peningkatan kompetensi SDM dan digitalisasi proses kerja.
5. Percepatan proses pelaksanaan KPBU, peningkatan kepastian investasi untuk para investor dan pengintegrasian prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam proyek-proyek KPBU. Mereformasi proses KPBU untuk menjadi lebih efisien, transparan, dan menarik bagi investor, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.
6. Optimalisasi pemanfaatan berbagai skema pembiayaan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.
7. Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel. Diversifikasi instrumen pembiayaan infrastruktur, termasuk penggunaan sukuk, wakaf produktif, obligasi infrastruktur, instrumen pembiayaan hijau (*green bond*), pemanfaatan dana filantropis, seperti dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), skema *crowdfunding*, pembentukan dan pemanfaatan dana abadi (*endowment fund*), *Project Finance Loan*, pemanfaatan keuntungan lainnya (salah satu contohnya seperti model *non-farebox revenue*). Pemanfaatan *dana Sovereign Wealth Fund* (SWF), seperti INA atau Danantara. serta pengembangan model *blended finance* dan penerapan teknologi finansial (fintech) dalam pembiayaan infrastruktur. Selain itu, skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



dalam penyediaan infrastruktur dapat dieksplorasi lebih dalam guna penyediaan pembiayaan pembangunan infrastruktur non-APBN.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka disusunlah Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk:

1. Penyusunan Norma, Standar, Peraturan Dan Kriteria (NSPK) KPBU dan pembiayaan kreatif Lainnya, dan pengembangan pedoman teknis yang komprehensif untuk memastikan implementasi pembiayaan infrastruktur yang selaras dan terstandarisasi;
2. Perbaikan tata kelola pelaksanaan KPBU dan pembiayaan kreatif lainnya, implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan KPBU;
3. Revitalisasi simpul KPBU Kementerian PU dengan penguatan kelembagaan dan kapasitas Simpul KPBU sebagai pusat koordinasi dan fasilitasi proyek KPBU di lingkungan Kementerian PU;
4. Penguatan komunikasi publik Simpul KPBU melalui transparansi informasi proyek, peningkatan literasi pembiayaan infrastruktur bagi pemangku kepentingan, optimalisasi kanal digital sebagai sarana interaksi dua arah, serta pengelolaan citra dan manajemen isu untuk memperkuat peran Simpul KPBU;
5. Penyusunan standar dokumen pengadaan KPBU;
6. Penyusunan standar dokumen kontrak perjanjian kerja sama KPBU dan sistem pembiayaan lainnya yang mendukung peningkatan kemampuan penyelesaian perselisihan sengketa KPBU di dalam maupun luar pengadilan, serta peningkatan standardisasi fasilitas pendampingan penyiapan KPBU daerah;
7. Penyusunan rencana umum KPBU dan Pembiayaan Kreatif Lainnya Tahun 2026-2036;
8. Penyusunan *pipeline* proyek potensial KPBU dan Pembiayaan Kreatif Lainnya dengan mengimplementasikan kepastian waktu proses pelaksanaan, termasuk identifikasi dan prioritas proyek-proyek infrastruktur yang layak untuk dikerjasamakan, beserta strategi percepatan implementasinya;
9. Penyusunan konsep sumber pendanaan lain untuk penyiapan dan pendampingan transaksi proyek KPBU dan Pembiayaan Kreatif Lainnya dan eksplorasi dan



pengembangan mekanisme pendanaan inovatif untuk mendukung tahap persiapan dan transaksi proyek KPBU;

10. Penguatan tata kelola kelembagaan DJPI yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola internal DJPI untuk mendukung implementasi program-program strategis serta melakukan identifikasi secara komprehensif terkait dengan pembagian peran dalam rangka penguatan tata kelola;
11. Penyusunan digitalisasi dan *dashboard* KPBU dan Pembiayaan Kreatif Lainnya yang handal dan berkualitas dan pengembangan sistem informasi terpadu untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan perkembangan proyek KPBU secara *real-time*;
12. Pembinaan dan penguatan kapasitas SDM DJPI melalui berbagai program pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan, terstruktur dan berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas SDM terhadap pemahaman regulasi dan perjanjian kerja sama KPBU;
13. Pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (JF API) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
14. Penyusunan rencana kerja tahunan persiapan dan transaksi proyek KPBU dan Pembiayaan Kreatif Lainnya yang rinci untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan terukur.

Selain Arah Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada tahun 2025 – 2029, telah dilakukan identifikasi kebijakan-kebijakan sektoral, sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Sektor Sumber Daya Air
 - a. Perkuatan regulasi dan kerangka kelembagaan KPBU SDA untuk meningkatkan minat investor dan memperluas lingkup kerja sama;
 - b. Percepatan persiapan dan transaksi proyek KPBU SDA untuk menutup kesenjangan pendanaan infrastruktur SDA;
 - c. Peningkatan kepastian penyerapan listrik pada proyek KPBU Pembangkit Listrik melalui sinergi lintas instansi;

- 
- d. Percepatan Proyek KPBU Ketenagalistrikan yang memanfaatkan bendungan melalui penyederhanaan proses pengadaan; dan
 - e. Optimalisasi pemenuhan pembayaran *Availability Payment* (AP) proyek KPBU SDA melalui skema pembiayaan kreatif.

2. Arah Kebijakan Sektor Bina Marga

- a. Pemutakhiran kembali tata cara proses penyiapan proyek KPBU atas usulan badan usaha di mana saat ini belum adanya kepastian durasi waktu, baik dalam penyiapan dan tahap transaksi, termasuk tidak adanya batasan waktu setelah Badan Usaha Pelaksana menerima persetujuan prakarsa sampai proses transaksi;
- b. Peningkatan partisipasi sektor swasta maupun investor asing mengingat keterbatasan kapasitas pendanaan domestik dalam pembiayaan infrastruktur; dan
- c. Percepatan pembangunan infrastruktur Sektor Bina Marga melalui skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyediaan infrastruktur.

3. Arah Kebijakan Sektor Cipta Karya

- a. Penguatan tata kelola melalui reformasi kelembagaan, regulasi, dan tarif, perluasan serta transformasi pembiayaan inovatif untuk mendukung pencapaian target RPJMN, penyiapan studi dan transaksi proyek serta prioritas fasilitas KPBU bagi PJPk daerah;
- b. Penguatan perencanaan dan pelaksanaan KPBU yang terpadu dari hulu ke hilir dengan melibatkan multi-stakeholder;
- c. Pengembangan infrastruktur air minum, sanitasi, dan persampahan yang berkelanjutan, berketahanan bencana dan iklim, serta sesuai karakteristik wilayah; dan
- d. Penerapan transformasi digital, penguatan data dan informasi, serta peningkatan pengawasan pelaksanaan KPBU sektor cipta karya.

Untuk melaksanakan kebijakan sektoral ini, maka disusunlah Strategi sektoral yang diarahkan untuk:

1. Strategi Sektor Sumber Daya Air

- 
- a. Penyelarasan regulasi terkait pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan infrastruktur SDA melalui skema KPBU;
 - b. Penetapan daftar prioritas proyek KPBU SDA 2025-2029 dengan mempertimbangkan kesiapan teknis (Readiness Criteria) dan Nilai Manfaat Ekonomi dan Pemanfaatan dukungan pemerintahan, penjaminan, dan skema blended finance;
 - c. Koordinasi intensif dengan stakeholders terkait (Kementerian ESDM dan PT PLN) untuk kepastian kuota penyerapan listrik Proyek KPBU PLTA/PLTS Terapung melalui pemanfaatan bendungan; dan
 - d. Pembentukan Tim Teknis dan/atau Panitia Pengadaan Gabungan yang melibatkan Kementerian PU, Kementerian ESDM, dan PT. PLN untuk menggabungkan proses tender dan menyepakati asumsi tarif listrik bersama sejak tahap penyiapan proyek.
2. Strategi Sektor Bina Marga
- a. Simplifikasi dan digitalisasi proses penyiapan proyek dengan mengadopsi standar internasional yang lebih efisien, memperkuat koordinasi antar instansi yang terlibat agar prosedur berjalan paralel, serta memperpendek waktu evaluasi tanpa mengurangi kualitas kajian. Di samping itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif untuk mengakomodasi usulan badan usaha, termasuk penerapan mekanisme *fast track* bagi proyek prioritas strategis nasional;
 - b. Memperluas promosi dan *market sounding* proyek KPBU secara internasional untuk meningkatkan daya tarik investor asing, memberikan insentif fiskal maupun nonfiskal yang kompetitif, serta memperkuat kepastian hukum dan regulasi yang kondusif bagi keterlibatan swasta. Selain itu, dilakukan harmonisasi kebijakan lintas sektor agar risiko investasi dapat diminimalisasi, serta penguatan peran lembaga penjaminan dalam memberikan jaminan bagi proyek strategis yang bernilai tinggi; dan
 - c. Menetapkan skema penugasan yang jelas dan terukur bagi BUMN dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan, memperkuat sinergi antara BUMN dan swasta dalam bentuk kerja sama operasi atau *joint venture*, serta meningkatkan akses BUMN terhadap sumber



pendanaan jangka panjang. Selain itu, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan penugasan perlu diperketat agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target waktu, kualitas, dan biaya yang telah ditetapkan.

3. Strategi Sektor Cipta Karya

- a. Penyusunan pedoman bersama yang mengatur peran dan tanggung jawab masing - masing *stakeholder*, sekaligus memastikan sinkronisasi dengan rencana pembangunan nasional maupun daerah;
- b. Memperkuat mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga perencanaan proyek KPBU dapat disusun secara terpadu dari hulu hingga hilir.
- c. Penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi yang terpadu untuk menjamin keselarasan antar tahap perencanaan dan implementasi, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 7 program, yang terbagi menjadi:

- 1. Program Teknis** yaitu program-program Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Program teknis meliputi: (1) program ketahanan sumber daya air, (2) program infrastruktur konektivitas, dan (3) program perumahan dan kawasan permukiman, (4) program prasarana strategis, dan (5) program pembangunan perkotaan berkelanjutan.
- 2. Program Generik** yaitu program-program Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur atau administrasi pemerintahan. Program generik meliputi: (1) program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta (2) program dukungan manajemen. Dalam mendukung hal tersebut, DJPI mendukung program dukungan manajemen.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai program yang menjadi tanggung jawab DJPI tahun 2025 – 2029:

1. Program Dukungan Manajemen



Program ini merupakan bagian dari Sasaran Strategis keenam (SS-6), yakni Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Tugas Teknis Lainnya dengan indikator kinerja salah satunya berupa Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Sasaran program ini yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya, dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI).
- b. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Sasaran kegiatan terhadap program di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PI, dan memiliki 1 Kegiatan yaitu Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU yang mendukung 6 (enam) IKK yang diampu oleh 5 (lima) unit kerja di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.
2. Meningkatkan Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (diampu oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan atau PSSPP).
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas (diampu oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga (PPIBM), dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya (PPICK)).

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) DJPI tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA) dengan indikator



kinerja mengacu pada Renstra DJPI tahun 2025 - 2029. Acuan pada bulan Januari – Agustus perhitungan indikator kinerja mengacu pada DIPA dan PK awal tahun 2025 sedangkan pada bulan September – Desember perhitungan indikator kinerja mengacu pada Renstra DJPI 2015 – 2029. Selama tahun 2025, DJPI telah menyusun tiga dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan Menteri Pekerjaan Umum. Dari ketiga dokumen PK tersebut, dua di antaranya merupakan dokumen revisi PK. Penyusunan ketiga dokumen PK tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal di Kementerian PU yang berdampak pada target kinerja DJPI. Ikhtisar mengenai PK awal, PK revisi, serta kronologi proses perubahan PK akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

PK awal antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan Menteri Pekerjaan Umum ditandatangani pada bulan Januari 2025. Penetapan PK awal telah mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dan selaras dengan draft Renstra DJPI 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas pada laporan kinerja DJPI tahun 2024, DJPI berhasil mencapai target IKSS yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian sebesar 163,47%.

Selain itu, DJPI juga berhasil mencapai target IKSP yaitu Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian sebesar 99,33%. Rincian PK Awal DJPI tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Gambar 2. 2 Rapat Pembahasan Konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2. 1 PK Awal DJPI Tahun 2025

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program		Target
Program Dukungan Manajemen		
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
1	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00%
2	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	99,96%

Sumber: Perjanjian Kinerja DJPI 2025

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

PK akhir antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan Menteri Pekerjaan Umum ditandatangani pada bulan Desember 2025. Pada PK tersebut, terdapat perubahan (1) Target IKP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI) di mana pada PK awal sebesar 99,96% menjadi 86,81% dan (2) Anggaran yang semula Rp98.961.375.000,00 pada PK revisi bulan September 2025 menjadi Rp101.827.973.000,00. Rincian PK Akhir DJPI tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 PK Akhir DJPI Tahun 2025

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program		Target
Program Dukungan Manajemen		
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	

1	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00%
2	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	86,81%

Sumber: Perjanjian Kinerja DJPI 2025

2.2.3 Kronologi Perubahan PK

Terhitung dari bulan Januari hingga Desember 2025, PK DJPI mengalami dua kali perubahan sehingga terdapat tiga dokumen PK yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. PK Awal ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2025, dengan total anggaran sebesar Rp98.961.375.000,00. Dari total anggaran tersebut untuk mendukung Program Dukungan Manajemen dengan target IKSP satu yaitu Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif adalah sebesar 100% dan IKSP dua yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI) adalah sebesar 99,96%.
2. PK Revisi Pertama ditetapkan pada tanggal 30 September 2025, dengan total anggaran sebesar Rp98.961.375.000,00. Revisi ini dilakukan karena terdapat penyesuaian terhadap target pada IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI) berdasarkan draft Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 2025-2029.
3. PK Revisi Kedua ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2025 dengan total anggaran sebesar Rp101.827.973.000,00. Revisi ini dilakukan karena terdapat perubahan anggaran. Untuk target pada IKSP tidak mengalami perubahan.

Tabel 2. 3 Kronologis Perubahan Target PK DJPI Tahun 2025

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program		Target PK (%)		
		Awal	Rev I	Rev II
Program Dukungan Manajemen				
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
1	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Siap Dikerjasamakan Dan	100,00	100,00	100,00



Sasaran Program/Indikator Sasaran Program		Target PK (%)		
		Awal	Rev I	Rev II
	Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien Dan Efektif			
2	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	99,96	86,81	86,81

Sumber: Perjanjian Kinerja DJPI 2025

2.3 Metode Pengukuran

DJPI mendukung pencapaian kinerja satu sasaran program, yaitu Program Dukungan Manajemen. Setelah Renstra DJPI Tahun 2025 – 2029 ditetapkan, maka pengukuran capaian indikator kinerja (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis) dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Renstra DJPI 2025 – 2029)

2.3.1 Program Dukungan Manajemen

A. IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif

IKSS ini dihitung dengan menjumlahkan indikator kontributor satu dan dua dengan pembobotan (%) sebagai berikut.

1. Indikator 1 (20%)

Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diukur berdasarkan Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibandingkan dengan target. Responden pada survei ini yaitu pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PU.

2. Indikator 2 (80%)

Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang diukur berdasarkan Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan dari kegiatan



penyiapan pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya (Paket Pembiayaan KPBU/ pembiayaan kreatif yang masuk tahap penyiapan dan transaksi pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.

B. IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

IKSP ini dihitung dengan menjumlahkan indikator kontributor satu dan dua dengan pembobotan (%) sebagai berikut.

1. Indikator 1 (20%)

Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang diukur berdasarkan Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, dibandingkan dengan target. Responden pada survei ini yaitu pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PU.

2. Indikator 2 (80%)

Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang memasuki tahap penyiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan dari kegiatan penyiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU/ pembiayaan kreatif yang masuk tahap penyiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.

C. IKSP Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)

Capaian IKSP ini dihitung melalui perhitungan indikator yang mendukung sasaran



program kesekretariatan Kementerian PU yang terkait Kualitas Pengelolaan Kearsipan, Pengelolaan BMN, Layanan Pembentukan Produk Hukum, Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI, Nilai SAKIP, Nilai Transformasi Digital, dan Kualitas Layanan dengan pembobotan sebagai berikut:

2. Indikator 1 (10%):

Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum.

3. Indikator 2 (10%):

- a. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
- b. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku
- c. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP
- d. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

4. Indikator 3 (10%):

- a. Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%
- b. Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%
- c. Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%
- d. Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%

5. Indikator 4 (10%):

Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

6. Indikator 5 (10%):



Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian (IKPA)

7. Indikator 6 (10%):

Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu

8. Indikator 7 (10%):

Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPAN-RB

9. Indikator 8 (10%):

a. Persepsi/sentimen positif artikel/siaran di media (Persentase persepsi/sentimen positif artikel/siaran dari volume pemberitaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU di media

b. Persepsi/sentimen positif *stakeholder* dan/atau *stakeholder feedback*

10. Indikator 9 (10%):

Nilai transformasi digital Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur yang dilakukan oleh PUSDATIN

11. Indikator 10 (10%):

a. Persentase pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern

b. Persentase pengendalian kepatuhan intern

c. Persentase pemantauan kepatuhan intern

2.4 Target Kinerja DJPI Tahun 2025 Berdasarkan Renstra

Penetapan target kinerja DJPI tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada Renstra DJPI tahun 2025 - 2029. Adapun target kinerja tahunan DJPI dijabarkan secara rinci dalam dokumen PK. Capaian kinerja DJPI tahun 2025 akan dievaluasi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen PK tersebut.

2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra

Target kinerja DJPI tahun 2024 berdasarkan Renstra 2025 - 2029 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Target Kinerja DJPI Tahun 2025

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program		Target Kinerja (%)
IKSS	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100
IKSP	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100
IKSP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	86,81

Sumber: Renstra DJPI 2025-2029

Pada Tabel 2.4, target kinerja DJPI tahun 2024 pada IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif, IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif dan IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI), telah sesuai dengan target Renstra DJPI tahun 2025 - 2029.

Pencapaian target kinerja DJPI tahun 2024 yang tercantum pada Tabel 2.3 didukung oleh realisasi kinerja seluruh Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI. Berdasarkan Renstra DJPI 2025-2029, target pencapaian indikator kinerja kegiatan (IKK) masing-masing Unit Eselon II adalah sebagai berikut.

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Target IKK Setditjen PI dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	84,72%

Sumber: Renstra DJPI 2025 – 2029

B. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Target IKK Direktorat PSSPP dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Target Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	73,21%
IKK. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi	80,01%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
IKK. Tingkat Implementasi Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur	100,00%
IKK. Tingkat Implementasi Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur	100,00%

Sumber: Renstra DJPI 2025 - 2029

C. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Target IKK Direktorat PPISDA dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	72,79%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100,00%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek

Sumber: Renstra DJPI 2025 – 2029

D. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Target IKK Direktorat PPIBM dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72,16%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	100,00%

Sumber: Renstra DJPI 2025 - 2029

E. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Target IKK Direktorat PPICK dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2. 9 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	72,50%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	100,00%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Limbah Domestik yang Siap Dikerjasamakan	-
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Persampahan yang Siap Dikerjasamakan	-

Sumber: Renstra DJPI 2025 - 2029

2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Renstra 2025 – 2029

Tabel 2. 10 Target Kinerja DJPI Berdasarkan Renstra

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program		Target Kinerja (%)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen						
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya					
IKSS	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100	100	100	100	100
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKSP	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Siap Dikerjasamakan Dan Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien Dan Efektif	100	100	100	100	100
IKSP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	86,81	86,82	86,82	86,83	86,84

Sumber: Renstra DJPI 2025 - 2029

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum nomor Pw 0204-Ij/554 tanggal 10 Juni 2025 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024 didapatkan bahwa implementasi atas SAKIP DJPI TA. 2024 dapat dikategorikan **A (Memuaskan)**, dengan nilai **81,10%**. Hal ini ditandai dengan unit organisasi dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Selain itu, DJPI juga mendapatkan beberapa catatan dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan implementasi AKIP dan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Upaya perbaikan yang telah dilakukan DJPI terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP DJPI TA. 2025

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	1. Melakukan koordinasi terkait <i>crosscutting</i> hubungan kinerja, atas Sasaran Strategis yang pencapaiannya melibatkan Unit Organisasi lain, sehingga didapatkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>).	Telah dilakukan koordinasi dengan Biro PAKLN terkait <i>crosscutting</i> hubungan kinerja indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen. Pada tahun 2025, DJPI merupakan Unit Organisasi tunggal yang mengampu kinerja SS-6 pada IKSS Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.
2	Pengukuran Kinerja	1. Menyusun Laporan Monev Bulanan dengan menyajikan: a. Rincian target dan realisasi setiap capaian indikator	Telah dilakukan penyusunan Laporan Monev bulanan DJPI bulan Januari hingga Desember TA 2025 sesuai rekomendasi yang

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		kinerja secara relevan dan menyajikan capaian kinerja perbulan atas kontribusi DJPI pada IKSS; b. Perhitungan capaian kinerja sesuai dengan Metode Perhitungan Indikator Kinerja yang relevan dan telah ditetapkan sesuai Renstra, dalam hal terdapat usulan perubahan Metode Perhitungan Indikator Kinerja maka capaian kinerja dapat disajikan pula dengan metode perhitungan yang baru diusulkan, namun dengan tetap tidak menghilangkan capaian kinerja metode perhitungan sebelumnya yang masih berlaku, selama metode perhitungan yang baru diusulkan belum dilegalkan atau disetujui; c. Rincian data kinerja yang akurat untuk digunakan pada Laporan Kinerja Unit Kerja dan Laporan Kinerja Unit Organisasi; d. Informasi analisis dan nilai efisiensi anggaran; e. Penyesuaian strategi dan kebijakan terhadap penyesuaian anggaran/aktivitas dalam upaya mencapai kinerja yang diharapkan; f. Penjelasan tindak lanjut yang telah dilaksanakan terhadap rekomendasi bulan sebelumnya sehingga didapatkan informasi yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja terbaru;	tercantum dalam LHE DJPI tahun 2024 yaitu dengan menyajikan: 1. Tincian target dan realisasi setiap capaian indikator kinerja secara relevan dan menyajikan capaian kinerja perbulan atas kontribusi DJPI pada IKSS; 2. Perhitungan capaian kinerja sesuai dengan Metode Perhitungan Indikator Kinerja yang relevan dan telah ditetapkan sesuai Renstra, dalam hal terdapat usulan perubahan Metode Perhitungan Indikator Kinerja maka capaian kinerja dapat disajikan pula dengan metode perhitungan yang baru diusulkan, namun dengan tetap tidak menghilangkan capaian kinerja metode perhitungan sebelumnya yang masih berlaku, selama metode perhitungan yang baru diusulkan belum dilegalkan atau disetujui; 3. Rincian data kinerja yang akurat untuk digunakan pada Laporan Kinerja Unit Kerja dan Laporan Kinerja Unit Organisasi; 4. Informasi analisis dan nilai efisiensi anggaran; 5. Penyesuaian strategi dan kebijakan terhadap penyesuaian anggaran/aktivitas dalam upaya mencapai kinerja yang diharapkan; 6. Penjelasan tindak lanjut yang telah dilaksanakan terhadap rekomendasi bulan sebelumnya sehingga didapatkan informasi yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja terbaru;

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		2. Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti pembahasan pemantauan berkala terkait substansi pengukuran capaian kinerja, khususnya yang melibatkan pimpinan.	Pendokumentasian administrasi kegiatan pembahasan pemantauan berkala terkait substansi pengukuran capaian kinerja yang melibatkan pimpinan telah dilakukan dan dikumpulkan melalui aplikasi <i>Google Drive</i> .
3	Pelaporan Kinerja	1. Menyusun Laporan Kinerja dan Laporan Monev Bulanan (Unit Organisasi dan Unit Kerja) TA 2025 dengan sistematika dan substansi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR dan Surat Kepala BPIW Nomor PW0204-Kw/159 Tanggal 17 Desember 2024 Hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.	Telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Monev Bulanan tahun 2025 dengan sistematika dan substansi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR dan pedoman penyusunan Laporan Kinerja TA 2025 yang disampaikan oleh BPIW melalui Surat Kepala BPIW Nomor PW0204-Kw/144 tanggal 27 November 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Melakukan peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis/sosialisasi/ <i>workshop</i> Evaluasi SAKIP bagi pegawai yang akan ditugaskan sebagai evaluator internal AKIP;	1. Telah dilaksanakan bimbingan teknis terkait "Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/ LAKIP) Evaluasi SAKIP Berdasarkan Peraturan Terbaru" setelah ditetapkannya Tim Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan DJPI Tahun 2025 pada tanggal 18 -25 Agustus 2025 dengan melibatkan Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan Internal Unit Kerja tahun sebelumnya, sehingga seluruh perbaikan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja;	2. Saat ini telah diupayakan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi dan internal unit kerja sesuai LHE unit organisasi dan masing-masing unit kerja sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja.
		3. Menyajikan perbandingan persentase antara efisiensi/efektivitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya ke dalam Laporan Kinerja Tingkat Unit Kerja;	3. Telah diupayakan penyajian perbandingan persentase antara efisiensi/ efektivitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Kinerja tahun 2025
		4. Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti- bukti rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi dan pembahasan mengenai peningkatan Capaian Kinerja berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai bukti pendukung pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	4. Pendokumentasian administrasi atas pelaksanaan bukti- bukti rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi dan pembahasan mengenai peningkatan Capaian Kinerja berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai bukti pendukung pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui aplikasi <i>Google Drive</i>

Sumber: Hasil Analisis 2025

3.2 Capaian Kinerja

Kinerja DJPI Tahun 2025 dihitung berdasarkan perbandingan realisasi kinerja atas Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK) dengan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja DJPI Tahun 2025.

3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, DJPI mendukung satu SS Kementerian Pekerjaan Umum yaitu **Sasaran Strategis keenam (SS-6): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Tugas Teknis Lainnya** bersama dengan lima Unit Organisasi lainnya yaitu Sekjen, Itjen, BPIW, DJBK, dan BPSDM.

Adapun rincian indikator kinerja pada SS-6 yang dihitung berdasarkan capaian enam capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU (Sekjen)
2. Tingkat kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur (Itjen)
3. Tingkat keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum (BPIW).
4. Tingkat kualitas penyelenggaraan konstruksi (DJBK).
5. **Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (DJPI).**
6. Tingkat pengembangan kompetensi SDM aparatur PU (BPSDM).

3.2.1.1 Capaian Kinerja SS-6: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien Dan Efektif

DJPI merupakan Unit Organisasi tunggal yang mengampu kinerja SS-6 pada IKSS Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Capaian IKSS ini dihitung berdasarkan penjumlahan capaian dari indikator kontributor: (1) Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dibandingkan dengan target (bobot 20%), dan (2) Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur

PU tahap penyiapan dan transaksi pada kegiatan pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya (realisasi investasi nilai proyek KPBU pada tahun berjalan memiliki bobot penilaian sebesar 80%).

Capaian SS-6 pada Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Capaian SS-6 pada Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
SS-6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS -5	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif (%)	100,00	110,96	110,96

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja DJPI PU TA 2025 Nomor PR0303/T/Dp/2026/1

Keterangan:

	kinerja < 20	Sangat Kurang
	20 < kinerja < 60	Kurang
	60 < kinerja < 80	Butuh Perbaikan
	80 < kinerja < 100	Baik
	kinerja > 100	Istimewa
-	belum bisa dinilai	Belum Bisa Dinilai

Sumber: Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2024

Apabila dilihat secara rinci, capaian kinerja pada Tabel 3.4 diperoleh dari hasil penjumlahan capaian dua indikator kontributor yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Rincian Capaian SS-6 pada IKSS-5 Berdasarkan Indikator Kontributor

IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Didukung Sistem, Kebijakan an Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif		Target (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	20,00	20,00
2	Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	80,00	90,96
Total		100,00	110,96

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja DJPI PU TA 2025 Nomor PR0303/T/Dp/2026/1

Penjelasan detail terkait masing-masing indikator kontributor adalah sebagai berikut:

1. Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Bobot 20%)

Dalam rangka mengukur Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada tahun 2025, DJPI melakukan survei kepada 30 responden yang terdiri dari pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian Pekerjaan Umum. Penetapan indikator kinerja dikembangkan dari nilai-nilai pada dimensi *service quality* yang kemudian dihubungkan dengan masing-masing cakupan penilaian. Dimensi *service quality* terdiri dari lima nilai, yaitu; (1) *reliability* (keandalan), (2) *responsiveness* (daya tanggap), (3) *assurance* (kepastian), (4) *emphaty* (empati), dan (5) *tangible* (berwujud). Dari lima nilai tersebut, terdapat batasan-batasan yang dinilai antara lain *man, method, money, resource, time*. Seluruh nilai beserta batasan kemudian dituangkan dalam Survei. Pertanyaan-pertanyaan survei dibagi menjadi tiga kategori, yaitu; perencanaan, pelaksanaan dan hasil (*outcomes*).

Tabel 3. 4 Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

NO	KATEGORI	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI (%)	BOBOT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*20%
1	Perencanaan	7	30 Responden	100,00	20,00%
2	Pelaksanaan	6		100,00	
3	Outcomes	6		100,00	

NO	KATEGORI	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI (%)	BOBOT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*20%
TOTAL		19	30	100,00	

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja DJPI PU TA 2025 Nomor PR0303/T/Dp/2026/1

Berdasarkan Tabel 3.4, diperoleh nilai hasil survei adalah sebesar 100,00%. Setelah dilakukan pembobotan 20% terhadap hasil survei tersebut, maka didapatkan capaian indikator kontributor 1 yaitu Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah sebesar **20,00%**. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengembangan sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan infrastruktur di DJPI sudah berjalan dengan sangat baik.

Adapun rincian perhitungan Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

$$X = A \times 20\%$$

$$X = 100,00\% \times 20,00\%$$

$$= 20,00\%$$

Keterangan:

- X = Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)
- A = Nilai Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)

2. Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Bobot 80%)

Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dihitung berdasarkan nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan dari proyek sektor SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap penyiapan dan transaksi pada tahun berjalan) yang dibobotkan pada setiap tahapannya lalu dibandingkan dengan target. Perhitungan investasi Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan daftar proyek KPBU yang tercantum dalam lampiran



Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II dan digunakan sebagai acuan pengukuran capaian kinerja selama tahun berjalan.

Oleh karena itu, untuk target KPBU mulai dari tahap perencanaan hingga transaksi atau siap dikerjasamakan pada awal tahun 2025 yang digunakan dalam perhitungan capaian menggunakan target sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Awal yaitu 18 proyek/kesepakatan dengan total nilai investasi sebesar **Rp199.452.767.648.197** terdiri dari: 9 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 7 Proyek KPBU Bina Marga, dan 2 Proyek KPBU Cipta Karya. Perhitungan capaian menggunakan target sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Awal yang berlaku hingga bulan Mei 2025.

Pada bulan Juni 2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Revisi pertama pada tanggal 2 Juni 2025. Pada Perjanjian Kinerja Revisi I terdapat perubahan lampiran PK yaitu daftar proyek KPBU tahap perencanaan hingga siap dikerjasamakan menjadi 15 proyek/kesepakatan dengan total investasi sebesar **Rp149.981.000.000.000**. Proyek tersebut terdiri dari 5 proyek sektor Sumber Daya Air, 8 proyek sektor Bina Marga, dan 2 proyek sektor Cipta Karya. Perhitungan capaian menggunakan target pada PK bulan Juni berlaku hingga bulan Juli.

Selanjutnya dilakukan revisi PK kedua pada bulan Agustus yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2025 di mana terjadi perubahan lampiran PK yaitu jumlah proyek KPBU sebanyak 15 proyek/kesepakatan. Proyek tersebut terdiri dari 4 proyek sektor Sumber Daya Air, 9 proyek sektor Bina Marga, dan 2 proyek sektor Cipta Karya. Adapun total investasi yang dihitung sebagai target sebesar **Rp151.910.086.668.256**.

Pada bulan September dilakukan revisi PK ketiga yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2025. Adapun perubahan yang terjadi pada daftar proyek KPBU menjadi 16 proyek/kesepakatan dengan nilai investasi **Rp141.234.586.430.256**. Proyek tersebut terdiri dari 5 proyek sektor Sumber Daya Air, 9 proyek sektor Bina Marga, serta 2 proyek Cipta Karya. Perhitungan target menggunakan PK revisi ketiga berlaku hingga bulan Oktober 2025.



Sebagai target perhitungan bulan Desember, digunakan daftar proyek KPBU pada PK akhir yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2025 dengan total proyek/kesepakatan **Rp170.714.486.430.256**. Adapun rincian daftar proyek KPBU pada PK revisi ketiga adalah 5 proyek sektor Sumber Daya Air, 10 proyek sektor Bina Marga, dan 2 proyek sektor Cipta Karya. Rincian target dan capaian proyek KPBU penyiapan dan siap dikerjasamakan TA. 2025 sebagai data perhitungan Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Capaian Proyek KPB Penyiapan dan Siap Dikerjasamakan Tahun 2025 (Investasi)

Sektor	No	Target		No	Realisasi	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)		Nama Proyek	Investasi (Rp)
SDA	Perencanaan & Penyiapan					
	1	Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau	14.438.858.037.223	1	Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau	14.438.858.037.223
	2	Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	96.762.666.877	2	Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	96.762.666.877
	3	Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	82.516.684.000	3	Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	82.516.684.000
		3 Proyek	14.618.137.388.100		3 Proyek	14.618.137.388.100
	Siap Dikerjasamakan					
	4	Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,41MW pada Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat	256.949.300.156	4	Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,41MW pada Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat	256.949.300.156
	5	Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan	920.399.742.000	5	Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan	920.399.742.000
		2 Proyek	1.177.349.042.156		2 Proyek	1.177.349.042.156

Sektor	No	Target		No	Realisasi	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)		Nama Proyek	Investasi (Rp)
Bina Marg a	Perencanaan & Penyiapan					
	6	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan - Soka - Mengwi)	11.040.000.000.000	6	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan - Soka - Mengwi)	11.040.000.000.000,00
	7	Jalan Tol Pejagan - Cilacap	24.790.000.000.000	7	Jalan Tol Pejagan - Cilacap	24.790.000.000.000
	8	Bandung Inter Urban Toll Road	10.130.000.000.000	8	Bandung Inter Urban Toll Road	10.130.000.000.000
	9	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	5.473.000.000.000	9	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	5.473.000.000.000
	10	Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin)	8.083.000.000.000	10	Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin)	8.083.000.000.000
	11	Jalan Tol Bitung - Serpong	7.814.000.000.000	11	Jalan Tol Bitung - Serpong	7.814.000.000.000
	12	Jalan Tol Pluit Bandara (bagian dari Jalan Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	12.835.000.000.000	12	Jalan Tol Pluit Bandara (bagian dari Jalan Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	12.835.000.000.000
	13	Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta	3.494.000.000.000	13	Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta	3.494.000.000.000
	14	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya	29.480.000.000.000	14	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya	29.480.000.000.000
				15	Jalan Tol Layang Cikunir - Karawaci	26.150.000.000.000
				16	Jalan Tol Semarang Harbour (Semarang - Kendal)	13.350.000.000.000
				17	Jalan Tol Semanan - Balaraja	15.520.000.000.000
		9 Proyek	113.139.000.000.000		12 Proyek	168.159.000.000.000
	Siap Dikerjasamakan					
	15	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat (Transaksi)	36.580.000.000.000	18	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat (Transaksi)	36.580.000.000.000
		1 Proyek	36.580.000.000.000		1 Proyek	36.580.000.000.000

Sektor	No	Target		No	Realisasi	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)		Nama Proyek	Investasi (Rp)
Cipta Karya	Perencanaan & Penyiapan					
	16	SPAM Kota Balikpapan	3.700.000.000.000	19	SPAM Kota Balikpapan	3.700.000.000.000
		1 Proyek	3.700.000.000.000		1 Proyek	3.700.000.000.000
	Siap Dikerjasamakan					
	17	SPAM Regional Ayung I	1.500.000.000.000	20	SPAM Regional Ayung I	1.500.000.000.000
		1 Proyek	1.500.000.000.000		1 Proyek	1.500.000.000.000
Lain-Lain		-	-	21	Wisma Werdhapura	50.471.388.279
		-	-		1 Proyek	50.471.388.279
Total		17 Proyek	170.714.486.430.256		21 Proyek	225.784.957.818.535

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja DJPI PU TA 2025 Nomor PR0303/T/Dp/2026/1

Keterangan:

- Target berdasarkan Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Eselon II TA. 2025

Berdasarkan Tabel 4.7, **target** nilai investasi Proyek KPBU tahap penyiapan dan siap dikerjasamakan pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp170.714.486.430.256**, dan **realisasi** investasi pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp194.112.465.849.667** yang dibobotkan pada setiap tahapannya dengan total investasi tanpa pembobotan **Rp225.784.957.818.535**. Dari nilai investasi yang ada, realisasi nilai investasi yang dicapai lebih tinggi dari target sehingga didapatkan capaian kinerja sebesar 113,71%. Apabila dikalikan dengan bobot 80%, maka didapatkan capaian kinerja Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur PU 2025 adalah sebesar **90,96%**.

Realisasi investasi tersebut berasal dari Proyek KPBU tahap penyiapan dan siap dikerjasamakan tahun 2025 yaitu sebanyak 21 proyek terdiri dari: 5 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 13 Proyek KPBU Bina Marga, 2 Proyek KPBU Cipta Karya, dan 1 Proyek KPBU lainnya yang dihitung sebagai capaian Direktorat PSSPP.

Setelah hasil capaian kinerja indikator kontributor 1 dan 2 telah diperoleh, maka dilakukan penjumlahan capaian kedua indikator kontributor tersebut.

Capaian Kinerja IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	=	Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
		+
		Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	=	20,00% + 90.96%
	=	110,96%

Jadi, capaian kinerja IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif adalah sebesar 110,96%, dari target 100,00%, sehingga didapatkan **kinerja** sebesar **110,96%** dan termasuk ke dalam kategori **Istimewa**.

3. Analisis Capaian Kinerja SS-6: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien Dan Efektif

Kinerja IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebesar **110,96%**. Hal ini dilihat berdasarkan penjumlahan capaian kedua indikator kontributor, yaitu: (1) Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar 20,00%, dan (2) Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar 90,96%. Keberhasilan capaian IKSS ini didukung oleh:

1. DJPI secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan strategis serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong percepatan Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur (KPBU). Upaya tersebut mencakup penyusunan dan penyempurnaan dokumen *Final Business Case* (FBC) serta *Feasibility Study* (FS), pemenuhan *readiness criteria*, hingga penyiapan tahapan transaksi proyek. Selain itu, DJPI juga membangun kolaborasi yang lebih intens dengan para *stakeholder* terkait untuk memastikan setiap proses penyiapan KPBU di sektor Pekerjaan Umum dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan efektif melalui mekanisme koordinasi yang komprehensif.
2. Terjalinnya koordinasi yang intensif antara DJPI dengan Perumda Kerta Bali Saguna selaku PJPK Proyek SPAM Regional Ayung serta unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sinergi tersebut mendorong percepatan pelaksanaan proyek, sehingga Proyek SPAM Regional Ayung dapat memasuki tahap persiapan transaksi pada Tahun Anggaran 2025.
3. Sebanyak 21 proyek penyiapan dan siap dikerjasamakan berhasil direalisasikan dari target 17 proyek sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Eselon II. Tambahan capaian tersebut berasal dari 4 proyek yaitu Jalan Tol Layang Cikunir–Karawaci, Jalan Tol Semarang Harbour (Semarang–Kendal), Jalan Tol Semanan–Balaraja, dan Wisma Werdhapura, yang turut dihitung sebagai capaian kinerja tambahan.

4. Telah dilakukan peningkatan kerja sama dan kemitraan yang dilakukan oleh DJPI dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi infrastruktur bidang PU (dalam dan luar negeri), khususnya terkait dengan skema pembiayaan alternatif.

3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Program DJPI

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029, DJPI mengampu satu program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dengan koordinator program yaitu Sekretariat Jenderal. Capaian kinerja Sasaran Program (SP) DJPI tahun 2025 diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi program dengan target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja DJPI tahun 2025. Capaian kinerja Sasaran Program (SP) DJPI dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Sasaran Program DJPI Tahun 2025

Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif	100,00	110,96	110,96
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	86,81	93,41	107,61
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00	102,59	102,59

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja DJPI PU TA 2025 Nomor PR0303/T/Dp/2026/1

Keterangan:

	kinerja < 20	Sangat Kurang
	20 < kinerja < 60	Kurang
	60 < kinerja < 80	Butuh Perbaikan

	80 < kinerja < 100	Baik
	kinerja > 100	Istimewa
-	belum bisa dinilai	Belum Bisa Dinilai

Sumber: Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2024

Pada program Dukungan Manajemen dengan **IKSP Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif**, realisasi sebesar 102,59% dari target sebesar 100%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **102,59%** dan dapat dikategorikan **Istimewa**. Selain itu, pada IKSP **Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)** realisasi sebesar 93,41% dari target sebesar 86,81%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **107,61%** dan dapat dikategorikan memuaskan.

Rincian capaian pada Program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

3.2.2.1 Capaian Kinerja SP 1 Pada IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)

Capaian IKSP 1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya dihitung melalui penjumlahan dari 10 (sepuluh) indikator kontributor dengan pembobotan 10% di setiap indikatornya. Rincian data dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Rincian Capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
SP 2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSP 2. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)		86,81	93,41	107,61
1	Indikator 1 (10%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	77,55	78,10	100,71
2	Indikator 2 (10%) Tingkat Pengelolaan BMN	92,17	100,00	108,50
3	Indikator 3 (10%) Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	100,00	100,00	100,00
4	Indikator 4 (10%)	100,00	100,00	100,00

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
SP 2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				
	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana			
5	Indikator 5 (10%) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93,44	94,75	101,40
6	Indikator 6 (10%) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	88,01	100,00	113,62
7	Indikator 7 (10%) Nilai SAKIP	77,42	81,10	104,75
8	Indikator 8 (10%) Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik	96,51	93,42	96,80
9	Indikator 9 (10%) Nilai Transformasi Digital Unit Organisasi	63,02	97,73	155,08
10	Indikator 10 (10%) Tingkat Kepatuhan Intern Unit Organisasi	80,01	89,03	111,27

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan Tabel 3.13, capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI) adalah 107,61% dengan realisasi 93,41% dari target 86,81%. Dengan demikian, nilai capaian kinerja dapat dikategorikan **Istimewa**.

3.2.2.2 Analisis Capaian Kinerja Capaian Kinerja SP 1 Pada IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)

Kinerja IKSP 2 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Tugas Teknis Lainnya pada tahun berjalan mencapai nilai sebesar 107,61%, sehingga dapat dikategorikan Istimewa. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya telah berjalan optimal. Keberhasilan pencapaian IKSP 2 ini didukung oleh terpenuhinya hampir seluruh indikator kinerja yang ditetapkan, di mana 9 (sembilan) indikator kinerja telah melampaui target, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan yaitu indikator 8 tingkat layanan komunikasi publik. Meskipun terdapat 1 indikator yang belum memenuhi target, nilai kinerja pada IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas



Teknis Lainnya (DJPI) sudah memenuhi target yang ditetapkan karena dukungan kinerja 9 indikator lainnya.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan dalam capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kearsipan di lingkungan DJPI dilaksanakan secara tertib dan konsisten pada seluruh unit kerja. Capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan merupakan nilai rata-rata hasil penilaian kearsipan seluruh unit kerja di DJPI, yang mencerminkan penerapan tata kelola kearsipan yang seragam dan mendukung tertib administrasi organisasi.
- b. Tingkat efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencapai capaian sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa proses penatausahaan BMN telah dilaksanakan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengelolaan BMN tersebut dilakukan melalui pencatatan, pemutakhiran data, serta pemanfaatan aset yang selaras dengan kebutuhan unit organisasi, sehingga mampu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- c. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum tercapai secara optimal, yang tercermin dari terlaksananya seluruh layanan pembentukan produk hukum serta layanan dan advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana pada Tahun 2025.
- d. Koordinasi intensif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi faktor keberhasilan dalam meningkatkan kinerja indikator Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI.
- e. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan DJPI menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital organisasi. Pemanfaatan sistem dan aplikasi yang terintegrasi meningkatkan efisiensi proses kerja, memperkuat koordinasi lintas unit, serta mendukung transparansi dan pengawasan. Komitmen DJPI dalam transformasi digital tercermin melalui partisipasi aktif dalam penilaian Transformasi Digital Tahun 2025 yang mencakup aspek organisasi, proses, data, dan teknologi, sehingga mendukung peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

- 
- f. Penyebarluasan informasi kebijakan dan program DJPI secara aktif melalui media sosial, media massa, dan media elektronik mendukung peningkatan Tingkat Layanan Komunikasi Publik.
 - g. Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang terencana, tertib, dan akuntabel mendukung pencapaian Nilai Layanan Keuangan serta memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
 - h. Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian serta Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan DJPI didukung oleh pengelolaan kepegawaian yang tertib, pembinaan SDM yang berkelanjutan, serta penataan organisasi yang efektif sesuai ketentuan.
 - i. Pencapaian Nilai SAKIP DJPI didukung oleh hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, yang mencerminkan keterpaduan perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi secara sistematis dan konsisten.
 - j. Tingkat Kepatuhan Intern DJPI didukung oleh pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern, pengendalian kepatuhan intern, serta pemantauan kepatuhan intern yang dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

3.2.2.3 Capaian Kinerja SP 2 pada IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

Capaian IKSP 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif dihitung berdasarkan penjumlahan indikator kontributor: (1) Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, dikalikan dengan bobot (20%), (2) Jumlah paket KPBU yang memasuki tahap penyiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan dari kegiatan penyiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya (realisasi

jumlah Paket Pembiayaan KPBU/ pembiayaan kreatif yang masuk tahap penyiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan pada tahun berjalan) dikalikan dengan bobot (80%). Rincian capaian berdasarkan tiap indikator kontributor dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Rincian Capaian IKSP 1 Berdasarkan Indikator Kontributor

IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif		Target (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	20,00	20,00
2	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum tahap penyiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan	80,00	82,59
Total		100,00	102,59

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Penjelasan detail terkait masing-masing indikator kontributor adalah sebagai berikut:

1. Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU (20%)

Dalam rangka mengukur Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada tahun 2025, DJPI melakukan survei kepada 30 responden yang terdiri dari pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian Pekerjaan Umum. Penetapan indikator kinerja yang akan diukur dan dijadikan pertanyaan dalam kuesioner atau survei berdasarkan pemetaan model logika, yaitu: (1) indikator masukan (*input*) yang mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan, (2) indikator keluaran (*ouput*) digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, (3) indikator hasil (*outcome*) digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan, serta (4) indikator dampak (*impact*) yang menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner, maka didapatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Kategori	Jumlah Pertanyaan	Jumlah Responden	Nilai (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) * 20%
Input Kegiatan	10	30	100,00	20,00
Aktivitas Kegiatan	3		100,00	
Output Kegiatan	2		100,00	
Outcomes Kegiatan	9		100,00	
Impact Kegiatan	2		100,00	
Total	26	30	100,00	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Rincian perhitungan Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

$$X = A \times 20,00\%$$

$$X = 100,00\% \times 20,00\%$$

$$= 20,00\%$$

Keterangan:

X = Capaian Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)

A = Nilai Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)

Berdasarkan Tabel 3.9, diperoleh nilai hasil survei adalah sebesar 100,00%. Setelah dilakukan pembobotan 20% terhadap hasil survei tersebut, maka capaian indikator kontributor 1 yaitu Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah sebesar **20,00%**. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di DJPI sudah berjalan dengan baik.

2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum tahap persiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan (Bobot 80%)

Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum tahap persiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan persiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan pembiayaan infrastruktur SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap persiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan/lelang pada tahun berjalan) yang dibobotkan berdasar tahapan setiap proyek lalu dibandingkan dengan target. Perhitungan ketersediaan KPBU Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan daftar proyek KPBU yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II dan digunakan sebagai acuan pengukuran capaian kinerja selama tahun berjalan.

Oleh karena itu, untuk target KPBU mulai dari tahap perencanaan hingga transaksi atau siap dikerjasamakan pada tahun 2025 yang digunakan dalam perhitungan capaian menggunakan target sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Awal yaitu 18 proyek/kesepakatan dengan total nilai investasi sebesar **Rp199.452.767.648.197** terdiri dari: 9 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 7 Proyek KPBU Bina Marga, dan 2 Proyek KPBU Cipta Karya. Perhitungan capaian menggunakan target sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Awal yang berlaku hingga bulan Mei 2025.

Pada bulan Juni 2025, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Revisi pertama pada tanggal 2 Juni 2025. Pada Perjanjian Kinerja Revisi I terdapat perubahan lampiran PK yaitu daftar proyek KPBU tahap perencanaan hingga siap dikerjasamakan menjadi 15 proyek/kesepakatan dengan total investasi sebesar **Rp149.981.000.000.000**. Proyek tersebut terdiri dari 5 proyek sektor Sumber Daya Air, 8 proyek sektor Bina Marga, dan 2 proyek sektor Cipta Karya. Perhitungan capaian menggunakan target pada PK bulan Juni berlaku hingga bulan Juli.

Selanjutnya dilakukan revisi PK kedua pada bulan Agustus yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2025 di mana terjadi perubahan lampiran PK yaitu jumlah proyek KPBU sebanyak 15 proyek/kesepakatan. Proyek tersebut terdiri



dari 4 proyek sektor Sumber Daya Air, 9 proyek sektor Bina Marga, dan 2 proyek sektor Cipta Karya. Adapun total investasi yang dihitung sebagai target sebesar **Rp151.910.086.668.256**.

Pada bulan September dilakukan revisi PK ketiga yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2025. Adapun perubahan yang terjadi pada daftar proyek KPBU menjadi 16 proyek/kesepakatan dengan nilai investasi **Rp141.234.586.430.256**. Proyek tersebut terdiri dari 5 proyek sektor Sumber Daya Air, 9 proyek sektor Bina Marga, serta 2 proyek Cipta Karya. Perhitungan target menggunakan PK revisi ketiga berlaku hingga bulan Oktober 2025.

Sebagai target perhitungan bulan Desember, digunakan daftar proyek KPBU pada PK akhir yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2025 dengan total proyek/kesepakatan **Rp170.714.486.430.256**. Adapun rincian daftar proyek KPBU pada PK revisi ketiga adalah 5 proyek sektor Sumber Daya Air, 10 proyek sektor Bina Marga, dan 2 proyek sektor Cipta Karya. Rincian target dan capaian proyek KPBU penyiapan dan siap dikerjasamakan TA. 2025 sebagai data perhitungan Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU TA. 2024 (Proyek)

Sektor	No	Target		No	Realisasi	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)		Nama Proyek	Investasi (Rp)
SDA	Perencanaan & Penyiapan					
	1	Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau	14.438.858.037.223	1	Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau	14.438.858.037.223
	2	Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	96.762.666.877	2	Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	96.762.666.877
	3	Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	82.516.684.000	3	Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	82.516.684.000
		3 Proyek	14.618.137.388.100		3 Proyek	14.618.137.388.100
	Siap Dikerjasamakan					
	4	Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,41MW pada Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat	256.949.300.156	4	Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,41MW pada Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat	256.949.300.156
	5	Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan	920.399.742.000	5	Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan	920.399.742.000
		2 Proyek	1.177.349.042.156		2 Proyek	1.177.349.042.156

Sektor	No	Target		No	Realisasi	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)		Nama Proyek	Investasi (Rp)
Bina Marg a	Perencanaan & Penyiapan					
	6	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan - Soka - Mengwi)	11.040.000.000.000	6	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan - Soka - Mengwi)	11.040.000.000.000,00
	7	Jalan Tol Pejagan - Cilacap	24.790.000.000.000	7	Jalan Tol Pejagan - Cilacap	24.790.000.000.000
	8	Bandung Inter Urban Toll Road	10.130.000.000.000	8	Bandung Inter Urban Toll Road	10.130.000.000.000
	9	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	5.473.000.000.000	9	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	5.473.000.000.000
	10	Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin)	8.083.000.000.000	10	Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin)	8.083.000.000.000
	11	Jalan Tol Bitung - Serpong	7.814.000.000.000	11	Jalan Tol Bitung - Serpong	7.814.000.000.000
	12	Jalan Tol Pluit Bandara (bagian dari Jalan Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	12.835.000.000.000	12	Jalan Tol Pluit Bandara (bagian dari Jalan Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	12.835.000.000.000
	13	Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta	3.494.000.000.000	13	Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta	3.494.000.000.000
	14	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya	29.480.000.000.000	14	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya	29.480.000.000.000
				15	Jalan Tol Layang Cikunir - Karawaci	26.150.000.000.000
				16	Jalan Tol Semarang Harbour (Semarang - Kendal)	13.350.000.000.000
				17	Jalan Tol Semanan - Balaraja	15.520.000.000.000
		9 Proyek	113.139.000.000.000		12 Proyek	168.159.000.000.000
	Siap Dikerjasamakan					
	15	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat (Transaksi)	36.580.000.000.000	18	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat (Transaksi)	36.580.000.000.000
		1 Proyek	36.580.000.000.000		1 Proyek	36.580.000.000.000

Sektor	No	Target		No	Realisasi	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)		Nama Proyek	Investasi (Rp)
Cipta Karya	Perencanaan & Penyiapan					
	16	SPAM Kota Balikpapan	3.700.000.000.000	19	SPAM Kota Balikpapan	3.700.000.000.000
		1 Proyek	3.700.000.000.000		1 Proyek	3.700.000.000.000
	Siap Dikerjasamakan					
	17	SPAM Regional Ayung I	1.500.000.000.000	20	SPAM Regional Ayung I	1.500.000.000.000
		1 Proyek	1.500.000.000.000		1 Proyek	1.500.000.000.000
Lain-Lain		-	-	21	Wisma Werdhapura	50.471.388.279
		-	-		1 Proyek	50.471.388.279
Total		17 Proyek	170.714.486.430.256		21 Proyek	225.784.957.818.535

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja DJPI PU TA 2025 Nomor PR0303/T/Dp/2026/1

Keterangan:

- Target berdasarkan Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Eselon II TA. 2025

Berdasarkan Tabel 3.10, **target** Proyek KPBU pada tahap perencanaan dan penyiapan adalah sebanyak **13 proyek**, dan **realisasi** proyek pada tahap perencanaan dan penyiapan sebanyak **16 proyek**. Terkait **target** proyek yang siap dikerjasamakan, target pada tahun 2025 adalah sebanyak **4 proyek**, dan **realisasi** proyek KPBU yang siap dikerjasamakan sebanyak **5 proyek**. Perhitungan realisasi dilakukan dengan penjumlahan realisasi proyek KPBU yang dibobotkan pada setiap tahapan lalu dibagi target dan dikalikan dengan bobot sebesar **80%**.

Setelah hasil capaian kinerja indikator kontributor 1 dan 2 telah diperoleh, maka Capaian Kinerja IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum	=	Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
		+
		Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum Penyiapan dan Transaksi/Siap Dikerjasamakan
	=	20,00% + 82,59%
	=	102,59%

Jadi, Capaian Kinerja IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif adalah sebesar 102,59% dari target 100%, sehingga didapatkan **kinerja** sebesar **102,59%**.

3.2.2.4 Analisis Capaian Kinerja SP 2 pada IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

Kinerja IKSP 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif adalah sebesar **102,59%**. Hal ini dilihat berdasarkan penjumlahan capaian kedua indikator kontributor, yaitu: (1) Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 20,00%, dan (2) Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan sebesar 82,59%. Adapun latar keberhasilan dari IKSP 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif adalah sebagai berikut:

1. Terjalannya koordinasi yang intensif antara DJPI dengan Perumda Kerta Bali Saguna selaku PJPB Proyek SPAM Regional Ayung serta unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sinergi tersebut mendorong percepatan pelaksanaan proyek, sehingga Proyek SPAM Regional Ayung dapat memasuki tahap persiapan transaksi pada Tahun Anggaran 2025.
2. Sebanyak 21 proyek penyiapan dan siap dikerjasamakan berhasil direalisasikan dari target 17 proyek sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Eselon II. Tambahan capaian tersebut berasal dari 4 proyek yaitu Jalan Tol Layang Cikunir–Karawaci, Jalan Tol Semarang Harbour (Semarang–Kendal), Jalan Tol Semanan–Balaraja, dan Wisma Werdhapura, yang turut dihitung sebagai capaian kinerja tambahan.
3. Dukungan dan kerja sama dari Instansi/Unit Organisasi/Unit Kerja lain dalam melakukan percepatan penyiapan proyek KPBU serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait yang lebih intensif.

3.2.3 Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon II

Pencapaian Sasaran Program di DJPI tentunya didukung oleh capaian indikator kinerja sasaran kegiatan (IKK) dari lima Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI. Capaian IKK ini dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kegiatan yang mendukung pencapaian IKK dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan matriks interpretasi kinerja sebagai berikut:

Keterangan:

	kinerja < 20	Sangat Kurang
	20 < kinerja < 60	Kurang
	60 < kinerja < 80	Butuh Perbaikan

	80 < kinerja < 100	Baik
	kinerja > 100	Istimewa
-	belum bisa dinilai	Belum Bisa Dinilai

Sumber: Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2024

3.2.3.1 Capaian IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Realisasi IKK Setditjen PI pada tahun 2025 sudah melampaui target yang ditetapkan pada PK akhir. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Setditjen PI berjalan secara efektif dan mendukung pencapaian sasaran yang telah direncanakan. Rincian capaian IKK Setditjen PI berdasarkan PK tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Capaian IKK Setditjen PI

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	84,72%	93,21%	110,02%

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja Setditjen PI PU TA 2025 Nomor PR0303/T/Ps/2026/5

Berdasarkan Tabel 3.11, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum ditetapkan dengan target sebesar 84,72%. Capaian/realisasi yang dicapai sebesar 93,21%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar **110,02%** dan termasuk dalam kategori **Istimewa**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum telah terlaksana melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

3.2.3.2 Analisis Capaian IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Berdasarkan Tabel 3.11, kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 mencapai **110,02%**, sehingga melebihi target yang ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil dari akumulasi nilai sepuluh



indikator pendukung terdapat 9 indikator yang melebihi target sedangkan 1 indikator belum memenuhi target yang ditetapkan. Indikator yang belum memenuhi target adalah tingkat kualitas pengelolaan kearsipan. Namun secara keseluruhan nilai dari indikator lainnya dapat menutupi kekurangan yang ada. Adapun komposit indikator yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja IKK Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (bobot 10,00%) dengan nilai 73,00 yang termasuk dalam predikat Sangat Baik (BB) dan menempati peringkat ketiga terbaik pada kategori unit sekretariat organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi atau capaian 7,30%.
2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (bobot 10,00%) dengan nilai 100,00% sehingga didapatkan realisasi atau capaian 10,00%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses penatausahaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Tingkat layanan hukum (bobot 10,00%) dengan nilai 100,00% sehingga didapatkan realisasi atau capaian 10,00%. Hal tersebut mencerminkan bahwa seluruh layanan dan advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Tahun 2025.
4. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (bobot 10,00%) dengan nilai 100,00% sehingga didapatkan realisasi atau capaian 10,00%. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dihitung berdasarkan hasil survei kepuasan layanan kepegawaian dengan kriteria berikut:
 - a. nilai kepuasan 85,01%–100,00% memperoleh nilai kinerja layanan 100%;
 - b. nilai kepuasan 75,01%–85,00% memperoleh nilai kinerja layanan 90%;
 - c. nilai kepuasan 65,01%–75,00% memperoleh nilai kinerja layanan 80%;
 - d. nilai kepuasan 55,01%–65,00% memperoleh nilai kinerja layanan 70%; dan
 - e. nilai kepuasan di bawah 55,01% memperoleh nilai kinerja layanan 60%.

- 
5. Nilai layanan keuangan (bobot 10,00%) dengan nilai 100,00% sehingga didapatkan realisasi atau capaian 10,00%. Kegiatan pada indikator ini dilaksanakan sesuai dengan rencana mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
 6. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP (bobot 10,00%) dengan nilai 100,00% sehingga didapatkan realisasi atau capaian 10,00%. Adapun nilai 100,00% didapatkan dari 79 temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Namun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi yang saat ini sedang dalam proses telaah oleh BPK RI.
 7. Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (bobot 10,00%) dengan nilai 87,65 predikat A (memuaskan) sehingga didapatkan realisasi atau capaian 8,76%. Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2024 belum tersedia, sehingga menggunakan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024. Nilai tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 77,42.
 8. Tingkat layanan komunikasi publik (bobot 10,00%) dengan nilai 100,00% sehingga didapatkan realisasi atau capaian 10,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan layanan komunikasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 9. Transformasi digital unit kerja (bobot 10,00%) dengan nilai 78,79 sehingga didapatkan realisasi atau capaian 7,88. Nilai tersebut jauh melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 24,76.
 10. Tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko T2 (bobot 10,00%) dengan nilai 92,69 sehingga didapatkan realisasi atau capaian 9,27. Nilai tersebut telah melampaui target Tahun 2025 yaitu sebesar 80,01. Capaian ini merupakan yang tertinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan termasuk dalam kategori *Optimized* (Level 5).

3.2.3.3 Capaian IKK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Hasil perhitungan IKK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (PSSPP) pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Keempat IKK yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja berhasil direalisasikan dan melampaui target yang telah ditentukan. Hal tersebut mencerminkan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat PSSPP. Adapun rincian capaian masing-masing IKK Direktorat PSSPP Tahun 2025 disajikan pada tabel terkait.

Tabel 3. 12 Capaian IKK Direktorat PSSPP

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	73,21%	89,58%	122,36%
IKK. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi	80,01%	93,98%	117,46%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			
IKK. Tingkat Implementasi Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur	100,00%	112,50%	112,50%
IKK. Tingkat Implementasi Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur	100,00%	117,50%	117,50%

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat PSSPP TA 2025 Nomor PR0303/T/Pk/2026/09

Berdasarkan Tabel 3.12, capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (PSSPP) adalah sebagai berikut:

1. IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Capaian Kinerja pada IKK ini sebesar **122,36%** dan termasuk dalam kategori **Istimewa**. Target indikator sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 73,21%, dengan capaian/realisasi mencapai 89,58%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan dukungan manajemen telah berjalan secara optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas di Direktorat PSSPP.

2. IKK. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi

Hasil perhitungan kinerja pada IKK ini mencapai **117,46%** dan termasuk dalam kategori **Istimewa**. Target yang ditetapkan sebesar 80,01%, dengan realisasi/capaian tercatat sebesar 93,98%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa penerapan manajemen risiko pada unit organisasi telah dilaksanakan secara efektif dan melampaui target yang direncanakan.

3. IKK. Tingkat Implementasi Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur

Indikator ini mencatat capaian kinerja sebesar **112,50%** dengan kategori **Istimewa**. Target indikator sebesar 100,00%, dengan realisasi/capaian mencapai 112,50% yang menunjukkan bahwa angka melebihi target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi strategi dan program pembiayaan infrastruktur dapat dilaksanakan dengan baik sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

4. IKK. Tingkat Implementasi Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur

Hasil perhitungan kinerja pada IKK ini mencapai **117,50%** dengan kategori **Istimewa**. Target yang ditetapkan sebesar 100,00% dengan realisasi/capaian yang melebihi target yaitu 117,50%. Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan sistem dan pengembangan kemitraan pembiayaan infrastruktur telah berjalan secara efektif dan melampaui target yang ditetapkan.

3.2.3.4 Analisis Capaian IKK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Berdasarkan Tabel 3.15, seluruh kinerja di Direktorat PSSPP sudah melebihi 100,00% sehingga termasuk dalam kategori **Istimewa**. Keberhasilan capaian IKK ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana sehingga capaian beberapa komposit indikator kinerja ini berhasil mencapai target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Komposit indikator kinerja tersebut antara lain:

1. IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Realisasi IKK ini mencapai 89,58% dengan kinerja 122,36%. Hal tersebut didukung oleh indikator komposit sebagai berikut:

- a. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum memiliki bobot 20,00% dengan nilai 75,22 dari target 79,02. Hal ini menunjukkan pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk meningkatkan nilai pengawasan kearsipan pada tahun berikutnya maka telah disusun standar operasional prosedur peminjaman arsip digital terintegrasi dengan formulir peminjaman Digital di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2025. SOP tersebut merupakan inovasi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dalam upaya perbaikan nilai pengawasan kearsipan pada tahun berikutnya.
- b. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu memiliki bobot 20,00% dengan nilai 100,00%. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 20,00%. Nilai tersebut berdasarkan survei 33 pegawai di Direktorat PSSPP.
- c. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB memiliki bobot 20,00% dengan nilai 86,90 (memuaskan) dari target 77,42. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 17,38%.
- d. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN memiliki bobot 20,00% dengan nilai 95,95 dan menjadi peringkat 3 dalam penilaian transformasi digital kategori unit kerja. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 19,19%.
- e. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 memiliki bobot 20,00% dengan nilai 89,83 yang termasuk dalam predikat *managed*/level 4. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 17,97%.

2. IKK. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi

Realisasi IKK ini mencapai 93,98% dengan kinerja 117,46%. Hal tersebut didukung oleh indikator komposit sebagai berikut:

- 
- a. Tingkat Pembinaan KI dan MR memiliki bobot 20,00% dengan nilai 80,00%. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 16,00%. Pada Tahun 2025, pelaksanaan pembinaan KI dan MR ditargetkan dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada Semester I dan Semester II. Namun, dari target tersebut terdapat satu laporan pembinaan KI dan MR yang disampaikan melewati batas waktu yang ditetapkan, sehingga tingkat realisasi yang dicapai hanya sebesar 80% dari target 100%.
 - b. Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi memiliki bobot 20,00% dengan nilai 100,00%. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 20,00%. Keberhasilan indikator disebabkan oleh tercapainya target pelaporan yaitu 2 kali dalam Tahun 2025 yang di laporkan secara tepat waktu pada semester I dan II.
 - c. Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan memiliki bobot 20,00% dengan nilai 86,90% karena telah dilaksanakan deklarasi benturan kepentingan pejabat dan pegawai. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 17,38%.
 - d. Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern memiliki bobot 15,00% dengan nilai 100,00%. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 15,00%. Nilai tersebut didapatkan karena Direktorat PSSPP berhasil menyelesaikan penelaahan pengawasan intern tepat waktu.
 - e. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T1 memiliki bobot 10,00% dengan nilai 79,78%. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 7,98%.
 - f. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti memiliki bobot 15,00% dengan nilai 100,00%. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 15,00%. Target pada indikator ini tercapai karena seluruh rekomendasi hasil audit/pengawasan unit organisasi telah ditindaklanjuti secara tuntas.

3. IKK. Tingkat Implementasi Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur

Realisasi IKK ini mencapai 112,50% dengan kinerja 112,50%. Hal tersebut didukung oleh indikator komposit sebagai berikut:

- a. Jumlah rekomendasi kebijakan strategi/program pembiayaan infrastruktur yang disusun (terrealisasi) dibandingkan dengan target, memiliki bobot 50,00% dengan nilai 125,00% karena Direktorat PSSPP berhasil merealisasikan 5 rekomendasi kebijakan dari target 4 rekomendasi kebijakan. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 62,50%.
- b. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi/informasi pimpinan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur PU yang disusun dibandingkan dengan target, memiliki bobot 50,00% dengan nilai 100,00%. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 50,00%. Target pada indikator ini, yaitu 3 dokumen pemantauan dan evaluasi/informasi pimpinan seluruhnya telah tercapai.

4. IKK. Tingkat Implementasi Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur

Realisasi IKK ini mencapai 117,50% dengan kinerja 117,50%. Hal tersebut didukung oleh indikator komposit sebagai berikut:

- a. Jumlah rekomendasi kebijakan sistem/kemitraan pembiayaan infrastruktur yang disusun (terrealisasi) dibandingkan dengan target, memiliki bobot 70,00% dengan nilai 125,00% karena Direktorat PSSPP berhasil merealisasikan 5 rekomendasi kebijakan dari target 4 rekomendasi kebijakan. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 87,50%.
- b. Jumlah dokumen pengembangan/pengelolaan data dan sistem informasi pembiayaan infrastruktur dibandingkan dengan target, memiliki bobot 30,00% dengan nilai 100,00%. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi/capaian sebesar 30,00%. Target pada indikator ini, yaitu 2 dokumen pengembangan/pengelolaan data dan sistem informasi pembiayaan infrastruktur seluruhnya telah tercapai.

3.2.3.5 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PPISDA Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruhnya telah memenuhi target. Dari tiga IKK yang ditetapkan, dua indikator melampaui target dan satu indikator tercapai sesuai target. Berdasarkan capaian tersebut, kinerja Direktorat PPISDA dinyatakan mencapai atau bahkan melampaui 100,00%. Rincian capaian IKK Direktorat PPISDA dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Direktorat PPISDA

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	72,79%	77,89%	107,00%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100,00%	103,33%	103,33%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek	100,00%

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat PPISDA TA 2025 Nomor PR0103/T/Pa/2026/06

Berdasarkan Tabel 3.13 capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) adalah sebagai berikut:

1. IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Indikator ini memiliki target sebesar 72,79%. Capaian/realisasi yang dicapai sebesar 77,89%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar **107,00%** dengan kategori **Istimewa**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dukungan manajemen dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air telah melampaui target yang ditetapkan.

2. IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.

Target indikator ini ditetapkan sebesar 100,00%. Capaian/realisasi yang dicapai mencapai 103,33%, sehingga capaian kinerjanya tercatat sebesar 103,33%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyiapan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur sumber daya air berjalan lebih baik dari target yang direncanakan.

3. IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan

Indikator ini memiliki target sebesar 1 proyek. Capaian/realisasi yang dicapai juga sebesar 1 proyek, sehingga capaian kinerjanya tercatat sebesar 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur sumber daya air yang siap dikerjasamakan telah terpenuhi sesuai dengan rencana.

3.2.3.6 Analisis Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Berdasarkan Tabel 3.13, seluruh kinerja di Direktorat PPISDA sudah mencapai bahkan melebihi 100,00% sehingga termasuk dalam kategori **Istimewa**. Keberhasilan capaian IKK ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana sehingga capaian komposit indikator kinerja ini berhasil mencapai target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut merupakan analisis capaian IKK berdasar penilaian indikator komposit dan latar keberhasilannya:

1. IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Realisasi/capaian IKK ini mencapai 77,16% dengan kinerja 106,00%. Hal tersebut didukung oleh indikator komposit yang dibobotkan berdasar penilaian berikut:

$\geq 70,0 - \leq 72,5 = 100\%$

$\geq 72,6 - \leq 80,5 = 110\%$

$\geq 80,6 - \leq 90,5 = 120\%$

$\geq 90,6 - \leq 100,0 = 130\%$



Adapun nilai dari setiap indikator komposit adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum memiliki bobot 20,00% dengan nilai 80,70.
- b. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu memiliki bobot 20,00% dengan realisasi 100,00%.
- c. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB memiliki bobot 20,00% dengan nilai 85,65.
- d. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN memiliki bobot 20,00% dengan nilai 83,00.
- e. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 memiliki bobot 20,00% dengan nilai 79,71.

2. IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Realisasi IKK ini mencapai 103,33% dengan kinerja 103,33%. Keberhasilan tersebut didukung oleh indikator komposit sebagai berikut:

- a. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target memiliki bobot 40,00% dengan total capaian RO 100,00%. Pada indikator ini seluruh output yang direncanakan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai target yang ditentukan.
- b. Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air pada Tahap Penyiapan dibandingkan dengan target memiliki bobot 60,00% dengan total capaian RO 105,6%. Pada indikator ini ditetapkan sebanyak 3 proyek sebagai target pencapaian kinerja berdasarkan Renstra DJPI, akan tetapi Direktorat PPISDA berhasil mencapai 4 proyek pada tahap penyiapan. Proyek-proyek yang menjadi bagian dari pencapaian kinerja pada indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3. 14 Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air

TARGET			REALISASI		
Jumlah Proyek	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
3	Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau	14.438.858.037.223	4	Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau	14.438.858.037.223
	Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	96.762.666.877		Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	96.762.666.877
	Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	82.516.684.000		Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	82.516.684.000
				Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan	88.016.872.000
	Total Investasi	14.618.137.388.100		Total Investasi	14.706.154.260.100

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat PPISDA TA 2025 Nomor PR0103/T/Pa/2026/06

3. IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan

Pada IKK ini hanya terdiri dari satu komposit indikator yaitu Jumlah Proyek pembiayaan kreatif infrastruktur Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dengan target 1 proyek dan realisasi 1 proyek, sehingga didapatkan capaian kinerja sebesar 100,00% yang termasuk dalam kategori **Baik**. Adapun Proyek yang ditetapkan sebagai target awal Direktorat PPISDA adalah Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Penyediaan Infrastruktur

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Leuwikeris berkapasitas 7,4 MW yang berlokasi di Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Hingga akhir Tahun 2025, proyek tersebut masih berada pada tahap evaluasi studi kelayakan, sehingga belum dapat dilanjutkan ke tahap transaksi KPBU. Namun demikian, Direktorat PPISDA berhasil mencatat tambahan capaian output melalui Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tiga Dihaji berkapasitas 40 MW yang berlokasi di Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Proyek PLTA Tiga Dihaji telah mencapai tahap Transaksi atau Pembentukan Badan Usaha Pelaksana (BUP), yang menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan target awal yang telah ditetapkan. Secara rinci jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dapat dilihat pada Tabel 3.15

Tabel 3. 15 Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan

Jumlah Proyek	TARGET		Jumlah Proyek	REALISASI	
	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)		Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
1	Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,41MW pada Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat	256.949.300.156	1	Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji	920.399.742.000
	Total Investasi	256.949.300.156		Total Investasi	920.399.742.833

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat PPISDA TA 2025 Nomor PR0103/T/Pa/2026/06

3.2.3.7 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga (PPIBM) pada Tahun 2025 menunjukkan hasil bahwa telah melampaui target yang ditetapkan. Kedua IKK yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja berhasil direalisasikan dengan capaian kinerja di atas 100,00%, yang mencerminkan ketercapaian sasaran secara menyeluruh. Rincian capaian IKK Direktorat PPIBM dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Direktorat PPIBM

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72,16%	83,82%	116,16%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	100,00%	118,00%	118,00%

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat PPIBM TA 2025 Nomor PR0304/B/Pb/2026/07

Berdasarkan Tabel 3.16 capaian IKK Direktorat PPIBM adalah sebagai berikut:

1. IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Target indikator ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar **72,16%**. Capaian/realisasi yang dicapai sebesar **83,82%**, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar **116,16%**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa telah memenuhi dan melampaui target sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

2. IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Pada indikator ini, target kinerja ditetapkan sebesar **100%**. Pelaksanaan kegiatan menghasilkan realisasi sebesar **118,00%**, yang tercermin pada capaian kinerja sebesar **118,00%**. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan penyiapan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur Bina Marga telah melampaui target kinerja.

3.2.3.8 Analisis Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PPIBM pada Tahun 2025 telah tercapai dengan capaian kinerja di atas 100,00%, sehingga termasuk dalam kategori **Istimewa**. Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang selaras dengan perencanaan, sehingga nilai komposit indikator kinerja mampu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selanjutnya, disajikan analisis capaian IKK Direktorat PPIBM berdasarkan penilaian indikator komposit serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaiannya:

1. IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Capaian IKK terealisasi sebesar **83,82%** dengan tingkat kinerja **116,16%**. Pencapaian tersebut didukung oleh indikator komposit sebagai berikut:

- a. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum memiliki bobot 20% dengan nilai 78,62. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi sebesar 15,72%.
- b. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu memiliki bobot 20% dengan nilai 83,28. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi sebesar 16,66%.
- c. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB memiliki bobot 20% dengan nilai 86,60. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi sebesar 17,32%.
- d. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN memiliki bobot 20% dengan nilai 86,71. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi sebesar 17,34%.
- e. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 memiliki bobot 20% dengan nilai 83,89. Setelah nilai dikalikan dengan bobot didapatkan realisasi sebesar 16,78%. Pada tanggal 24-26 November 2025, Direktorat PPIBM telah melaksanakan Audit Eksternal sebagai rangkaian terakhir pelaksanaan kegiatan Audit *Surveillance* II dalam rangka mempertahankan tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), di mana sebelumnya Direktorat PPIBM telah berhasil memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada tanggal 29 November 2023 dan telah mempertahankan tersertifikasinya SNI ISO 37001:2016 SMAP pada tahun 2024.

2. IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Realisasi/capaian IKK didapatkan nilai sebesar **118,00%** sehingga menghasilkan capaian kinerja **118,00%**. Realisasi tersebut didapatkan dari perhitungan indikator komposit sebagai berikut:

- a. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Bina Marga yang disusun dibandingkan dengan target, memiliki bobot 40,00% dengan capaian 40,00%. Adapun faktor keberhasilan dari indikator ini adalah:
 - 1) Penyusunan Rencana Aksi dan Rencana Kerja tahunan yang diselaraskan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2025.
 - 2) Direktorat PPIBM secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala mulai dari mingguan, bulanan, hingga triwulanan.
- b. Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga pada Tahap Penyiapan dan Siap Dikerjasamakan dibandingkan dengan target, memiliki bobot 60% dengan capaian 78,00%. Adapun faktor keberhasilan dari indikator ini adalah:
 - 1) Capaian Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga mempunyai target 1 namun menghasilkan 2 dokumen yaitu Reviu Studi Kelayakan Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan-Soka-Mengwi) beserta *basic* designnya.
 - 2) Pada indikator ini ditetapkan sebanyak 9 proyek penyiapan dan 1 proyek siap dikerjasamakan sebagai target pencapaian kinerja, akan tetapi Direktorat PPIBM berhasil mencapai 12 proyek pada tahap penyiapan dan 1 proyek pada tahap transaksi/siap dikerjasamakan. Proyek-proyek yang menjadi bagian dari pencapaian kinerja pada indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3. 17 Proyek KPBU Bina Marga Tahap Penyiapan dan Siap Dikerjasamakan

	TARGET		REALISASI		
Jumlah Proyek	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp Juta)	Jumlah Proyek	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp Juta)
Penyiapan					
9	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan - Soka - Mengwi)	11.040.000	12	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan - Soka - Mengwi)	11.040.000
	Jalan Tol Pejagan - Cilacap	24.790.000		Jalan Tol Pejagan - Cilacap	24.790.000
	Bandung Inter Urban Toll Road	10.130.000		Bandung Inter Urban Toll Road	10.130.000
	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	5.473.000		Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	5.473.000
	Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin)	8.083.000		Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin)	8.083.000
	Jalan Tol Bitung - Serpong	7.814.000		Jalan Tol Bitung - Serpong	7.814.000
	Jalan Tol Pluit Bandara (bagian dari Jalan Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	12.835.000		Jalan Tol Pluit Bandara (bagian dari Jalan Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	12.835.000
	Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta	3.494.000		Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta	3.494.000
	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya	29.480.000		Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya	29.480.000
				Jalan Tol Layang Cikunir - Karawaci	26.150.000
				Jalan Tol Semarang Harbour (Semarang - Kendal)	13.350.000
				Jalan Tol Semanan - Balaraja	15.520.000
Transaksi/Siap Dikerjasamakan					
1	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat	36.580.000	1	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat	36.580.000
	Total Investasi	149.719.000		Total Investasi	204.739.000

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PPIBM Tahun 2025

3.2.3.9 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja Tahun 2025, realisasi atau capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya (PPICK) menunjukkan seluruhnya sudah melampaui target yang ditetapkan. Seluruh indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tercapai dengan nilai kinerja di atas 100%

sehingga termasuk ke dalam kategori **Istimewa**. Hal tersebut mencerminkan konsistensi pelaksanaan kegiatan di Direktorat PPICK sesuai rencana. Adapun rincian capaian IKK Direktorat PPICK dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Direktorat PPICK

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KINERJA
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	72,50%	79,51%	109,67%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	100,00%	104,00%	104,00%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek	103,33%

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat PPICK TA 2025 Nomor PR0101/B/Pc/2026/1

Berdasarkan Tabel 3.18 capaian IKK Direktorat PPICK adalah sebagai berikut:

1. IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Capaian kinerja pada indikator ini menunjukkan hasil sebesar 109,67% dengan kategori **Istimewa**, yang berasal dari realisasi 79,51% terhadap target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 72,50%. Pencapaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan dukungan manajemen telah berjalan dengan efektif serta melampaui standar yang ditetapkan.

2. IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Pada IKK ini ditetapkan target kinerja sebesar 100%, dan pelaksanaannya menghasilkan realisasi sebesar 104%, sehingga didapatkan capaian kinerja 104,00% dengan kategori **Istimewa**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses penyiapan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur telah dilaksanakan melampaui target yang direncanakan.

3. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan

Pada indikator ini, target yang ditetapkan adalah 1 proyek, dan realisasinya juga mencapai 1 proyek, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 103,33%



dengan kategori **Istimewa**. Perhitungan capaian kinerja tersebut tidak hanya diukur dari tercapainya proyek KPBU saja tetapi juga mempertimbangkan komponen anggaran dan kegiatan.

3.2.3.10 Analisis Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PPICK pada Tahun 2025 telah tercapai dan berada di atas 100,00% sehingga seluruhnya termasuk dalam kategori **Istimewa**. Hasil ini diperoleh karena pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga nilai indikator kinerja mampu memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selanjutnya, analisis capaian IKK Direktorat PPICK disajikan berdasarkan indikator komposit yang mendukung pencapaian tersebut.

1. IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Keberhasilan realisasi/capaian pada IKK ini dipengaruhi oleh faktor ketercapaian nilai Kearsipan, AKIP, Transformasi Digital, dan Manajemen Risiko dengan rata-rata di atas 80, selain itu adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan, dan deviasi positif pada kegiatan operasional turut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKK. Adapun nilai setiap indikator kompositnya adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum memiliki bobot 20% dengan nilai 85,92.
- b. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu memiliki bobot 20% dengan realisasi berdasar rincian output 105,00%.
- c. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB memiliki bobot 20% dengan nilai 86,40.
- d. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN memiliki bobot 20% dengan nilai 97,00.
- e. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 memiliki bobot 20% dengan nilai 86,04.

2. IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Keberhasilan realisasi/capaian pada IKK ini dipengaruhi oleh adanya perbaikan tata kelola fasilitasi kepada Pemda, perbaikan kualitas *monitoring* dan evaluasi, koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Balikpapan, calon pemrakarsa, dan Unit Organisasi teknis terkait untuk mempercepat tahap evaluasi FS SPAM Balikpapan. Selain itu, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, dan deviasi positif realisasi keuangan pada RO Perencanaan, Identifikasi, *Monitoring* dan Evaluasi, serta Prastudi Kelayakan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKK. Berikut merupakan indikator komposit yang mendukung capaian IKK Direktorat PPICK:

- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Cipta Karya yang disusun dibandingkan dengan target, memiliki bobot 40% dengan realisasi sebesar 42,00%.
- Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya pada Tahap Penyiapan dibandingkan dengan target, memiliki bobot 60% dengan realisasi sebesar 62,00%. Tabel 3.19 merupakan daftar proyek penyiapan yang dihitung sebagai capaian indikator.

Tabel 3. 19 Proyek KPBU Sektor Cipta Karya pada Tahap Penyiapan

Jumlah Proyek	TARGET		Jumlah Proyek	REALISASI	
	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp Juta)		Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp Juta)
1	SPAM Kota Balikpapan	3.700.000	1	SPAM Kota Balikpapan	3.700.000
	Total Investasi	3.700.000		Total Investasi	3.700.000

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat PPICK TA 2025 Nomor PR0101/B/Pc/2026/1

3. IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan

Pada IKK ini hanya terdiri dari satu komposit indikator yaitu jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan dengan target 1 proyek. Realisasi pada IKK ini dihitung dari (Kinerja Anggaran + Kegiatan

+ Proyek)/3. Kinerja anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi pagu efektif TA 2025 dengan rencana penarikan dana (RPD) prognosis triwulan IV dengan rentang nilai kinerja sebagai berikut:

- Deviasi $-15\% \leq dv \leq -11\%$ Kinerja 90%
- Deviasi $-10\% \leq dv \leq -6\%$ Kinerja 95%
- Deviasi $-5\% \leq dv \leq 0\%$ Kinerja 100%
- Deviasi $+1\% \leq dv \leq +5\%$ Kinerja 105%
- Deviasi $+5\% \leq dv$ Kinerja 110%

Nilai capaian proyek pada tahap transaksi sebesar 100% jika target tercapai.

Dari tahapan perhitungan yang ada, didapatkan nilai sebesar 103,33% dengan bobot 100,00%. Oleh karena itu realisasi komposit indikator jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan adalah 103,33%. Besaran capaian ini dipengaruhi oleh faktor koordinasi intensif dengan Perumda Kerta Bali Saguna selaku PJKP Proyek SPAM Regional Ayung dan Unit Organisasi teknis di Kementerian PU sehingga proyek SPAM Regional Ayung dapat memulai tahap persiapan transaksi pada TA 2025. Selain itu, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, dan deviasi positif realisasi keuangan pada RO Proyek KPBK yang Siap Dikerjasamakan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKK. Perhitungan seluruh capaian tersebut didasarkan pada alokasi pagu efektif yang tersedia di tahun 2025. Adapun daftar proyek siap dikerjasamakan sebagai data capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.20

Tabel 3. 20 Proyek KPBK Sektor Air Minum yang Siap Dikerjasamakan

Jumlah Proyek	TARGET		Jumlah Proyek	REALISASI	
	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp Juta)		Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp Juta)
1	SPAM Regional Ayung I	1.500.000	1	SPAM Regional Ayung I	1.500.000
	Total Investasi	1.500.000		Total Investasi	1.500.000

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat PPICK TA 2025 Nomor PR0101/B/Pc/2026/1

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DJPI 2025–2029 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Pada tahun ini, Renstra DJPI 2025–2029 mulai diberlakukan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi. Meskipun perbandingan kinerja secara historis antar tahun belum sepenuhnya dapat dilakukan, analisis capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tetap penting untuk menilai tingkat pencapaian sasaran awal, mencatat kondisi kinerja pada awal periode, serta mengidentifikasi kegiatan atau program yang memerlukan penguatan ke depan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra. Pada subbab ini disajikan analisis perbandingan kinerja yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. Analisis perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir
2. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)
3. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024
4. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Unit Organisasi/Instansi Sejenis (*Benchmarking*)

Dengan menganalisis perbandingan kinerja organisasi dari berbagai aspek tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran utuh atas capaian, kemajuan dan hal-hal peningkatan organisasi. Hasil ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan dan rencana kerja di masa mendatang.

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama dalam periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, sehingga analisis perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dilakukan secara langsung. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya perubahan pada indikator kinerja, pembobotan, serta metode pengukuran yang digunakan. Meskipun bagian ini dimaksudkan untuk



menyajikan perbandingan kinerja dalam kurun waktu lima tahun, keterbatasan komparabilitas pada tahun awal Renstra menyebabkan analisis perbandingan kinerja belum sepenuhnya dapat disajikan. Sebagai gambaran, pada Renstra 2020–2024 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menetapkan 3 Indikator Kinerja Program (IKP), sedangkan pada Renstra 2025–2029 berkurang menjadi 2 IKP dengan metode perhitungan yang berbeda.

Perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program DJPI tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya terhadap target PK dapat dilihat pada Tabel 3.21.

Tabel 3. 21 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program DJPI 2020-2024 terhadap PK

Program/Sasaran Program/Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN CIPTA KARYA															
SS. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Cipta Karya yang Layak, Aman, dan Terjangkau															
IKSS. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	56,86	56,66	99,65	57,46	57,09	99,36	58,02	57,73	99,50	59,05	58,99	99,90	59,79	59,74	99,92
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Cipta Karya yang Layak dan Aman															
IKSP. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	100,00	70,88	70,88	100,00	80,37	80,37	100,00	95,06	95,06	100,00	235,57	235,57	100,00	200,06	200,06
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN															
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															
IKSS. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	72,39	79,20	109,40	75,61	77,93	103,07	77,97	80,66	103,45	84,50	85,37	101,03	87,8	87,86	100
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya															
IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	55,92	55,50	99,25							87,81	99,37	113,16	99,37	99,96	100,59
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00	116,88	116,88	100,00	111,01	111,01	100,00	107,57	107,57	100,00	116,75	116,75	100,00	163,47	163,47
IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00	98,93	98,93	100,00	61,60	61,60	100,00	102,37	102,37	100,00	98,95	98,95	100,00	99,33	99,33

Keterangan: IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya tidak tercantum pada PK DJPI Tahun 2020-2021, namun tetap terlaporkan dalam Laporan Kinerja

Sumber: Laporan Kinerja DJPI 2024

Tabel 3. 22 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program DJPI 2025 terhadap PK

Program/Sasaran Program/Indikator	2025		
	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS. Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00	110,96	110,96
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	86,81	93,41	107,61
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur PU yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00	100,00	102,59

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja DJPI PU TA 2025 Nomor PR0303/T/Dp/2026/1

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja pada Tabel 4.22, penjelasan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya, IKSS tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif pada Tahun 2025 mencatat kinerja sebesar 110,96% dan termasuk dalam kategori Istimewa. Meskipun capaian indikator ini relatif lebih rendah dibandingkan indikator lain pada sasaran yang sama, nilai kinerja tersebut tetap menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terlampaui secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan infrastruktur telah berjalan efektif sejak awal periode Renstra 2025–2029.
2. IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI) pada Tahun 2025 mencapai kinerja sebesar 107,61%. Jika dibandingkan dengan indikator sejenis pada tabel historis, capaian ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun terakhir periode sebelumnya, serta menegaskan bahwa fungsi dukungan manajemen pada DJPI tetap berjalan optimal meskipun terjadi perubahan struktur indikator dan metode pengukuran pada Renstra baru.
3. ISKP Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur PU yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif pada Tahun 2025 mencapai kinerja sebesar 102,59%. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sebagian capaian pada periode 2020–2024 yang sempat

mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut mencerminkan adanya penguatan pada aspek kesiapan proyek KPBU serta dukungan kebijakan dan sistem pembiayaan pada awal pelaksanaan Renstra 2025–2029.

3.3.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Pada Renstra Kementerian PU yang sejalan dengan Renstra DJPI TA. 2025-2029 telah ditetapkan target pencapaian Sasaran Strategis dan Sasaran Program selama lima tahun ke depan. Capaian kinerja yang diraih pada tahun 2025 ini perlu dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Renstra untuk mengevaluasi sejauh mana sasaran program telah tercapai.

Tabel 3. 23 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program DJPI 2025 terhadap Renstra

Program/Sasaran Program/Indikator	2025			
	Target Renstra (%)	Target PK (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSS. Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00	100,00	110,96	110,96
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	86,81	86,81	93,41	107,61
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur PU yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00	100,00	100,00	102,59

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja DJPI PU TA 2025 Nomor PR0303/T/Dp/2026/1

Perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.23. Berdasarkan tabel tersebut, seluruh target perjanjian kinerja sudah sesuai dengan target pada renstra Kementerian PU maupun DJPI. Angka target PK pada Tabel 3.23 didapatkan dari PK akhir Kementerian PU yang dan PK akhir DJPI yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2025.

3.3.3 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMN Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu lima tahunan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 memuat Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga



dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam RPJMN telah ditetapkan sasaran, target, dan kerangka regulasi serta pendanaan untuk masing-masing Kementerian dan Lembaga. Oleh karena itu, sangat penting bagi Unit Organisasi di Kementerian/Lembaga untuk melakukan perbandingan capaian kinerja tahunan dengan target yang tertuang dalam dokumen RPJMN. Perbandingan kinerja ini bertujuan untuk memantau apakah pencapaian kinerja organisasi telah sesuai dengan target rencana pembangunan nasional. Selain itu, hasil perbandingan juga dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan perencanaan dan optimalisasi kinerja di tahun berikutnya agar selaras dengan target RPJMN. Dengan demikian, perbandingan capaian kinerja unit organisasi terhadap target RPJMN menjadi sangat penting dilakukan sebagai bentuk sinergi dan kontribusi nyata terhadap pencapaian rencana pembangunan lima tahunan.

Dalam mendukung target RPJMN 2025-2029 sebagaimana tertuang pada matriks pembangunan RPJMN tahun 2025-2029, DJPI berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Indikator Program Prioritas Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan (kumulatif). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menetapkan target pengembangan proyek pembiayaan kreatif pada sektor air minum yang siap untuk dikerjasamakan hingga tahun 2029 sebanyak 5 proyek. Dalam kerangka target tahunan, RPJMN menetapkan sasaran 2 proyek pada Tahun 2025. Namun demikian, sebagai dampak penerapan kebijakan efisiensi anggaran, realisasi capaian pada Tahun 2025 terbatas pada 1 proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum, yaitu SPAM Regional Ayung. Meskipun demikian, target kumulatif jangka menengah hingga tahun 2029 tetap mengacu pada ketentuan RPJMN, yaitu 13 proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan.

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.12.07 - Jumlah NSPK air minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	2	9
KP 02.12.07 - Jumlah NSPK air limbah domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	1	5
KP 02.12.08 - Jumlah proyek yang mendapatkan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0	4
KP 02.12.08 - Jumlah proyek pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan air limbah domestik (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0	5
KP 02.12.08 - Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	8	10	13
KP 02.12.08 - Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0	2
KP 02.12.09 - Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	ha (kumulatif)	3.577 (2020-2024)	200	5.000
KP 02.12.09 - Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa	m3/detik (kumulatif)	2,98 (2020-2024)	0,7	8,82
KP 02.12.09 - Akses air minum jaringan perpipaan di Pesisir Utara Jawa	persen	30	31,5	41
KP 02.12.09 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik di Pesisir Utara Jawa	kab/kota (kumulatif)	32	32	43
KP 02.18.02 - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)

Gambar 3. 1 Data RPJMN

Sumber: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2025

Proyek SPAM Regional Ayung memiliki nilai investasi sebesar Rp1.500.000.000.000. Status proyek saat ini berada pada tahap Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Persiapan Transaksi, salah satu *milestone* yang sedang dilaksanakan adalah penyusunan Nota Kesepakatan dan/atau Nota Kesepahaman. Hingga periode pelaporan, dokumen Nota Kesepakatan tersebut belum ditandatangani, dan masih dilakukan koordinasi dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota terkait. Dalam pelaksanaannya, terdapat isu bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten belum sepakat untuk menyerap air dari SPAM Regional Ayung. Menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan sinkronisasi rencana penyerapan air proyek dengan rencana bisnis dari masing-masing *offtaker*, serta perhatian khusus terhadap penetapan tarif dan kesepakatan alokasi air baku.

Milestone berikutnya adalah penetapan sumber air baku dan lokasi Izin Pengusahaan Air (IPA). Pada tahap ini, PJPk telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) pada tanggal 21 Mei 2025 terkait pemindahan lokasi IPA. Progres teknis menunjukkan bahwa rencana pengambilan air baku dilakukan melalui intake tahap I dengan kapasitas 550 liter per detik dari Bendung Sungai Ayung yang berlokasi dekat dengan IPA di Desa Petang, sesuai dengan rencana alternatif yang disusun oleh konsorsium pemrakarsa. Namun demikian, terdapat isu proyek berupa usulan pengambilan air baku oleh Ditjen SDA yang belum dapat dilaksanakan, sehingga alternatif pengambilan air dilakukan di bendung sungai. Selain itu, konsorsium belum menyelesaikan detail desain intake

Bendung Sungai Ayung dengan kapasitas 1.750 liter per detik sebagaimana hasil studi kelayakan yang telah disetujui oleh PJPK, yang diperlukan sebagai dasar pengajuan IP SDA kepada Ditjen SDA. Sebagai tindak lanjut, PJPK melakukan koordinasi dengan konsorsium untuk memperoleh kepastian desain sebelum dilakukan pengajuan IP SDA.

3.3.4 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Unit Organisasi/Instansi Sejenis (*Benchmarking*)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJPI, analisis perbandingan (*benchmarking*) capaian kinerja dengan Unit Organisasi/Instansi yang memiliki kesamaan Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), maupun Sasaran Kegiatan (SK) perlu dilakukan. Melalui perbandingan ini, capaian dan praktik terbaik dari Unit Organisasi/Instansi pembanding dapat diadaptasi dan diterapkan dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam hal ini DJPI melakukan perbandingan kinerja (*benchmarking*) kepada:

1. Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM), Kementerian Pekerjaan Umum.

Perbandingan kinerja dilakukan terhadap DJBM, karena DJPI dan DJBM sama-sama memiliki peran dalam pencapaian SS-6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya melalui IKSS-1 Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU. *Benchmarking* dilakukan terhadap IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI) dan IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM). Perbedaan sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.24.

Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja DJPI terhadap DJBM

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Unit Organisasi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya						
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	DJPI	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	86,81	93,41	107,61
		DJBM	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)	86,60	88,27	101,93

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja DJPI PU TA 2025 Nomor PR0303/T/Dp/2026/1, Laporan Kinerja DJBM Tahun 2025

Berdasarkan Tabel.24 pada Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya, capaian indikator pada DJPI menunjukkan kinerja **107,61%** (realisasi 93,41% terhadap target 86,81%) dan termasuk dalam kategori **Istimewa**. Sementara itu, DJBM mencapai kinerja 101,93%. Secara komparatif, DJPI memiliki kinerja lebih tinggi dibanding DJBM, terutama dari sisi realisasi dan besaran pelampauan target. Meskipun demikian kedua unit organisasi ini telah mencapai kinerja yang baik. Untuk mendapatkan kinerja tersebut, DJPI dan DJBM menggunakan metode perhitungan kinerja yang sama, sehingga perbedaan capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh jumlah dan komposisi indikator kontributor dalam perhitungan. DJPI didukung oleh 10 indikator kontributor yaitu Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan, Tingkat Pengelolaan BMN, Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum, Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana, Nilai layanan keuangan, Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP, Nilai SAKIP, Tingkat Layanan Komunikasi Publik, Transformasi Digital Unit Organisasi, dan Tingkat Kepatuhan Intern Unit Organisasi dengan bobot masing-masing 10,00%, sedangkan DJBM memiliki 6 indikator kontributor yaitu Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan, Tingkat Pengelolaan BMN, Tingkat layanan pembentukan produk hukum, Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana, Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI, dan Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik dengan bobot yang bervariasi pada setiap indikator.

2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan.

Perbandingan capaian dilakukan terhadap Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan karena memiliki peran strategis di bidang pembiayaan infrastruktur melalui KPBU dan/atau pembiayaan kreatif lainnya. Dalam hal ini, capaian yang akan dibandingkan adalah capaian kinerja KPBU. Perbandingan dilakukan berdasarkan capaian kinerja KPBU DJPI tahun 2025 dengan capaian DJPPR tahun 2024.



Tabel 3. 25 Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja KPBU Kementerian PU dengan Kementerian Keuangan

 Kementerian PU	 Kementerian Keuangan
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya Indikator Kinerja: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif	Sasaran Strategis: Kerja sama kelembagaan, pengembangan instrumen dan skema pembiayaan yang efektif dan produktif
Sasaran Program (DJPI) Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya Indikator Kinerja: 1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	Indikator Kinerja Utama DJPPR: 1. Tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya 2. Tingkat Keberhasilan Negosiasi Dan Kerja sama Kelembagaan

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja DJPI PU TA 2025 Nomor PR0303/T/Dp/2026/1, Laporan Kinerja DJPPR, Kementerian Keuangan 2024

Capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi Kementerian PU dihitung berdasarkan nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan dari proyek sektor SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap penyiapan dan transaksi pada tahun berjalan) yang dibobotkan pada setiap

tahapannya lalu dibandingkan dengan target selanjutnya realisasi ditambah dengan perhitungan survei.

Capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan pembiayaan infrastruktur SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap penyiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan/lelang pada tahun berjalan) yang dibobotkan berdasar tahapan setiap proyek lalu dibandingkan dengan target selanjutnya realisasi ditambah dengan perhitungan survei.

Pada DJPPR, IKU yang berkaitan dengan KPBU yaitu tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya yang dalam hal ini akan dibandingkan dengan indikator kinerja DJPI. Indeks pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali adalah indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya adalah untuk mengukur upaya organisasi dalam mengembangkan instrumen/skema baru pembiayaan dan pembiayaan kreatif lainnya. Komponen perhitungan yang digunakan pada indikator tersebut adalah SDG Bond Ritel; Green Sukuk seri PBSG001, ST012T4, ST013T4, SW007, SW008, SWR005, Global Green Sukuk; dan Skema KPBU pembiayaan Bandara Singkawang.

Perbandingan capaian kinerja KPBU antara DJPI dengan DJPPR dapat dilihat pada Tabel 3.26.

Tabel 3. 26 Perbandingan Capaian Kinerja terkait KPBU antara DJPI dengan DJPPR

Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
DJPI			
Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan	100,00	102,59	102,59

Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif			
Capaian Proyek KPBU Tahap Penyiapan = 16 Proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp186,48 Triliun Capaian Proyek KPBU Tahap Transaksi = 5 Proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp39,31 Triliun			
DJPPR			
Tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya	100,00	113,33	113,33
Capaian Proyek KPBU Tahap Transaksi = 1 Proyek dan nilai investasi sebesar Rp28,186 Triliun			

Sumber: Berita Acara Capaian Kinerja DJPI PU TA 2025 Nomor PR0303/T/Dp/2026/1, Laporan Kinerja DJPPR, Kementerian Keuangan Tahun 2024

Mengacu pada perbandingan kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.26, capaian kinerja KPBU DJPI tercatat lebih rendah dibandingkan dengan DJPPR, namun tetap berada pada kategori kinerja yang baik. Di sisi lain, tingginya capaian kinerja DJPPR sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kinerja KPBU secara langsung. Hal ini disebabkan oleh komponen penyusun nilai capaian DJPPR yang tidak seluruhnya berhubungan langsung dengan pelaksanaan KPBU, berbeda dengan indikator kinerja pada DJPI yang secara spesifik merepresentasikan kinerja KPBU.

Apabila capaian tersebut dilihat dari jumlah proyek dan nilai investasi, DJPI lebih tinggi daripada DJPPR, yaitu berhasil mencapai 21 proyek penyiapan dan transaksi senilai Rp225,78 Triliun yang apabila dibobotkan pada setiap tahapannya memiliki nilai investasi sebesar Rp194,11 Triliun. Sementara DJPPR hanya 1 proyek pada tahap transaksi dan nilai investasi Rp28,186 Triliun.

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk angka serta satuan moneter, yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga pada suatu periode anggaran tertentu. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja program dan kegiatan. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan



peraturan perundang-undangan, serta mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan kinerja program, karena memberikan gambaran mengenai tingkat penyerapan anggaran dan kesesuaiannya dengan perencanaan yang telah disusun. Melalui analisis realisasi anggaran secara tahunan, unit organisasi dapat mengidentifikasi tren capaian, pola penggunaan anggaran, serta potensi permasalahan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Analisis tersebut juga memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap keterkaitan antara alokasi anggaran dengan *output* dan *outcome* yang dihasilkan.

Hasil pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran selanjutnya menjadi dasar bagi pimpinan dan unit organisasi dalam merumuskan kebijakan serta langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Upaya perbaikan dapat diarahkan pada optimalisasi perencanaan, penguatan pengendalian pelaksanaan, serta peningkatan koordinasi antar unit organisasi. Selain itu, hasil analisis realisasi anggaran juga berperan penting sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan anggaran pada tahun berikutnya, sehingga perencanaan anggaran dapat disusun secara lebih realistis, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan serta target kinerja yang ingin dicapai.

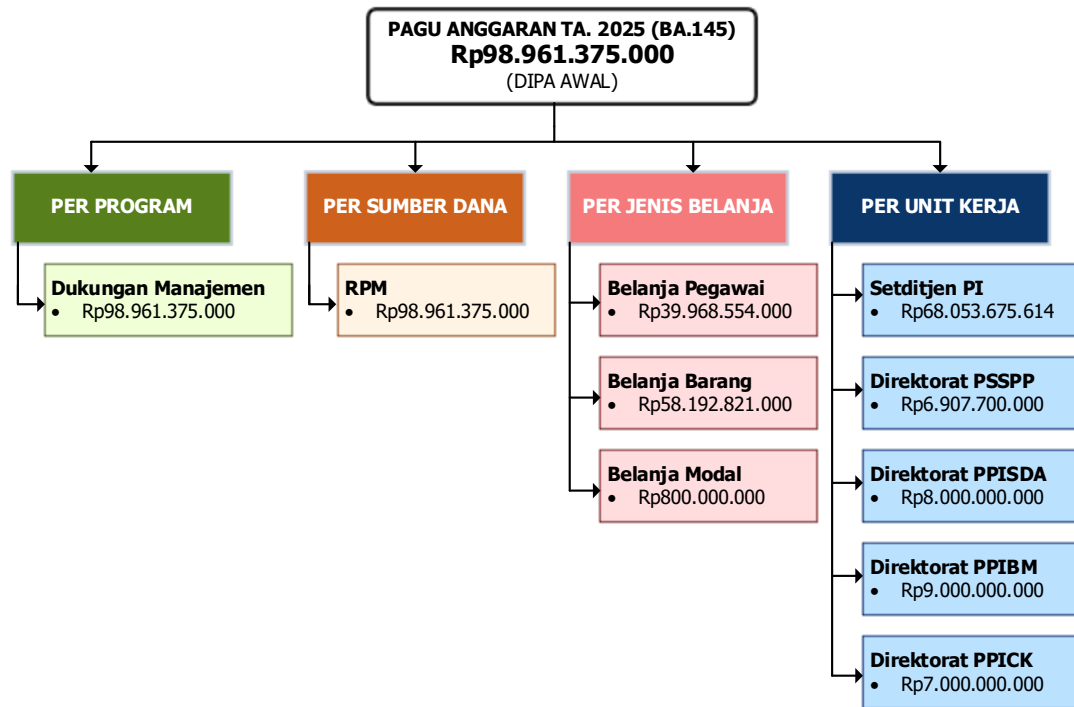
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Unit Organisasi mendapatkan alokasi anggaran dari APBN yang bersumber dari Rupiah Murni (RPM) pada Tahun 2025. Terdapat satu akun anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis 2025-2029, yakni BA.145.

Alokasi DIPA DJPI tahun 2025 merupakan dasar dalam penetapan perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan Menteri Pekerjaan Umum. BA.145 digunakan untuk membiayai satu program yaitu Program Dukungan Manajemen. Alokasi awal Pagu Anggaran BA.145 adalah sebesar Rp98.961.375.000 yang merupakan Rupiah Murni sedangkan pagu akhir BA.145 adalah sebesar Rp101.827.973.000. Berdasarkan kronologis anggaran DJPI tahun 2025, terdapat 7 (tujuh) kali revisi DIPA BA.145.

1. Revisi Pertama DIPA terbit pada tanggal 21 Februari 2025 dengan nomor: SP DIPA-145.08.1.694437/2025. Pada revisi DIPA pertama, pagu anggaran tetap sebesar Rp98.961.375.000. Revisi ini mencakup pencantuman blokir anggaran sebesar Rp31.599.260.000,00 pada halaman III DIPA sebagai tindak lanjut kebijakan pengendalian anggaran pemerintah.
2. Revisi kedua DIPA terbit pada tanggal 23 Maret 2025 dengan pagu anggaran tetap Rp98.961.375.000. Revisi ini dilakukan untuk pembukaan blokir anggaran sebesar Rp13.202.026.000,00, yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja pegawai, belanja operasional/layanan perkantoran minimum, serta pemenuhan belanja dasar lainnya guna mendukung kelancaran operasional DJPI.
3. DIPA Revisi-3 terbit pada tanggal 25 April 2025 dengan pagu anggaran tetap sebesar Rp98.961.375.000. Revisi ini mencakup pembukaan blokir anggaran sebesar Rp7.281.634.000,00, disertai dengan pencantuman/perubahan catatan pada halaman IV DIPA. Selain itu, dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan, antar KRO, dan antar RO, termasuk pergeseran anggaran belanja pegawai serta perubahan pada halaman III DIPA.
4. Revisi keempat DIPA terbit pada tanggal 16 Juli 2025 dengan pagu anggaran tetap sebesar Rp98.961.375.000. Revisi ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) agar pelaksanaan anggaran lebih selaras dengan kebutuhan riil dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
5. Revisi kelima DIPA terbit pada tanggal 4 Agustus 2025 dengan pagu anggaran tetap yaitu sebesar Rp98.961.375.000. Revisi ini dilakukan terkait penambahan dan pengurangan Rincian Output (RO) di lingkungan DJPI sebagai penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan.
6. Revisi keenam DIPA terbit pada tanggal 22 Oktober 2025 dengan pagu anggaran Rp101.827.973.000. Revisi ini mencakup penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp2.866.598.000,00 yang berasal dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Selain itu, dilakukan relaksasi pembukaan blokir periode I sebesar Rp3.000.000.000,00 serta perbaikan RPD dan penyesuaian pada halaman III DIPA.
7. Revisi ketujuh DIPA terbit pada tanggal 14 November 2025 dengan pagu tetap yaitu Rp101.827.973.000. Revisi ini mencakup penambahan anggaran belanja

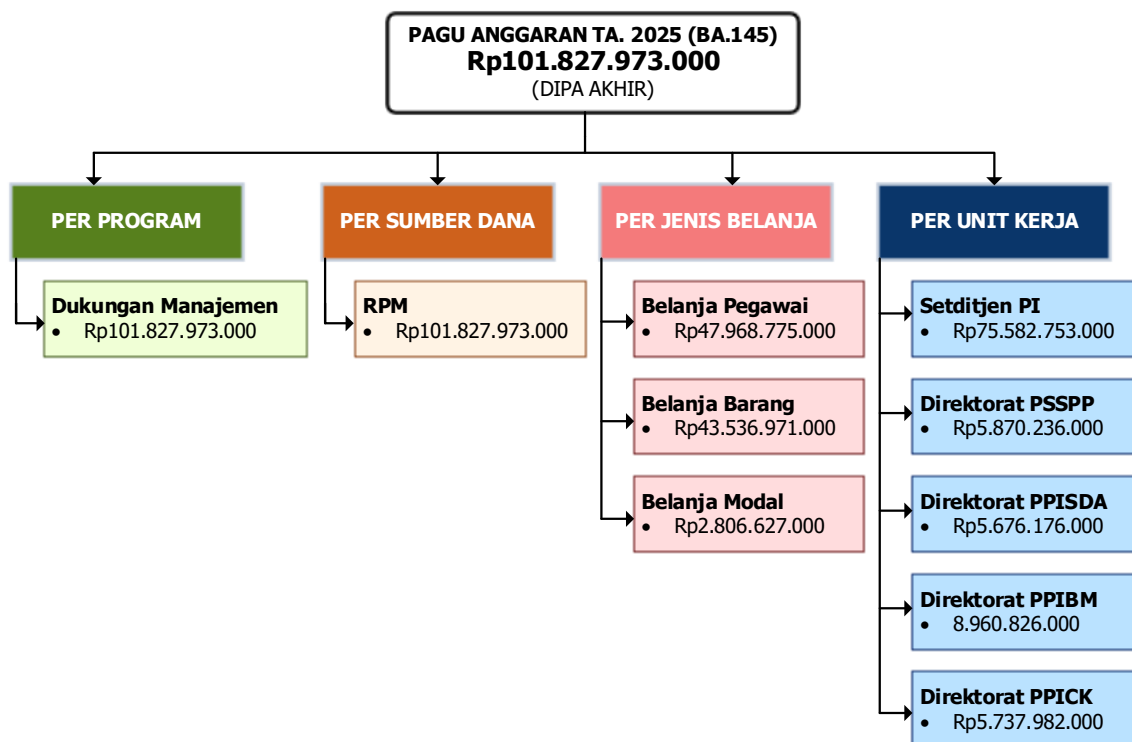
pegawai, pembukaan blokir lanjutan, pergeseran anggaran antar komponen, serta perbaikan RPD guna memastikan optimalisasi pelaksanaan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2025.



Gambar 3. 2 Pohon Anggaran Pagu Awal DJPI 2025

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pada Gambar 3.2, pagu indikatif anggaran tahun 2025 (BA 145) adalah sebesar Rp98.961.375.000. Anggaran tersebut kemudian di-*breakdown* dan dialokasikan kepada lima unit kerja di lingkungan DJPI.

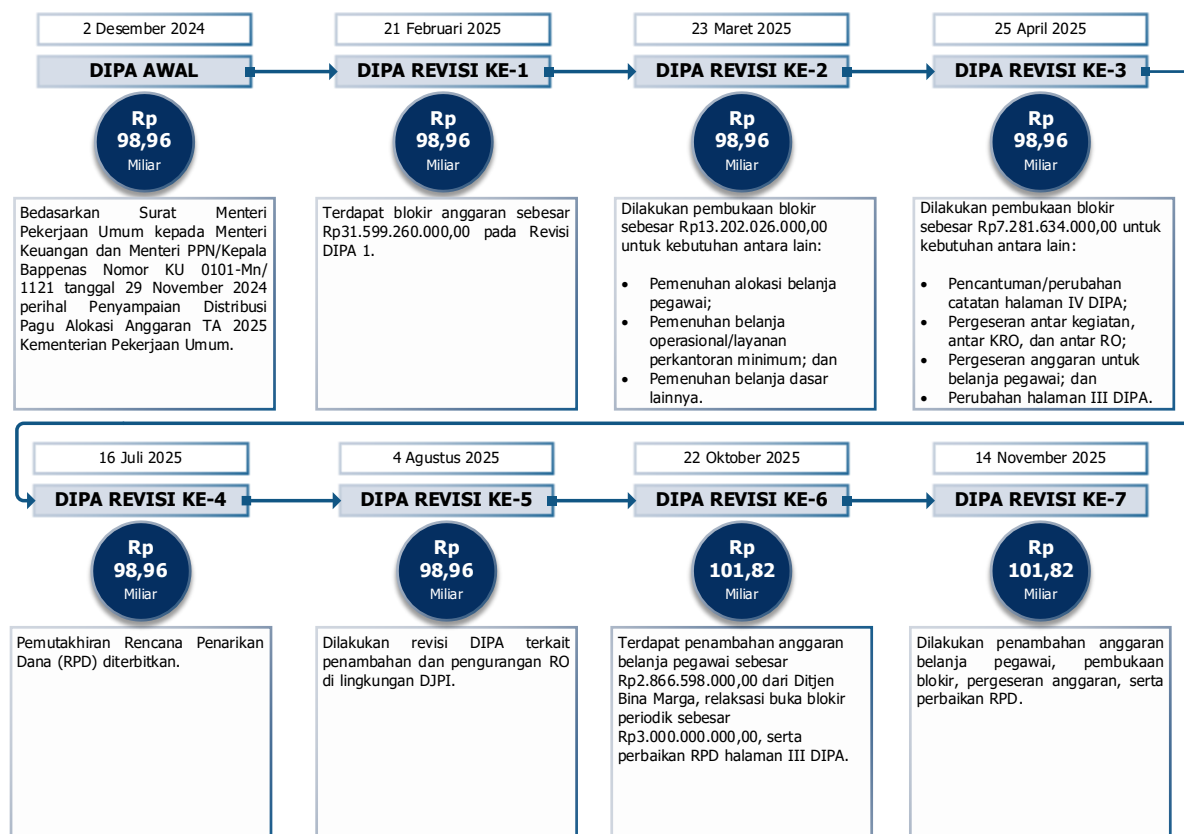


Gambar 3. 3 Pohon Anggaran Pagu Revisi DJPI 2025

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pada Gambar 3.3, pagu anggaran revisi tahun 2025 (BA 145) adalah sebesar Rp101.827.973.000. Anggaran tersebut kemudian di-*breakdown* dan dialokasikan kepada lima unit kerja di lingkungan DJPI.

Kronologis Revisi DIPA DJPI 2025 (BA 034) dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Kronologis Revisi DIPA DJPI 2024 (BA 033)
Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025

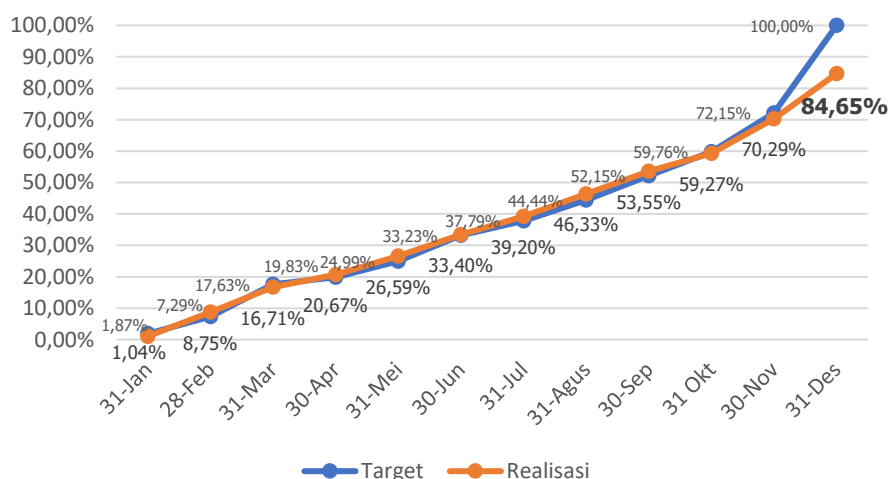
Pada subbab ini akan dijelaskan realisasi anggaran DJPI Tahun 2025 beserta analisisnya meliputi penyerapan anggaran pada masing-masing Unit Kerja, berdasarkan sumber dana, program, jenis belanja. Pada tahun 2025 DJPI hanya mengelola satu mata anggaran yaitu BA.145 yang digunakan untuk Program Dukungan Manajemen. Alokasi awal Pagu Anggaran DJPI tahun 2025 pada BA.145 adalah sebesar Rp98.961.375.000. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perubahan pagu anggaran yang disebabkan karena adanya beberapa hal berikut: (1) perubahan alokasi anggaran, (2) pergeseran dan perubahan antar kegiatan, antar KRO, antar RO, (3) penambahan anggaran, dan (4) perbaikan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Dengan demikian, pada akhir tahun 2025 total pagu anggaran DJPI pada BA.145 yaitu sebesar Rp101.827.973.000,00. Berdasarkan data *ie-Monitoring*

Kementerian PUPR yang dapat diakses pada <https://iemon.pu.go.id>, realisasi anggaran DJPI tahun 2025 sebesar **Rp86.195.367.000,00** atau setara **84,65%**. Capaian ini menunjukkan kinerja DJPI yang cukup baik dalam mengeksekusi anggaran yang telah dialokasikan. Meskipun demikian, masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp15.632.606.000,00 (-15,35%). Deviasi tersebut disebabkan karena:

1. Terdapat pagu blokir sebesar Rp7.515.600.000,00.
2. Terdapat beberapa paket kegiatan yang realisasi anggaran di bawah 90%.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran DJPI tahun 2025 sudah cukup optimal. Persentase realisasi keuangan terhadap pagu total mencapai 84,65% sedangkan persentase terhadap pagu efektif adalah 91,39%. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya untuk memaksimalkan anggaran yang telah dialokasikan agar dapat diserap dan dieksekusi dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Perbandingan rencana dan realisasi anggaran tahun 2025 tiap bulan dapat dilihat pada Gambar 3.5. Sebagai catatan, realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dilaporkan berdasarkan data per tanggal 10 Januari 2026, mengingat batas akhir proses penginputan SPM TUP ditetapkan paling lambat pada tanggal tersebut.



Gambar 3. 5 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan

Sumber: <https://iemon.pu.go.id/> (status: 10 Januari 2026)

Berikut Penyerapan anggaran pada masing-masing Unit Kerja, berdasarkan sumber dana, program, dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tiap Unit Kerja

Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan DJPI dapat dilihat pada Tabel 3.27. Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja anggaran tertinggi berdasarkan pagu DIPA adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan kinerja 88,48% sedangkan berdasar pagu efektif Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dengan kinerja 99,89%. Adapun capaian kinerja terendah berdasarkan pagu DIPA adalah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya dengan kinerja 71,58% sedangkan berdasar pagu efektif adalah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga dengan kinerja 84,35%. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga memiliki dana sisa lelang sebesar Rp795.999.000 pada paket kegiatan Reviu Studi Kelayakan Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan – Soka - Mengwi) yang saat ini sedang dalam proses pembayaran dari RPATA ke rekening penyedia.

Tabel 3. 27 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tiap Unit Kerja di lingkungan DJPI

NO	UNIT KERJA	PAGU DIPA (Rp Ribu)	PAGU EFEKTIF (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	KEUANGAN (%)			FISIK (%)		
					RN	RL (Pagu DIPA)	RL (Pagu Efektif)	RN	RL	KINERJA
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	75.582.753	73.679.911	66.875.167	100	88,48	90,76	100	100	100
2.	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	5.870.236	4.231.778	4.227.059	100	72,01	99,89	100	100	100
3.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	5.676.176	4.320.477	4.285.552	100	75,50	99,19	100	100	100
4.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	8.960.826	7.943.497	6.700.316	100	74,77	84,35	100	100	100
5.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	5.737.982	4.136.710	4.107.273	100	71,58	99,29	100	100	100

NO	UNIT KERJA	PAGU DIPA (Rp Ribu)	PAGU EFEKTIF (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	KEUANGAN (%)			FISIK (%)		
					RN	RL (Pagu DIPA)	RL (Pagu Efektif)	RN	RL	KINERJA
	Total	101.827.973	94.312.373	86.195.367	100	84,65	91,39	100	100	100

Sumber: <https://iemon.pu.go.id/> (status: 10 Januari 2026)

2. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber dana DJPI pada tahun 2025 berasal dari RPM (Rupiah Murni). Realisasi anggaran di DJPI berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Kinerja (%)	
			Keu	Fis
RPM	101.827.973	86.195.367	84,65	98,46
Total	101.827.973	86.195.367	84,65	98,46

Sumber: <https://iemon.pu.go.id/> (status: 10 Januari 2026)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran dari RPM adalah 84,65%. Hal ini mengindikasikan masih terdapat sisa anggaran RPM yang belum terserap yaitu sebanyak Rp15.632.606.000 dengan deviasi sebesar 15,35%.

3. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Program

Berdasarkan data pada tabel 3.29, dapat diketahui bahwa realisasi keuangan DJPI Tahun Anggaran 2025, baik terhadap pagu DIPA maupun pagu efektif, belum sepenuhnya mencapai target yang telah direncanakan. Realisasi keuangan Program Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki capaian 87,53% terhadap pagu DIPA dan 90,88% terhadap pagu efektif, sedangkan Program Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mencapai 73,52% terhadap pagu DIPA dan 99,88% terhadap pagu efektif. Adapun realisasi keuangan Program Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki capaian 75,63% terhadap pagu DIPA dan 91,73% terhadap pagu efektif.

Pada sisi realisasi fisik, seluruh kegiatan di lingkungan DJPI telah mencapai target yang direncanakan dengan kinerja sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana setelah dilakukan penyesuaian anggaran.

Secara keseluruhan, capaian realisasi keuangan dan fisik kegiatan DJPI hingga Desember 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan optimalisasi penyerapan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran, disertai analisis atas potensi risiko dan hambatan pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah korektif dan strategi optimalisasi agar pencapaian kinerja pada periode berikutnya dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien.

Tabel 3. 29 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Program

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp Ribu)	PAGU EFEKTIF (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	KEUANGAN (%)			FISIK (%)		
						RN	RL (Pagu DIPA)	RL (Pagu Efektif)	RN	RL	KINERJA
1	WA	Program Dukungan Manajemen	101.827.973	94.312.373	86.195.367	100	84,65	91,39	100	100	100
1	7764	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	78.125.339	75.239.651	68.380.950	100	87,53	90,88	100	100	100
2	7765	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	5.315.396	3.912.306	3.907.631	100	73,52	99,88	100	100	100
3	7766	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	18.387.238	15.160.416	13.906.786	100	75,63	91,73	100	100	100
TOTAL			101.827.973	94.312.373	86.195.367	100	84,65	91,39	100	100	100

Sumber: <https://iemon.pu.go.id/> (status: 10 Januari 2026)

4. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran pada tahun 2025 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.30. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2025 tertinggi ada pada jenis belanja modal dengan mencapai 99,88%, diikuti belanja barang sebesar 92,73%, dan realisasi terendah yaitu belanja pegawai sebesar 89,69%.

Tabel 3. 30 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun 2025		
	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Kinerja (%)
Belanja Pegawai	47.968.775	43.022.360	89,69
Belanja Barang	43.536.971	40.369.715	92,73
Belanja Modal	2.806.627	2.803.292	99,88
Total	94.312.373	86.195.367	91,39

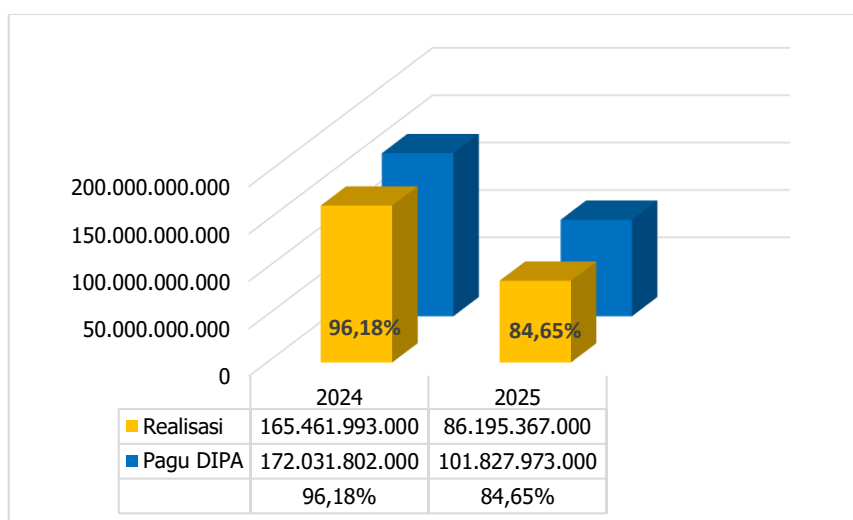
Sumber: <https://iemon.pu.go.id/> (status: 10 Januari 2026)

Pada triwulan II terdapat penambahan pegawai yaitu CPNS dan PPPK sehingga terjadi penambahan anggaran belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan. Meskipun begitu pemanfaatan anggaran pada belanja pegawai masih belum optimal dikarenakan beberapa hal yaitu: (1) Satuan Kerja belum secara optimal mampu memperkirakan dampak perubahan kebijakan perpajakan dengan penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sehingga terdapat kelebihan alokasi anggaran Belanja Tunjangan PPh PNS, (2) Mutasi pegawai keluar dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sepanjang tahun anggaran berjalan. Kondisi tersebut secara langsung mengurangi kebutuhan riil pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan kinerja, (3) Terdapat pegawai yang memasuki masa purnabakti. Selain itu, terdapat 2 (dua) orang pegawai yang diberhentikan dari jabatannya sebagai PNS dan PPPK di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, (4) Terdapat pegawai yang tidak dibayarkan tunjangan kinerjanya sejak Oktober 2025 dikarenakan tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 an. Ahmad Muhaji, serta (5) Sebagaimana arahan Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana terkait tambahan alokasi belanja pegawai, untuk PPPK dialokasikan 81 (delapan

puluh satu) orang PPPK namun terkontrak sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang dan 91 (sembilan puluh satu) orang CPNS namun dalam realisasinya jumlah pegawai yang benar-benar diterima dan dibayarkan gajinya hanya 47 (empat puluh tujuh) orang CPNS.

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Anggaran merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di suatu institusi. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran perlu dilakukan secara berkala. Salah satu bentuk analisis yang penting dilakukan adalah perbandingan realisasi anggaran tahun berjalan (2025) dengan tahun sebelumnya. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat apakah terdapat peningkatan, penurunan, atau stagnasi dalam hal penyerapan anggaran. Selain itu, dapat diketahui apakah alokasi anggaran sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan. Hasil analisis ini selanjutnya dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam perencanaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, diharapkan organisasi dapat meningkatkan kinerjanya secara bertahap dan berkelanjutan. Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3. 6 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pagu anggaran DJPI tahun 2025 sebesar Rp101 Miliar, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp172 Miliar. Terjadi penurunan sebesar Rp70 Miliar. Meskipun pagu anggaran turun signifikan, persentase realisasi anggaran DJPI tahun 2025 lebih rendah dibanding tahun 2024, yaitu 84,65% pada tahun 2025 dan 96,18% di tahun 2024. Persentase realisasi anggaran DJPI tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024 dikarenakan adanya pagu blokir sebesar Rp7.515.600.000,00 pada tahun 2025. Apabila dihitung persentase realisasi anggaran dengan pagu efektif akan didapatkan capaian sebesar 91,39%.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) telah menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun pengelolaan anggaran. Penerapan prinsip tersebut didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, meliputi 344 pegawai, 2518 unit sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran sebesar Rp101.827.973.000,00. Pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Tabel 3. 31 Perbandingan Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 dan 2025

Sumber Daya	2024	2025
Sumber Daya Manusia (orang)	424	344
Sarana dan Prasarana (Unit)	4397	2518
Anggaran (Rp)	Rp172.031.802.000,00	Rp101.827.973.000,00

Sumber: Laporan Kinerja DJPI 2024, Hasil Analisis Tahun 2025

1. Efisiensi SDM

Dari aspek efisiensi sumber daya manusia, jumlah pegawai pada tahun 2025 berkurang menjadi 344 orang jika dibandingkan pada tahun 2024 yaitu 424 orang. Efisiensi ini dicapai melalui penataan kebutuhan pegawai, optimalisasi distribusi tugas, serta peningkatan pemanfaatan sistem digital dan teknologi informasi yang mendukung proses kerja. Dengan demikian, meskipun jumlah SDM menurun, pelaksanaan tugas dan fungsi DJPI tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas kinerja.



Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan pegawai ASN di DJPI pada tahun 2025 adalah sebanyak 601 orang. Namun, jumlah ASN (PNS dan PPPK) yang tersedia hanya 308 orang. Dalam rangka menutupi kekurangan tersebut, maka didukung oleh Tenaga Pendukung Individual sebanyak 36 orang. Total persentase pegawai ASN di DJPI saat ini jika dibandingkan dengan kebutuhan adalah sebesar 51,25%. Adapun jika dibandingkan antara jumlah pegawai DJPI dengan kebutuhan adalah sebesar 57,24%.

Meskipun jumlah pegawai yang ada di DJPI tidak sesuai dengan kebutuhan pada analisis beban kerja, DJPI mampu meraih capaian kinerja program yang cukup tinggi. Capaian kinerja IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif sebesar 102,59%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan upaya optimalisasi SDM dan anggaran yang dilakukan DJPI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Meskipun dengan keterbatasan sumber daya, DJPI mampu mencapai kinerja istimewa di atas target yang ditetapkan. Hal ini penting untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa mendatang.

2. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan DJPI pada tahun 2025 dilaksanakan melalui optimalisasi teknologi informasi dan digitalisasi proses kerja. Pelaksanaan rapat, koordinasi, dan pembahasan teknis semakin banyak dilakukan melalui media daring, seperti Zoom, Microsoft *Teams*, dan platform virtual lainnya. Pola kerja ini mampu mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan ruang rapat fisik, perjalanan dinas, serta sarana pendukung pertemuan lainnya, sehingga mendukung efisiensi penggunaan aset organisasi.

Selain itu, DJPI telah mengoptimalkan penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dalam seluruh proses administrasi dan persuratan. Pemanfaatan TNDE memungkinkan proses disposisi, persetujuan, dan pengarsipan dokumen dilakukan secara elektronik dan terintegrasi, sehingga mempercepat alur kerja, meningkatkan akurasi administrasi, serta mengurangi penggunaan kertas dan alat tulis kantor (ATK). Penerapan sistem ini tidak hanya



mendukung efisiensi sarana dan prasarana, tetapi juga sejalan dengan upaya transformasi digital dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan DJPI.

3. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan DJPI pada tahun 2025, realisasi keuangan terhadap pagu DIPA mencapai 84,65%, sedangkan terhadap pagu efektif mencapai 91,39%, dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dapat diselesaikan secara penuh meskipun realisasi keuangan tidak menyerap seluruh alokasi anggaran yang tersedia. Apabila dibandingkan antara realisasi fisik dan realisasi keuangan terhadap pagu DIPA, capaian tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 118,13%, yang mencerminkan penggunaan anggaran secara optimal dan berbasis hasil.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, di mana tingkat efisiensi anggaran tercatat sebesar 103,2%, maka efisiensi pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menandakan adanya perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan, sehingga penggunaan anggaran pada Tahun 2025 menunjukkan efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian output dan kinerja DJPI.

Sisa anggaran yang tidak terserap pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp15.632.606.000 atau 15,35% dari total pagu DIPA. Sisa anggaran tersebut mencerminkan adanya penghematan yang diperoleh melalui pengendalian biaya, penajaman prioritas kegiatan, serta optimalisasi metode pelaksanaan tanpa mengurangi kualitas output maupun pencapaian target kinerja DJPI.

3.6 Penghargaan Inovasi Atas Kinerja

1. Peringkat III Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Pekerjaan Umum Kategori Unit Organisasi

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memperoleh Peringkat III Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Pekerjaan Umum

Kategori Unit Organisasi pada tanggal 28 Oktober 2025. Pencapaian tersebut merupakan hasil penilaian pengawasan kearsipan internal yang dilakukan berdasarkan dua aspek penilaian yaitu aspek pengelolaan arsip dinamis dengan subaspek pengendalian naskah khusus setditjen, penciptaan arsip untuk seluruh unit kerja kecuali setditjen, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip; serta aspek sumber daya kearsipan dengan subaspek SDM kearsipan dan sarana prasarana kearsipan.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa masing-masing unit kerja di lingkungan DJPI memperoleh capaian yang baik. Setditjen PI memperoleh nilai 73 dengan kategori BB (Sangat Baik), Direktorat PSSPP memperoleh nilai 75,22 dengan kategori BB (Sangat Baik), Direktorat PPISDA memperoleh nilai 80,70 dengan kategori A (Memuaskan), Direktorat PPIBM memperoleh nilai 77,76 dengan kategori BB (Sangat Baik), serta Direktorat PPICK memperoleh nilai 83,82 dengan kategori A (Memuaskan). Capaian tersebut mencerminkan tertibnya pengelolaan arsip dan konsistensi penerapan tata kelola kearsipan di lingkungan DJPI.



Gambar 3. 7 Peringkat III Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Pekerjaan Umum Kategori Unit Organisasi

2. Juara I Transformasi Digital Tahun 2025 Kategori Unit Organisasi.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) meraih Juara I Transformasi Digital Tahun 2025 Kategori Unit Organisasi dengan nilai 97,73. Capaian tersebut merupakan hasil dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang konsisten dan terintegrasi di lingkungan DJPI, yang dibuktikan melalui keikutsertaan dan hasil penilaian Transformasi Digital Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Penilaian dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kriteria organisasi, proses, data, dan teknologi. Kriteria organisasi mencakup tata

kelola SPBE, dukungan anggaran, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kriteria proses meliputi pemanfaatan e-mail PU, *Workspace* Microsoft 365, Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), Tanda Tangan Elektronik (TTE), Aplikasi BRAVO, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kriteria data menilai tata kelola data serta distribusi dan publikasi data atau informasi, sedangkan kriteria teknologi mencakup ketersediaan internet, manajemen insiden infrastruktur jaringan, pengelolaan aset TIK, inovasi, dan keamanan informasi. Perolehan nilai 97,73 mencerminkan tingkat kematangan transformasi digital DJPI yang sangat baik, di mana pemanfaatan sistem dan aplikasi yang terintegrasi telah meningkatkan efisiensi proses kerja, memperkuat koordinasi lintas unit, serta mendukung transparansi dan pengawasan, sehingga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan.



No	Unit Organisasi	Nilai	Peringkat Terbaik
1	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	97.73	1
2	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	96.80	2
3	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	92.08	3
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90.25	4
5	Direktorat Jenderal Bina Marga	88.63	5

Keterangan:
 : Terbaik 1 Penilaian Transformasi Digital Tahun 2025 Kategori Unor setara Eselon I

Gambar 3. 8 Juara I Transformasi Digital Tahun 2025 Kategori Unit Organisasi

3. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Dalam rangka memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), unit kerja di DJPI telah melaksanakan Audit Surveillance SMAP ke-1 sebagai tindak lanjut atas keberhasilan perolehan Sertifikat SMAP SNI ISO 37001:2016 pada tahun 2024, serta pada tahun 2025 unit kerja di DJPI dinyatakan mampu mempertahankan kesesuaian penerapan SMAP dan direkomendasikan untuk melanjutkan Sertifikat SMAP SNI ISO 37001:2016. Adapun Setditjen PI, Direktorat PSSPP, Direktorat PPISDA, dan Direktorat PPPICK telah melaksanakan Audit Surveillance SMAP ke-1 sedangkan Direktorat PPIBM Audit Surveillance SMAP ke-2.



Gambar 3. 9 Sistem Manajemen Anti Penyuapan(SMAP)

3.7 Inovasi dan/atau Kinerja Lain

Inovasi atau kinerja lain yang dilakukan DJPI untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Proyek Sitinjau Lauik

Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pembangunan *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat pada Jumat, 21 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas pada ruas jalan nasional strategis. Penandatanganan perjanjian KPBU tersebut meliputi Perjanjian KPBU dan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) antara Direktur Jenderal Bina Marga dan Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik.



Selanjutnya, rangkaian penandatanganan akan dilengkapi dengan Perjanjian Penjaminan antara PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Utama Panorama Sitinjau Lauik, serta Perjanjian Regres antara Menteri Pekerjaan Umum dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero), yang direncanakan dilaksanakan pada pekan berikutnya.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa Proyek KPBU Pembangunan *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I) berlokasi pada tikungan Panorama I Jalan Nasional Ruas Batas Kota Padang–Simpang Lubuk Begalung. Ruas ini merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Solok serta berperan penting sebagai koridor logistik yang menghubungkan Kota Padang dengan wilayah provinsi lainnya di Sumatera Barat. Lebih lanjut disampaikan bahwa pembangunan *Flyover* Sitinjau Lauik didasarkan pada hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko lalu lintas, mengingat lokasi tikungan Panorama I termasuk dalam kawasan rawan kecelakaan akibat kondisi geometrik jalan yang tajam. Oleh karena itu, dilakukan penanganan melalui perubahan geometrik jalan dengan pembangunan jalan baru berupa *flyover* guna meningkatkan aspek keselamatan dan pelayanan jalan.

Badan usaha pelaksana dalam Proyek KPBU Pembangunan *Flyover* Sitinjau Lauik I adalah PT Utama Panorama Sitinjau Lauik. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian KPBU ini memperoleh apresiasi dari Kementerian Keuangan. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dinilai sebagai pionir dan *champion* dalam penerapan skema pembiayaan KPBU, dengan pengalaman proyek sebelumnya sebagai pembelajaran berharga untuk pengembangan proyek infrastruktur selanjutnya.



Gambar 3. 10 Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Proyek Sitinjau Laut

2. CreatIFF 2025

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), menyelenggarakan kegiatan *Creative Infrastructure Financing Day* (CreatIFF) 2025 dengan tema “Menjawab Tantangan Pembiayaan Kreatif di Tengah Optimalisasi Anggaran”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 3 Juni 2025, bertempat di Auditorium Kementerian PU. Pemilihan tema tersebut didasarkan pada pentingnya inovasi pembiayaan dalam menghadapi keterbatasan fiskal guna mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Dalam sesi arahan, Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir Kementerian PU telah berhasil mendukung penandatanganan 15 perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di berbagai sektor infrastruktur. Capaian tersebut mencerminkan peran aktif Kementerian PU dalam mendorong pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sebagai alternatif pendanaan pembangunan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PU juga menegaskan pentingnya perbaikan pelaksanaan KPBU dengan mempertimbangkan masukan dari dunia usaha. Kementerian PU mendorong penguatan kebijakan berbasis data agar berbagai kendala dalam implementasi KPBU dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih efektif, sekaligus menghindari kekakuan dalam perumusan kebijakan.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa Kementerian PU tengah melakukan inventarisasi terhadap berbagai permasalahan pada proyek KPBU yang belum

rampung. Inventarisasi tersebut mencakup aspek regulasi, proses bisnis, serta kesiapan proyek, termasuk isu lahan, AMDAL, dan pembiayaan konstruksi, guna memastikan proyek KPBU dapat berjalan lebih optimal dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan pembiayaan non-pemerintah.

CreatIFF 2025 juga dirancang sebagai forum diskusi melalui sesi Bincang Infrastruktur yang menghadirkan narasumber dan penanggap berkompeten di bidang pembiayaan kreatif, baik dari unsur pemerintah maupun sektor swasta. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan solusi konkret dalam pengembangan pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan.

Kegiatan CreatIFF 2025 diikuti oleh pegawai internal Kementerian PU, undangan terkait, serta media, sebagai bagian dari upaya penguatan pemahaman dan sinergi pemangku kepentingan dalam mendukung pembiayaan infrastruktur nasional.



Gambar 3. 11 Pelaksanaan Kegiatan CreatIFF 2025

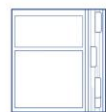
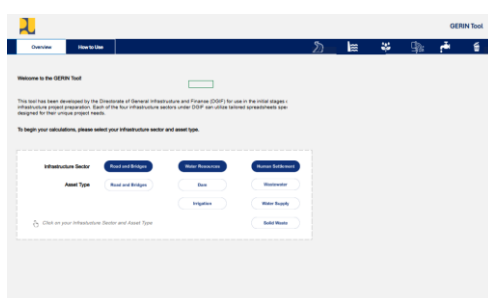
3. *Greenhouse Gas Emissions Reduction in Infrastructure (GERIN)*

Proyek *Greenhouse Gas Emissions Reduction in Infrastructure (GERIN)* merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong upaya dekarbonisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui penyederhanaan pengelolaan emisi proyek serta identifikasi berbagai hambatan utama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Proyek ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan didukung pendanaannya oleh Pemerintah Australia melalui *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT). Melalui proyek GERIN, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum diharapkan mampu mengukur serta merumuskan langkah awal mitigasi emisi gas rumah kaca pada proyek infrastruktur bidang pekerjaan umum. Salah satu keluaran utama dari proyek ini adalah *GERIN Tool*, yaitu alat sederhana berbasis Microsoft Excel yang digunakan untuk mengestimasi emisi gas rumah kaca sepanjang siklus hidup proyek infrastruktur, baik proyek KPBU maupun non-KPBU, serta mendukung penerapan prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia.

Pengembangan *GERIN Tool* mengacu pada prinsip dan kerangka manajemen karbon sebagaimana diatur dalam standar PAS 2080:2023 *Carbon Management in Buildings and Infrastructure*, yang telah diakui secara luas sebagai acuan dalam pengelolaan emisi infrastruktur. Selain itu, proyek GERIN juga menghasilkan kajian yang mengidentifikasi hambatan dekarbonisasi pada empat aspek utama, yaitu material dan teknologi, standar dan regulasi, biaya dan pembiayaan, serta keterampilan dan kapasitas, sekaligus mengidentifikasi berbagai peluang sebagai dasar pengembangan infrastruktur yang lebih hijau dan berketahanan. Pemanfaatan *GERIN Tool* sejak tahap awal siklus proyek, khususnya pada tahap persiapan seperti studi pendahuluan, diharapkan dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dikembangkan tidak hanya optimal secara fungsi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, mengingat intervensi pada tahap awal memberikan dampak yang lebih signifikan dan efisien dari sisi biaya.





GERIN Tool/
 Alat Estimasi
 Gas Efek Rumah Kaca dalam Infrastruktur
Buku Panduan

Mulai

2025 Pengembangan alat ini didukung oleh Kembaran Indonesia-Australia untuk Infrastruktur

Gambar 3. 12 Greenhouse Gas Emissions Reduction in Infrastructure (GERIN)

4. Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Bogor – Serpong (Via Parung)

Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS), dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, serta Perjanjian Regres untuk Proyek Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung pada tanggal 3 Oktober 2025. Pembangunan Jalan Tol Bogor–Serpong melalui Parung diharapkan dapat meningkatkan kelancaran mobilitas, menurunkan biaya logistik, serta memperkuat daya tarik investasi, khususnya *Foreign Direct Investment* (FDI). Selain itu, proyek ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi transformasi Tri Asa Kementerian Pekerjaan Umum melalui PU608. Pelaksanaan proyek jalan tol tersebut mencerminkan peran strategis infrastruktur transportasi dalam mendukung penguatan fondasi ekonomi nasional. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program kerja “Setahun Bekerja, Bergerak–Berdampak” sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan ASTA CITA Presiden Republik Indonesia.

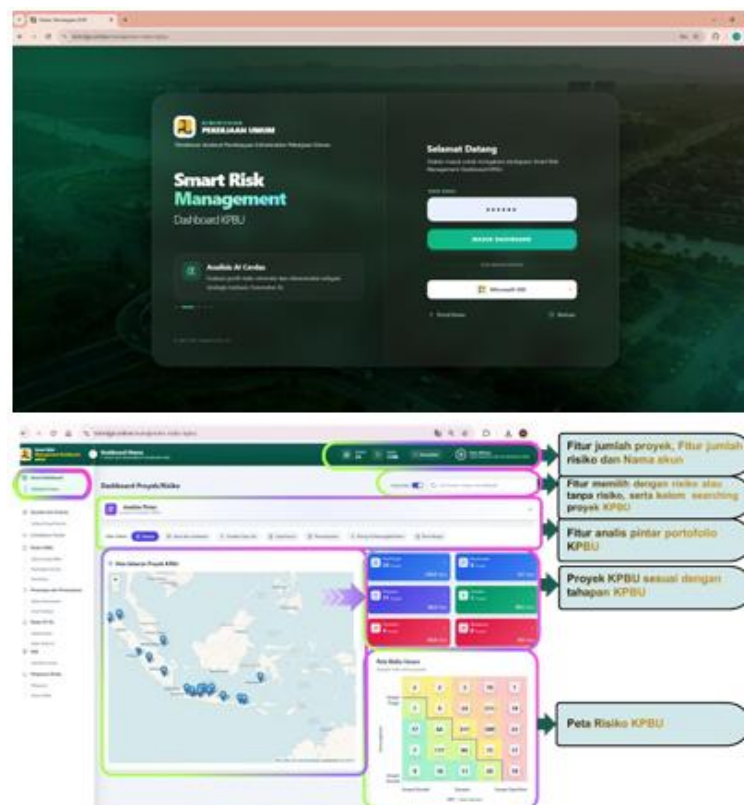


Gambar 3. 13 Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Bogor – Serpong (Via Parung)

5. Digitalisasi Risiko Proyek Berbasis Sistem Informasi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (*Smart Risk Management Dashboard*)

Smart Risk Management Dashboard dirancang sebagai alat digital untuk mendukung pengelolaan risiko proyek KPBU secara terintegrasi. *Dashboard* ini menyajikan data risiko dalam bentuk visualisasi yang informatif, antara lain melalui *heatmap* risiko, pemantauan kondisi risiko secara *real time*, serta ringkasan informasi strategis yang memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan. Digitalisasi ini meningkatkan transparansi, konsistensi, dan kecepatan akses informasi risiko dibandingkan metode konvensional.

Pemanfaatan *dashboard* ini dinilai memberikan manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola KPBU. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 98% responden menilai *Smart Risk Management Dashboard* relevan, layak, dan bermanfaat, khususnya dalam mendukung efisiensi proses pengelolaan risiko, peningkatan kualitas keputusan, serta kesiapan organisasi dalam mengembangkan manajemen risiko berbasis teknologi ke depan.



Gambar 3. 14 *Smart Risk Management Dashboard*

6. Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021

Kegiatan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dilaksanakan pada tanggal 15–16 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian tata cara penyusunan serta substansi pengaturan KPBU dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang kuat, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Biro Hukum Kementerian PU, unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PU, serta unit kerja di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI). Keterlibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan kebijakan, konsistensi pengaturan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan KPBU.

Dalam kegiatan ini dibahas sejumlah penyesuaian substansi penting, antara lain penyesuaian regulasi akibat perubahan kelembagaan Kementerian PU, penghapusan substansi yang tidak lagi relevan, penyelarasan dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas dan peraturan LKPP terbaru, penguatan tata kelola KPBU, pengaturan pelimpahan kewenangan pada tahap transaksi, serta penguatan peran pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan KPBU. Selain itu, disepakati pula penyesuaian nomenklatur, jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan, peran Simpul KPBU, serta mekanisme pemilihan badan penyiapan.

Sebagai tindak lanjut, DJPI melalui Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melakukan finalisasi penyesuaian substansi Rancangan Revisi Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 berdasarkan masukan tertulis dari Kementerian PPN/Bappenas, untuk selanjutnya disampaikan kembali

kepada Kementerian Hukum melalui Biro Hukum sebagai syarat penerbitan surat selesai harmonisasi dan kelanjutan proses pengundangan.



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [***] TAHUN [***]
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

Gambar 3. 15 Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021

7. Aplikasi E-JFAPI

Aplikasi E-JFAPI, merupakan Sistem Informasi Pengelolaan JF API yang disusun untuk mendukung pengelolaan karier dan kinerja Pejabat Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan secara efektif dan transparan.



Gambar 3. 16 Aplikasi E-JFAPI

8. Aplikasi SIDIA DJPI (Sistem Informasi Digitalisasi Inventarisasi Aset Data BMN)

Aplikasi SIDIA DJPI (Sistem Informasi Digitalisasi Inventarisasi Aset Data BMN), merupakan dashboard yang dirancang khusus untuk menghadirkan pengelolaan BMN bagi Unit Kerja di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Berbeda dari aplikasi SIMAN yang berfokus pada pencatatan administratif skala Unit Organisasi dan regulasi aset negara, SIDIA memberikan data yang ringkas, intuitif, dan langsung tiap-tiap Unit Kerja di DJPI sehingga siap digunakan analisis cepat, serta pengambilan keputusan harian.

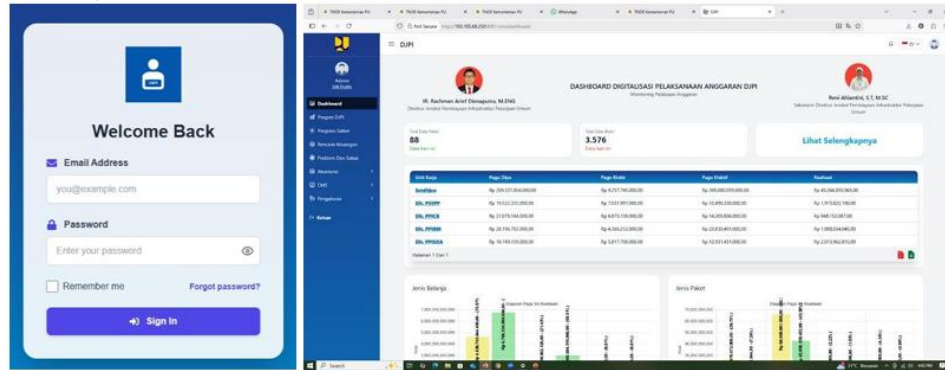


Gambar 3. 17 Aplikasi SIDIA DJPI (Sistem Informasi Digitalisasi Inventarisasi Aset Data BMN)

9. Aplikasi DIMonev DJPI (Digitalisasi *Monitoring* dan Evaluasi DJPI)

Aplikasi DIMonev DJPI (Digitalisasi *Monitoring* dan Evaluasi DJPI), merupakan bentuk digitalisasi dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi anggaran yang diharapkan bermanfaat untuk menunjukkan *monitoring* dan evaluasi anggaran bisa berjalan efektif, dengan data realisasi dan rencana yang

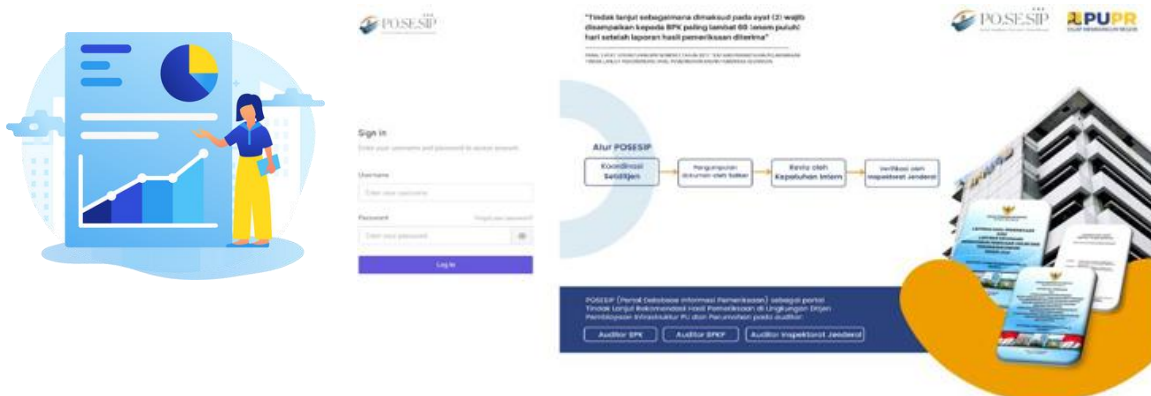
dapat diakses secara *real-time* hingga per unit kerja dan direkap per minggu. Aplikasi ini memberikan kesempatan kepada 49 Unit kerja untuk mengintegrasikan data rencana terbaru dengan menyampaikan pada aplikasi.



Gambar 3. 18 Aplikasi DIMonev DJPI (Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi DJPI)

10. Aplikasi POSESIP (Portal *Database* Informasi Pemeriksaan)

Aplikasi POSESIP, Portal *Database* Informasi Pemeriksaan (POSESIP) merupakan suatu sistem informasi untuk *monitoring* tindak lanjut temuan pemeriksaan yang digunakan oleh Internal DJPI dalam rangka melakukan fungsi penatausahaan dan pemantauan tindak lanjut.



Gambar 3. 19 Aplikasi POSESIP (Portal Database Informasi Pemeriksaan)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja DJPI Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Penyusunan laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja program yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja DJPI Tahun 2025 memuat informasi akuntabilitas kinerja yang mencakup capaian indikator kinerja selama Tahun 2025, analisis terhadap tingkat keberhasilan maupun ketidaktercapaian kinerja, identifikasi isu dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta perumusan langkah tindak lanjut dan rekomendasi strategis yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Kinerja DJPI tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Pekerjaan Umum berhasil mencapai hasil yang sangat memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari capaian IKSS yang melampaui target yang ditetapkan. Capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif berhasil melampaui target 100,00% yakni sebesar **110,96%**. Capaian IKSS ini merupakan kontribusi penuh dari kinerja DJPI.

Selanjutnya pada sasaran program di lingkungan DJPI, terdapat dua Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI) dan IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Pada tahun 2025, IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI) menghasilkan kinerja sebesar **107,61%** dengan target 86,81%, sehingga dapat dilihat bahwa kinerjanya telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi



pembiayaan yang efisien dan efektif juga menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu sebesar **102,59%** dengan target 100,00%, dan telah melebihi target yang direncanakan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada DJPI telah berjalan secara efektif dan konsisten, didukung oleh perencanaan yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik. Dengan capaian yang melampaui target, kinerja kedua IKSP tersebut termasuk dalam kategori **Istimewa** dan mencerminkan keberhasilan DJPI dalam mendukung pencapaian sasaran program secara optimal.

Pada tahun 2025, DJPI mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp86.195.367.000 atau **84,65%** dari total pagu DIPA Rp101.827.973.000 serta **91,39%** dari pagu efektif Rp94.312.373.000. Capaian tersebut mencerminkan pelaksanaan anggaran yang berjalan dengan baik serta kemampuan DJPI dalam mengoptimalkan alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.

4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Dalam pencapaian kinerja organisasi, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut yaitu berupa faktor internal maupun eksternal DJPI sebagai berikut:

Faktor Internal:

1. Keterlibatan pimpinan DJPI secara aktif dan berkelanjutan dalam proses perencanaan, pengukuran, serta evaluasi kinerja yang berperan penting dalam memastikan ketercapaian tujuan organisasi dan penguatan akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja.
2. DJPI berhasil mempertahankan ketertiban administrasi melalui konsistensi pengelolaan kearsipan pada seluruh unit kerja, termasuk peningkatan prosedur pendokumentasian kegiatan melalui platform digital.
3. Kinerja DJPI mampu mencapai hasil yang baik karena berbagai layanan pendukung organisasi termasuk layanan keuangan, hukum, kepegawaian, komunikasi publik, dan pengelolaan aset yang berjalan secara efektif dan saling mendukung, sehingga menciptakan proses kerja yang lebih tertata, responsif, dan konsisten dalam menunjang pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

- 
4. Penyusunan laporan *monitoring* bulanan dilakukan secara rutin dan sistematis dengan memuat rincian target, realisasi, perhitungan capaian, analisis anggaran, serta tindak lanjut rekomendasi. Hal ini meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data.
 5. Tercapainya proyek KPBU yang melebihi target pada tahap perencanaan dan penyiapan serta proyek KPBU yang siap dikerjasamakan oleh beberapa unit kerja di lingkungan DJPI.
 6. Koordinasi dan sinergi antar unit kerja di lingkungan DJPI berjalan efektif dalam proses perencanaan, penyiapan, dan pengendalian proyek KPBU, sehingga mendukung kelancaran pencapaian target kinerja.
 7. Penerapan SPBE di lingkungan DJPI menjadi salah satu pendorong signifikan terhadap efektivitas kerja. Sejumlah direktorat memperoleh nilai tinggi pada aspek transformasi digital, yang menandakan kualitas implementasi sistem informasi internal yang semakin matang.
 8. Telah dibentuk beberapa sistem informasi sebagai inovasi dan digitalisasi proses bisnis yang dilakukan oleh DJPI guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan koneksi antara *stakeholder* di luar Kementerian Pekerjaan Umum.
 9. Perbaikan/penyempurnaan tata kelola, kebijakan, dan regulasi secara berkelanjutan terkait penyelenggaraan KPBU di tingkat nasional, ditandai dengan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU yang telah memasuki tahapan harmonisasi bersama Kementerian Hukum, sehingga memperkuat kepastian hukum dan landasan pelaksanaan KPBU.

Faktor Eksternal:

1. Koordinasi yang baik dengan unit organisasi di luar DJPI serta kementerian/lembaga terkait dalam rangka penyelarasan kebijakan, dukungan teknis, dan penguatan tata kelola penyelenggaraan KPBU.
2. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait yang mendukung percepatan penyiapan proyek, pemenuhan komitmen daerah, serta kelancaran proses menuju tahap transaksi.
3. Meningkatnya kerja sama dan kemitraan yang dilakukan oleh DJPI dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi infrastruktur bidang Pekerjaan Umum (dalam dan luar negeri), khususnya terkait dengan skema



pembiayaan alternatif.

4. Responsivitas pihak eksternal dalam memberikan masukan teknis, klarifikasi dokumen, serta kesediaan terlibat dalam proses koordinasi mempercepat proses validasi data dan memastikan setiap proyek berjalan sesuai ketentuan sektoral terkait.

4.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan

Dalam mencapai target kinerja tahun 2025, tentunya tidak luput dari adanya permasalahan atau kendala yang dihadapi. Permasalahan tersebut di antaranya:

1. Koordinasi internal DJPI berjalan baik, namun beberapa mitra eksternal terutama pemerintah daerah, atau pemangku kepentingan lintas sektor belum mencapai kesamaan pandangan terkait komitmen, keputusan teknis, atau jadwal pelaksanaan, sehingga menyebabkan keterlambatan tahapan penyiapan atau transaksi proyek KPBU.
2. Meskipun terdapat kemajuan dalam Rancangan Permen KPBU yang telah mencapai tahap harmonisasi, ekosistem regulasi secara nasional masih memerlukan penyempurnaan agar lebih operasional, adaptif, dan mendukung percepatan tahapan KPBU serta meningkatkan minat investor dalam maupun luar negeri.
3. Tidak semua pemerintah daerah memiliki pemahaman yang memadai mengenai skema pembiayaan kreatif/KPBU maupun kesiapan fiskal yang cukup, sehingga menghambat proses penyiapan dokumen, pengajuan usulan, serta pengambilan keputusan pada tahap transaksi proyek.
4. Beberapa pemerintah daerah belum menyediakan data secara tepat waktu dan lengkap, sehingga analisis kinerja, evaluasi berkala, dan perumusan rekomendasi kebijakan DJPI tidak dapat dilakukan secara optimal.
5. Pelaksanaan program dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan teknis, perubahan alokasi anggaran nasional, serta dinamika mitra eksternal, sehingga DJPI perlu menyesuaikan strategi dan rencana kerja sepanjang tahun.



4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh DJPI guna meningkatkan kinerja di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. DJPI mengambil langkah percepatan penyusunan regulasi teknis dan pedoman pelaksanaan KPBU, termasuk harmonisasi Rancangan Permen bersama Kementerian Hukum, agar proses penyiapan dan transaksi dapat berjalan lebih efisien dan menarik minat investor.
2. DJPI meningkatkan mekanisme komunikasi, penggunaan platform data bersama, serta penjadwalan koordinasi rutin untuk memastikan progres, isu, dan tindak lanjut proyek disampaikan secara akurat dan tepat waktu.
3. DJPI memberikan umpan balik yang lebih komprehensif dan terstruktur kepada K/L, pemda, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan rekomendasi kebijakan dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas penyiapan proyek.
4. Melalui pendampingan teknis, asistensi dokumen, dan koordinasi lintas unit, DJPI memperkuat peran fasilitasi terhadap pemerintah daerah guna mendukung penyiapan proyek KPBU yang lebih matang dan sesuai tata kelola.
5. Pelatihan, sosialisasi, dan *workshop* dilakukan baik untuk pegawai maupun pemerintah daerah agar kapasitas perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan skema KPBU dan pembiayaan kreatif semakin meningkat.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) Awal TA 2025 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rachman Arief Dienaputra
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

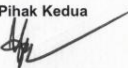
Nama : Dody Hanggodo
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


DODY HANGGODO

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Pertama


RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%
2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya (DJPI)	99,96%

Program:
Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp 98.961.375.000,00

MENTERI PEKERJAAN UMUM

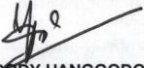

DODY HANGGODO

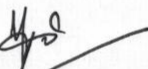
Jakarta, 31 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM


RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Perjanjian Kinerja Revisi-1 TA 2025 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

REVISI
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Rachman Arief Dienaputra Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Dody Hanggodo Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. 2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua  DODY HANGGODO Jakarta, 30 September 2025 Pihak Pertama  RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

REVISI												
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM</th> <th style="width: 30%;">TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #f2f2f2;">PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(1)</td> <td style="text-align: center;">(2)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #f2f2f2;">SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)</td> </tr> <tr> <td>1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)</td> <td style="text-align: center;">86,81%</td> </tr> <tr> <td>2. Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		(1)	(2)	SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)		1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	86,81%	2. Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00%
SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET											
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
(1)	(2)											
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)												
1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	86,81%											
2. Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00%											
Program: Program Dukungan Manajemen	Anggaran Rp 98.961.375.000,00											
MENTERI PEKERJAAN UMUM  DODY HANGGODO	Jakarta, 30 September 2025 DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA											

Perjanjian Kinerja (PK) Akhir TA 2025 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rachman Arief Dienaputra
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dody Hanggodo
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua



DODY HANGGODO

Pihak Pertama



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	
1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	86,81%
2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00%

Program:
Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp101.827.973.000,00

Jakarta, 29 Desember 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DODY HANGGODO

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM**



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA



BUKTI DUKUNG CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 20%)

Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Hasil Survei (%)	Target (%)	Realisasi (%)
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)
	100	20	20

Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didapatkan nilai sebesar 100%, sehingga **capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2025 adalah sebesar 20%**. Hasil survei mendukung IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

B. Capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 20%)

Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Hasil Survei (%)	Target (%)	Realisasi (%)
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)
	100	20	20

Hasil Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didapatkan nilai sebesar 100%, sehingga **capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2025 adalah sebesar 20%**. Hasil survei mendukung IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

C. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum

Sektor	No	Nama Proyek	Target PK Investasi (Rp)	No	Nama Proyek	Realisasi/Capaian Investasi (Rp)
SDA	Perencanaan & Penyiapan					
	1	Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau	14.438.858.037.223	1	Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau	14.438.858.037.223
	2	Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	96.762.666.877	2	Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	96.762.666.877
	3	Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	82.516.684.000	3	Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	82.516.684.000
	3 Proyek		14.618.137.388.100	3 Proyek		14.618.137.388.100
	Siap Dikerjasamakan					
	4	Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,41MW pada Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat	256.949.300.156	4	Penyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,41MW pada Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat	256.949.300.156
	5	Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40MW pada	920.399.742.000	5	Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40MW pada	920.399.742.000

Sektor	No	Target PK		No	Realisasi/Capaian	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)		Nama Proyek	Investasi (Rp)
		Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan			Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan	
		2 Proyek	1.177.349.042.156		2 Proyek	1.177.349.042.156
Perencanaan & Penyiapan						
Bina Marga	6	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan - Soka - Mengwi)	11.040.000.000.000	6	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan - Soka - Mengwi)	11.040.000.000.000
	7	Jalan Tol Pejagan - Cilacap	24.790.000.000.000	7	Jalan Tol Pejagan - Cilacap	24.790.000.000.000
	8	Bandung Inter Urban Toll Road	10.130.000.000.000	8	Bandung Inter Urban Toll Road	10.130.000.000.000
	9	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	5.473.000.000.000	9	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	5.473.000.000.000
	10	Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin)	8.083.000.000.000	10	Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin)	8.083.000.000.000
	11	Jalan Tol Bitung - Serpong	7.814.000.000.000	11	Jalan Tol Bitung - Serpong	7.814.000.000.000
	12	Jalan Tol Pluit Bandara (bagian dari Jalan Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	12.835.000.000.000	12	Jalan Tol Pluit Bandara (bagian dari Jalan Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	12.835.000.000.000
	13	Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta	3.494.000.000.000	13	Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta	3.494.000.000.000
	14	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya	29.480.000.000.000	14	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya	29.480.000.000.000
				15	Jalan Tol Layang Cikunir - Karawaci	26.150.000.000.000

Sektor	No	Target PK		No	Realisasi/Capaian	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)		Nama Proyek	Investasi (Rp)
				16	Jalan Tol Semarang Harbour (Semarang - Kendal)	13.350.000.000.000
				17	Jalan Tol Semanan - Balaraja	15.520.000.000.000
		9 Proyek	113.139.000.000.000		12 Proyek	168.159.000.000.000
		Siap Dikerjasamakan				
	15	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat (Transaksi)	36.580.000.000.000	18	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat (Transaksi)	36.580.000.000.000
Cipta Karya		1 Proyek	36.580.000.000.000		1 Proyek	36.580.000.000.000
		Perencanaan & Penyiapan				
	16	SPAM Kota Balikpapan	3.700.000.000.000	19	SPAM Kota Balikpapan	3.700.000.000.000
		1 Proyek	3.700.000.000.000		1 Proyek	3.700.000.000.000
		Siap Dikerjasamakan				
	17	SPAM Regional Ayung I	1.500.000.000.000	20	SPAM Regional Ayung I	1.500.000.000.000
		1 Proyek	1.500.000.000.000		1 Proyek	1.500.000.000.000
Lain-Lain		-	-	21	Wisma Werdhapura	50.471.388.279
		-	-		1 Proyek	50.471.388.279
Total		17 Proyek	170.714.486.430.256		21 Proyek	225.784.957.818.535

D. Capaian Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

NO	Kode	Program/Kegiatan /Output	Pagu DIPA	Pagu Efektif	Realisasi	Keuangan %			Fisik		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL (Pagu DIPA)	RL (Pagu Efektif)	RN	RL	Kinerja
1	WA	Program Dukungan Manajemen	101.827.973	94.312.373	86.195.367	100	84,65	91,39	100	100	100
1	7764	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	78.125.339	75.239.651	68.380.950	100	87,53	90,88	100	100	100
2	7765	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	5.315.396	3.912.306	3.907.631	100	73,52	99,88	100	100	100
3	7766	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	18.387.238	15.160.416	13.906.786	100	75,63	91,73	100	100	100
TOTAL			101.827.973	94.312.373	86.195.367	100	84,65	91,39	100	100	100

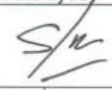
Sumber: <https://iemon.pu.go.id/> (status: 10 Januari 2026)

Keterangan

RN : Rencana

RL : Realisasi

kinerja < 30
30 < kinerja < 50
50 < kinerja < 65
65 < kinerja < 75
75 < kinerja < 85
kinerja > 85
- Belum bisa dinilai

Paraf		
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
		
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	
		

Mengetahui,
Direktur Jenderal


Rachman Arief Dienaputra

PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

Sasaran Kegiatan	Indikator		Komponen	Target 2025	Bobot	Realisasi			Kinerja
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)=Jml(7)	(9)=(8)/(4)
Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	IKK 1	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum	73,21%	20%	75,22%	15,04%	89,58%	122,36%
			Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu		20%	100,00%	20,00%		
			Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB		20%	86,90%	17,38%		
			Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN		20%	95,95%	19,19%		
			Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2		20%	89,83%	17,97%		
	IKK 2	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi	Tingkat Pembinaan KI dan MR	80,01%	20%	80%	16,00%	93,98%	117,46%
			Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi		20%	100%	20,00%		
			Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan		20%	100%	20,00%		
			Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern		15%	100%	15,00%		
			Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T1		10%	79,78%	7,98%		
			Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti		15%	100%	15,00%		

Sasaran Kegiatan	Indikator		Komponen	Target 2025	Bobot	Realisasi			Kinerja
Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	IKK 3	Tingkat Implementasi Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur	Jumlah rekomendasi kebijakan strategi/program pembiayaan infrastruktur yang disusun (terealisasi) dibandingkan dengan target	100%	50%	125,00%	62,50%	112,50%	112,50%
			Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi/informasi pimpinan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur PU yang disusun dibandingkan dengan target		50%	100,00%	50,00%		
	IKK 4	Tingkat Implementasi Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur	Jumlah rekomendasi kebijakan sistem/kemitraan pembiayaan infrastruktur yang disusun (terealisasi) dibandingkan dengan target	100%	70%	125%	88%	117,50%	117,50%
			Jumlah dokumen pengembangan/pengelolaan data dan sistem informasi pembiayaan infrastruktur dibandingkan dengan target		30%	100%	30%		

Keterangan:

1. Jumlah rekomendasi kebijakan strategi/program pembiayaan infrastruktur yang disusun (terealisasi) dibandingkan dengan target. Target 4 rekomendasi kebijakan terealisasi 5 rekomendasi kebijakan.
2. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi/informasi pimpinan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur PU yang disusun dibandingkan dengan target. Target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen.
3. Jumlah rekomendasi kebijakan sistem/kemitraan pembiayaan infrastruktur yang disusun (terealisasi) dibandingkan dengan target. Target 4 rekomendasi kebijakan terealisasi 5 rekomendasi kebijakan.
4. Jumlah dokumen pengembangan/pengelolaan data dan sistem informasi pembiayaan infrastruktur dibandingkan dengan target. Target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen.



PENGHARGAAN

Penghargaan Juara I Unit Organisasi Transformasi Digital Terbaik



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7232366 Faksimile (021) 7220219

Nomor : PA 0101-Sd/1089
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu set
Hal : Penyampaian Hasil Akhir Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025

Jakarta, 1 Desember 2025

Yth. Daftar Penerima Terlampir
di Tempat

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan seluruh peserta dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025. Sehubungan dengan telah selesainya seluruh tahapan Penilaian Transformasi Digital PU tahun 2025, bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian Transformasi Digital Kementerian PU Tahun 2025 telah dilaksanakan yang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari : *Launching Technical Meeting*, Pengumpulan Bukti Dukung, Penilaian Tahap I, Penilaian Tahap II dan Pleno Penetapan Pemenang;
2. Seluruh tahapan penilaian telah menghasilkan 3 (tiga) terbaik, sebagai berikut:
 - a. **Transformasi Digital Kategori Unit Organisasi setara Eselon I**
 1. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
 2. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
 3. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
 - b. **Transformasi Digital Kategori Unit Kerja/Balai setara Eselon II**
 1. Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
 2. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
 3. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.
 - c. **Transformasi Digital Kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai setara Eselon III**
 1. Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga;
 2. Balai Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
3. Segala keputusan hasil penilaian oleh Tim Penilai adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Selanjutnya...

Selanjutnya dalam menunjang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, PUSDATIN Kementerian PU berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan prima

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,



Pengecekan Keaslian Dokumen

Komang Sri Hartini

Ditandatangani secara elektronik

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PU (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Marga;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
5. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
6. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



MENTERI PEKERJAAN UMUM

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

KEPADA:

**Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum**

**SEBAGAI
Juara I**

Unit Organisasi Transformasi Digital Terbaik

Jakarta, 3 Desember 2025



Penghargaan Peringkat III Kategori Unit Kearsipan Organisasi



Sertifikat ISO Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJPI

mutu international SURAT KETERANGAN No: 762.62/EXT-MUTU/2026 Tgl: 14 Januari 2026 MUTU International menerangkan bahwa berdasarkan hasil keputusan sertifikasi per tanggal surat keterangan ini telah ditetapkan penerbitan sertifikat kepada organisasi klien dengan detail sebagai berikut: Organisasi : DIREKTORAT PELAKSANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Skema sertifikasi : Sistem Manajemen Anti Penyuapan Standar sertifikasi : SNI ISO 37001:2016 Nomor sertifikat : ABMS-135 Tanggal kedaluwarsa : 29 November 2026 Lingkup sertifikasi : Implementation of road and bridge infrastructure financing Adapun ketentuan audit surveillance dan resertifikasi bagi organisasi klien selama masa berlaku sertifikat adalah sebagai berikut: a) Jatuh tempo surveillance dan resertifikasi: <table border="0"> <tr> <td>Surveillance 1</td> <td>:</td> <td>12 Juli 2024</td> <td>-</td> <td>09 Desember 2024</td> </tr> <tr> <td>Surveillance 2</td> <td>:</td> <td>07 Juli 2025</td> <td>-</td> <td>04 Desember 2025</td> </tr> <tr> <td>Resertifikasi</td> <td>:</td> <td>02 Juli 2026</td> <td>-</td> <td>29 November 2026</td> </tr> </table> b) Konsekuensi tidak terlaksananya audit surveillance selama jatuh tempo surveillance adalah pembekuan hingga pencabutan sertifikat. c) Organisasi klien dapat sejak awal mengusulkan (untuk menyepakati) tanggal pelaksanaan surveillance dan resertifikasi kepada MUTU International, atau menunggu pengusulan tanggal audit dari MUTU International. Demikian surat keterangan ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya. Hormat kami, Isyana Dewi VP Subdiv OP 2 SBU Sertifikasi PUP Head office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok 16453, Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745-46 Website www.mutucertification.com Instagram @mutuinternational Facebook MUTU International Twitter @MutuInfo	Surveillance 1	:	12 Juli 2024	-	09 Desember 2024	Surveillance 2	:	07 Juli 2025	-	04 Desember 2025	Resertifikasi	:	02 Juli 2026	-	29 November 2026	CERTIFICATE This is to certify the implementation and maintenance for : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA Jl. Pattimura No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Has been assessed to the following Anti-Bribery Management Systems to conform with the requirements of the : SNI ISO 37001:2016 Which activities are applicable to the scope of : " Implementation of Formulation Preparation and Policies Execution in the Field of Human Settlements Infrastructure Financing " <table border="0"> <tr> <td>Initial Certification Date</td> <td>:</td> <td>28-11-2024</td> <td>Valid Until</td> <td>:</td> <td>27-11-2026</td> </tr> <tr> <td>Valid From</td> <td>:</td> <td>28-11-2024</td> <td>Recertification</td> <td>:</td> <td>27-11-2027</td> </tr> </table> Registration No: D24110040 Director PT Mutu Andalan Utama Plaza Summarecon Serpong, 3rd Floor, Suite 304 Jalan Gading Serpong Boulevard Blok 146 No.3, Tangerang 15810 T 021-65805446 E info@mutuandalan.co.id Website: www.mutuandalan.co.id MAS YKAN IAF Issue No 2, Date: 09.12.2025	Initial Certification Date	:	28-11-2024	Valid Until	:	27-11-2026	Valid From	:	28-11-2024	Recertification	:	27-11-2027
Surveillance 1	:	12 Juli 2024	-	09 Desember 2024																								
Surveillance 2	:	07 Juli 2025	-	04 Desember 2025																								
Resertifikasi	:	02 Juli 2026	-	29 November 2026																								
Initial Certification Date	:	28-11-2024	Valid Until	:	27-11-2026																							
Valid From	:	28-11-2024	Recertification	:	27-11-2027																							



CERTIFICATE

This is to certify the implementation and maintenance for :

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, 12110 – Indonesia

Has been assessed to the following Anti-Bribery Management Systems to conform with the requirements of the :

SNI ISO 37001:2025

Which activities are applicable to the scope of :

"Preparation, Formulation, and Implementation of Policies in the Field of Development of Systems and Strategies for Public Works Infrastructure Financing"

Initial Certification Date : 28.11.2024	Valid Until : 27.11.2026
Valid From : 28.11.2024	Recertification : 27.11.2027

Registration No: D24110037


 Director



PT Mutu Andalan Sistem
Plaza Summarecon Serpong, 3rd Floor, Suite 304
Jalan Gading Serpong Boulevard Blok M5 No.3, Tangerang 15810
T: 021-59955649, E: info@mutuandalan.co.id
Website: www.mutuandalan.co.id

Issue No.2, Date:05.01.2026



CERTIFICATE

This is to certify the implementation and maintenance for :

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Gedung G Kementerian PU Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan Kota Jakarta – Indonesia 12110

Has been assessed to the following Anti-Bribery Management Systems to conform with the requirements of the :

SNI ISO 37001:2016

Which activities are applicable to the scope of :

"Provision of Technical and Administrative Services to All Units within the Directorate General"

Initial Certification Date : 28.11.2024	Valid Until : 27.11.2026
Valid From : 28.11.2024	Recertification : 27.11.2027

Registration No: 3624036


 Director





PT Mutu Andalan Sistem
Plaza Summarecon Serpong, 3rd Floor, Suite 304
Jalan Gading Serpong Boulevard Blok M5 No.3, Tangerang 15810
T: 021-59955649, E: info@mutuandalan.co.id
Website: www.mutuandalan.co.id

Issue No.2, Date:20.11.2025



CERTIFICATE

This is to certify the implementation and maintenance for :

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

Has been assessed to the following Anti-Bribery Management Systems to conform with the requirements of the :

SNI ISO 37001:2016

Which activities are applicable to the scope of :

"Preparing the Formulation And Implementation of Policies in the Field of Water Resources Infrastructure Financing"

Initial Certification Date : 28.11.2024	Valid Until : 27.11.2026
Valid From : 28.11.2024	Recertification : 27.11.2027

Registration No: D24110038


 Director





PT Mutu Andalan Sistem
Plaza Summarecon Serpong, 3rd Floor, Suite 304
Jalan Gading Serpong Boulevard Blok M5 No.3, Tangerang 15810
T: 021-59955649, E: info@mutuandalan.co.id
Website: www.mutuandalan.co.id

Issue No.2, Date:26.01.2026



METODE PENGUKURAN KINERJA

Manual Indikator Kinerja DJPI

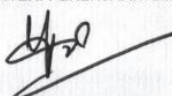
MANUAL INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja	
1.	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (10%) 1. Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (10%) 1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN 3. Penggunaan: jumlah NUP BMN yang sudah penetapan status penggunaan (PSP) dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal: ketepatan waktu penyampaian Laporan Wasdal BMN Indikator 3 (10%) 1. Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% 2. Jumlah usulan perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan perjanjian dikali 100% 3. Jumlah usulan pertimbangan hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan pertimbangan hukum dikali 100% 4. Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Indikator 4 (10%) 1. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 5 (10%) 1. Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian (IKPA) Indikator 6 (10%) 1. Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 7 (10%) 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB Indikator 8 (10%) 1. Persentase pemberitaan dengan persepsi/sentimen positif dari total pemberitaan DJPI di media. 2. Persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback Indikator 9 (10%) 1. Nilai transformasi digital DJPI sesuai penilaian PUSDATIN Indikator 10 (10%) 1. Persentase pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern 2. Persentase pengendalian kepatuhan intern 3. Persentase pemantauan kepatuhan intern

MANUAL INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja	
2.	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (20%) Hasil Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dibandingkan Target dikali 100% Indikator 2 (80%) $\%PPKt = \frac{PPKt}{target\ PPKt}$ Keterangan: • %PPKt = Persentase ketersediaan proyek KPBU/pembiayaan kreatif infrastruktur PU pada tahun t • PPKt = Realisasi jumlah proyek KPBU/pembiayaan kreatif (tahap penyiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan) infrastruktur SDA, BM, dan CK pada tahun t • Target PPK = Target jumlah proyek KPBU/pembiayaan kreatif infrastruktur PU pada tahun t	Catatan: • Pembiayaan Kreatif adalah berbagai skema pembiayaan selain skema KPBU yang bersumber dari dana swasta maupun dana dari pemangku kepentingan non pemerintah yang dapat dikombinasikan dengan dana pemerintah (Penugasan BUMN, <i>Business to Business</i>, LVC, dll). • Proyek tahap Penyiapan minimal telah memiliki Prastudi Kelayakan dan sudah memulai proses pemenuhan <i>Readiness Criteria</i> (RC). • Proyek tahap Transaksi/Siap Dikerjasamakan adalah Proyek KPBU/pembiayaan kreatif yang telah/sedang proses menuju Prakualifikasi (PQ). • Proyek sedang proses menuju PQ minimal telah memiliki Prastudi Kelayakan, sudah memulai proses pemenuhan RC, dan sudah memulai proses penyiapan transaksi. • PPKt adalah Realisasi jumlah proyek KPBU/pembiayaan kreatif tahap penyiapan infrastruktur SDA, BM, dan CK + Realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur sumber daya air yang siap dikerjasamakan + realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan + Realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan + Realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur persampahan yang siap dikerjasamakan pada tahun t

MENTERI PEKERJAAN UMUM


DODY HANGGODO

Jakarta, 30 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM


RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja	
1.	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (10%) 1. Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (10%) 1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN 3. Penggunaan: jumlah NUP BMN yang sudah penetapan status penggunaan (PSP) dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal: ketepatan waktu penyampaian Laporan Wasdal BMN Indikator 3 (10%) 1. Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% 2. Jumlah usulan perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan perjanjian dikali 100% 3. Jumlah usulan pertimbangan hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan pertimbangan hukum dikali 100% 4. Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Indikator 4 (10%) 1. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 5 (10%) 1. Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian (IKPA) Indikator 6 (10%) 1. Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 7 (10%) 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB Indikator 8 (10%) 1. Persentase pemberitaan dengan persepsi/sentimen positif dari total pemberitaan DJPI di media. 2. Persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback Indikator 9 (10%) 1. Nilai transformasi digital DJPI sesuai penilaian PUSDATIN Indikator 10 (10%) 1. Persentase pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern 2. Persentase pengendalian kepatuhan intern 3. Persentase pemantauan kepatuhan intern

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja	
2.	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (20%) Hasil Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dibandingkan Target dikali 100% Indikator 2 (80%) $\%PPKt = \frac{PPKt}{target\ PPKt}$ Keterangan: %PPKt = Persentase ketersediaan proyek KPBU/pembiayaan kreatif infrastruktur PU pada tahun t - PPKt = Realisasi jumlah proyek KPBU/pembiayaan kreatif (tahap penyiapan dan transaksi/siap dikerjasamakan) infrastruktur SDA, BM, dan CK pada tahun t - Target PPKt = Target jumlah proyek KPBU/pembiayaan kreatif infrastruktur PU pada tahun t	Catatan: - Pembiayaan Kreatif adalah berbagai skema pembiayaan selain skema KPBU yang bersumber dari dana swasta maupun dana dari pemangku kepentingan non pemerintah yang dapat dikombinasikan dengan dana pemerintah (Penugasan BUMN, <i>Business to Business</i>, LVC, dll). - Proyek tahap Penyiapan minimal telah memiliki Prastudi Kelayakan dan sudah memulai proses pemenuhan <i>Readiness Criteria</i> (RC). - Proyek tahap Transaksi/Siap Dikerjasamakan adalah Proyek KPBU/pembiayaan kreatif yang telah/sedang proses menuju Prakuualifikasi (PQ). - Proyek sedang proses menuju PQ minimal telah memiliki Prastudi Kelayakan, sudah memulai proses pemenuhan RC, dan sudah memulai proses penyiapan transaksi. - PPKt adalah Realisasi jumlah proyek KPBU/pembiayaan kreatif tahap penyiapan infrastruktur SDA, BM, dan CK + Realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur sumber daya air yang siap dikerjasamakan + realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan + Realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan + Realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur persampahan yang siap dikerjasamakan pada tahun t

MENTERI PEKERJAAN UMUM


DODY HANGGODO

Jakarta, 29 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM


RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA



BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KERJA

Berita Acara Kesepakatan Laporan Kinerja Kementerian PU (IKSS-5)

BERITA ACARA KESEPAKATAN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025 UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/Penyebab Kegagalan
SS-6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSS-5 Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100,00	110,96	110,96	1. Perbaikan/penyempurnaan tata kelola, kebijakan, dan regulasi secara berkelanjutan terkait penyelenggaraan KPBU di tingkat nasional (memberikan masukan terhadap peraturan KPBU Bappenas) dan di lingkungan Kementerian PU. 2. Membangun sinergi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) guna mendorong akselerasi penyelenggaraan KPBU. 3. Tercapainya target rencana proyek KPBU mulai dari tahap penyiapan (<i>preparation</i>) hingga tahap siap dikerjasamakan (<i>ready to offer/transaction</i>).

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025.

Jakarta, 23 Januari 2026
Direktur Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum,


Rachman Arief Dienaputra

Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Jl. Pattimura No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7397727 / 7264054

BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR PR0303/T/Dp/2026/1

Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA. 2025 yang dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Rapat ini bertujuan untuk menyepakati Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA. 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA. 2025

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KINERJA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SS. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya			
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	110,96%	110,96%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100%	102,59%	102,59%
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	86,81%	93,41%	107,61%

2. Capaian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI TA. 2025

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	84,72%	93,21%	110,02%

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
1	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	73,21%	89,58%	122,36%
2	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi	80,01%	93,98%	117,46%
3	Tingkat Implementasi Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur	100%	112,50%	112,50%
4	Tingkat Implementasi Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur	100%	117,50%	117,50%

c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
1	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	72,79%	77,89%	107,00%
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	103,33%	103,33%
3	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek	100,00%

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72,16%	83,82%	116,16%
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	100%	118,00%	118,00%

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	72,50%	79,51%	109,67%
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	100%	104,00%	104,00%
3	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek	103,33%

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2026

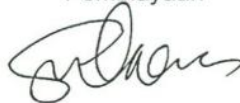
Yang Menyepakati,

Sekretaris Direktorat Jenderal



Reni Ahiantini

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



Agus Sulaeman

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Mohammad Firman

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga



Erna Wijayanti

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya



Meike Kencanawulan Martawidjaja

Mengetahui,
Direktur Jenderal



Rachman Arief Dienaputra

Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Setditjen PI



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110 Telp. (021) 7397727 / 7264054

BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR PR.0303/T/PS/2026/5

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

Pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya telah disepakati Berita Acara Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan/IKK	Jenis Indikator/Komposit	Target PK	Target Renstra	Capaian	Kinerja
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI) (7764 Kegiatan 1. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum)					
IKK.1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)		84,72%	84,72%	93,21%	110,02%

2. Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA 2025

Jenis Belanja	2025					
	Pagu DIPA	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi		
	Rp Ribu	Rp Ribu	Rp Ribu	Rp Ribu	% Pagu DIPA	% Pagu Efektif
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(4)
Belanja Pegawai	47.968.775	0	47.968.775	43.022.360	89,69	89,69
Belanja Barang	24.807.351	1.902.842	22.904.509	21.049.517	84,85	91,90
- Operasional	20.646.708	1.223.565	19.423.143	17.659.389	85,53	90,92
- Non Operasional	4.160.643	679.277	3.481.366	3.390.128	81,48	97,37
Belanja Modal	2.806.627	0	2.806.627	2.803.292	99,88	99,88
Total	75.582.753	1.902.842	73.679.911	66.875.169	88,48	90,76

Status iemonitoring PU tanggal 13 Januari 2025, 08.00 WIB.

Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Blokir	Realisasi	Keuangan (%)			Fisik (%)		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL DIPA	RL Efektif	RN	RL	Kinerja
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)			78.125.339	1.902.842	68.380.950	100	87,53	90,76	100	100	100
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/ Laporan /Dokumen	71.323.118	1.669.797	62.884.331	100	88,17	90,28	100	100	100
Layanan BMN	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	122.983	76.602	40.172	100	32,66	86,61	100	100	100
Layanan Hukum	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	303.026	110.035	189.374	100	62,49	98,13	100	100	100
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	413.902	55.194	355.776	100	85,96	99,18	100	100	100
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	564.296	135.515	426.307	100	75,55	99,42	100	100	100
Layanan Umum	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	1.260.325	56.991	1.163.446	100	92,31	96,69	100	100	100
Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	43.103	11.895	27.507	100	63,82	88,14	100	100	100
Layanan Perkantoran	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	68.615.483	1.223.565	60.681.749	100	88,44	88,92	100	100	100
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	93	Unit/m2/ Paket	2.806.627	0	2.803.292	100	99,88	99,88	100	100	100
Layanan Sarana Internal	93	Unit/m2/ Paket	2.806.627	0	2.803.292	100	99,88	99,88	100	100	100
Layanan Manajemen SDM Internal	272	Orang/ Layanan	318.428	114.350	196.889	100	61,83	96,48	100	100	100
Layanan Manajemen SDM	272	Orang/ Layanan	318.428	114.350	196.889	100	61,83	96,48	100	100	100
Layanan Manajemen Kinerja Internal	8	Layanan/ Laporan /Dokumen	1.134.580	118.695	990.657	100	87,31	97,52	100	100	100
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	Layanan/ Laporan /Dokumen	472.031	57.061	414.405	100	87,79	99,86	100	100	100
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	Layanan/ Laporan /Dokumen	237.325	0	237.044	100	99,88	99,98	100	100	100
Layanan Manajemen Keuangan	3	Layanan/ Laporan /Dokumen	425.224	61.634	339.209	100	79,77	93,29	100	100	100

Status iemonitoring PU tanggal 13 Januari 2025, 08.00 WIB.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Januari 2026

Yang Menyepakati,

Kepala Bagian Perencanaan,
Anggaran dan Keuangan



Desy Nina Wulandari

NIP. 197712092005022001

Kepala Bagian
Kepegawaian dan Umum



Bambang Adhityo

NIP. 198008212005021002

Kepala Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik



Anggoro Widyastika

NIP. 198001222009121001

Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum



Reni Ahiantini

NIP. 196910181996032002

Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat PSSPP



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12110. Telepon : (021) 72801060

BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : PR.03.03/PT/PK/2026/09

Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan telah disepakati capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	73,21	89,58	122,36
IKK 2. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi	80,01	93,98	117,46
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif			
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			
IKK 3. Tingkat Implementasi Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur	100	112,5	112,5
IKK 4. Tingkat Implementasi Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur	100	117,5	117,5

Sumber: data yang diolah

2. Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

No.	Unit Subdirektorat	Pagu DIPA (Rp Ribu)	Pagu Efektif (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)		
					Pagu DIPA	Pagu Efektif	Fisik
1	Subdirektorat Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur	2.543.118	1.934.081	1.931.490	75,95	99,87	100
2	Subdirektorat Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur	1.638.136	1.341.381	1.339.805	81,79	99,88	100

No.	Unit Subdirektorat	Pagu DIPA (Rp Ribu)	Pagu Efektif (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)		
					Pagu DIPA	Pagu Efektif	Fisik
3	Subdirektorat Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	1.134.142	636.844	636.337	56,11	99,92	100
4	Subbagian Tata Usaha	554.840	319.472	319.428	57,57	99,99	100
TOTAL		5.870.236	4.231.778	4.227.060	72,01	99,89	100

Sumber: data lemon.pu.go.id status tanggal 10 Januari 2026

3. Hasil Survei

No	Nama Survei	Nilai
1.	Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	20%
2.	Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU	20%

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Januari 2026

Yang Menyepakati,

Kepala Subdirektorat Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur



Ary Rahman Wahyudi

Kepala Subdirektorat Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur



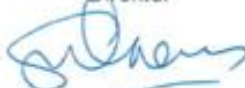
Yolanda Indah Permatasari

Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko



Ika Agus Pawiyarti

Mengetahui,
Direktur



Agus Sulaeman

Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat PPICK



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon: (021) 7264010, surel: ppip.pembiayaan@pu.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN KINERJA NOMOR PR0101/B/Pd/2026/1

Pada hari ini, Selasa, tanggal 13, bulan Januari, tahun 2026, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025 yang dihadiri oleh Direktur dan Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya, sehingga dapat tercapai kesepakatan Capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	72,50%	79,51%	109,67%
IKP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	100%	104,00%	104,00%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek	103,33%

2. Capaian Kinerja Proyek KPBU Tahap Perencanaan dan Penyiapan TA 2025

No	Target Berdasarkan PK 2025	Realisasi
1	SPAM Kota Balikpapan (Nilai Investasi = Rp3.700.000.000.000)	SPAM Kota Balikpapan (Nilai Investasi = Rp3.700.000.000.000)
Total	1 Proyek Tahap Penyiapan Rp3.700.000.000.000	1 Proyek Tahap Penyiapan Rp3.700.000.000.000

3. Capaian Kinerja Proyek KPBU Siap Dikerjasamakan TA 2025

No	Target Berdasarkan PK 2025	Realisasi
1	SPAM Regional Ayung I (Nilai Investasi = Rp1.500.000.000.000)	SPAM Regional Ayung I (Nilai Investasi = Rp1.500.000.000.000)
Total	1 Kesepakatan Rp1.500.000.000.000	1 Kesepakatan Rp1.500.000.000.000

4. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

No.	Kode MAK	Kegiatan/KRO/RO/ Komponen	Target Output	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)	Output (%) Rencana	Output (%) Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA		4.320.477	4.285.552	99,19%	100	100
		TINGKAT PENCAPAIAN PELAKSANAAN PENYIAPAN DAN EVALUASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA	100%	2.831.745	2.809.732	99,22%	100	100
1	7766.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		2.831.745	2.809.732	99,22%	100	100
	7766.ABF. 010	Perencanaan dan Panganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Rekomendasi Kebijakan	1.290.114	1.279.356	99,17	100	100
	7766.ABF. 011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan	1.541.631	1.530.376	99,27%	100	100
2	7766.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		299.751	292.017	97,42%	100	100
	7766.EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Laporan	299.751	292.017	97,42%	100	100

No	Kode MAK	Kegiatan/KRO/RO/ Komponen	Target Output	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Output (%)	
1	2	3	4	5	(Rp Ribu)	(%)	Rencana	Realisasi
		JUMLAH PROYEK PEMBIAYAAN ALTERNATIF INFRASTRUKTUR AIR MINUM YANG SIAP DIKERJASAMAKAN	1 Proyek	762.872	758.241	99,39%	100	100
3	7766.AEE	Kemitraan		762.872	758.241	99,39%	100	100
	7766.AEE. 003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan	762.872	758.241	99,39%	100	100
		TINGKAT DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL DIT PPIK	72,50%	426.109	425.561	99,87%	100	100
4	7766.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		426.109	425.561	99,87%	100	100
	7764.EBA. 994	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP	1 Layanan	426.109	425.561	99,87%	100	100

(sumber: data ie-Monitoring akses 10 Januari 2026)

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya TA 2025 ini dibuat.

Jakarta, 13 Januari 2026

Yang menyepakati,

Kepala Subdirektorat
Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Cipta Karya
Wilayah I



Denik Haryani

Kepala Subdirektorat
Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Cipta Karya
Wilayah II



Fahrial Farid

Kepala Subdirektorat
Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Cipta Karya
Wilayah III



E. Hardiansyah Pranata P.

Mengetahui,
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya



Meike Kencanawulan Martawidjaja

Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat PPIBM



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110 Telp. 021 72799056

BERITA ACARA KESEPAKATAN NOMOR PR0304/B/pb/2026/07

Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga telah disepakati capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun Anggaran 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
SK. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72.16 %	83.82 %	116.16 %
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	100 %	118 %	118 %

2. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

No.	Rincian Output	Pagu DIPA (Rp Ribu)	Pagu Efektif (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)		
					Pagu DIPA	Pagu Efektif	Fisik
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	697.426	521.180	514.402	73.76%	98.70%	100%
2	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.192.932	4.192.932	3.396.933	81.02%	81.02%	100%
3	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.378.672	1.292.140	1.089.936	79.06%	84.35%	100%

No.	Rincian Output	Pagu DIPA (Rp Ribu)	Pagu Efektif (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)		
					Pagu DIPA	Pagu Efektif	Fisik
4	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	739.761	519.292	456.165	61.66%	87.84%	100%
5	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.045.184	751.784	699.239	66.90%	93.01%	100%
6	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	276.540	276.560	204.869	74.08%	74.08%	100%
7	Layanan Perkantoran	630.291	389.609	338.771	53.75%	86.95%	100%
TOTAL		8,960,826	7,943,497	6,700,315	74.77%	84.35%	100%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun Anggaran 2025 ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2026

Yang Menyepakati,

Kepala Subdirektorat
PPIBM Wilayah I



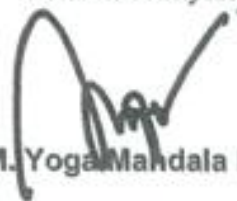
Fadil Arif Nadia

Kepala Subdirektorat
PPIBM Wilayah II



Ira Ariani Chaerunisa

Kepala Subdirektorat
PPIBM Wilayah III



M. Yoga Mandala Putra

Mengetahui,
Direktur



Erna Wijayanti

Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja PPISDA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264287, (021) 7264267

BERITA ACARA KESEPAKATAN NOMOR PRO103/IT/PA/2026/06

Pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2025 yang dihadiri oleh Direktur dan Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, sehingga dapat tercapai kesepakatan Capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KINERJA
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA)	72,79%	77,89%	107,00%
IKP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur PU yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	103,33%	103,33%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek	100,00%

2. Capaian Kinerja Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Tahap Penyiapan TA. 2025

NO	TARGET PROYEK	CAPAIAN PROYEK
1	Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau (Nilai Investasi Rp14.438.858.037.223,00)	Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, Provinsi Kepulauan Riau (Nilai Investasi Rp14.438.858.037.223,00)

NO	TARGET PROYEK	CAPAIAN PROYEK
2	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Nilai Investasi Rp96.762.666.877,00)	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Nilai Investasi Rp96.762.666.877,00)
3	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan (Nilai Investasi Rp82.516.684.000,00)	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan (Nilai Investasi Rp82.516.684.000,00)
4	-	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Nilai Investasi Rp88.016.872.000,00)
Total	3 Proyek Tahap Penyiapan Rp14.618.137.388.100,00	4 Proyek Tahap Penyiapan Rp14.706.154.260.100,00

3. Capaian Kinerja Proyek KPBUSektor Sumber Daya Air Siap Dikerjasamakan TA. 2025

NO	TARGET PROYEK	CAPAIAN PROYEK
1	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTM Leuwikeris 7,4 MW pada Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Nilai Investasi Rp256.949.300.156,00)	Proyek KPBUPenyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan (Nilai Investasi Rp920.399.742.000,00)
Total	1 Proyek Rp256.949.300.156,00	1 Proyek Rp920.399.742.000,00

4. Capaian Kinerja Anggaran Direktorat PPISDA TA. 2025

Kode	Rincian Output	Pagu (Rp Ribu)		Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)		
		Pagu DIPA	Pagu Efektif		Pagu DIPA	Pagu Efektif	Fisik
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air							
ABF	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	976.124	258.584	255.896	26,22%	98,96%	100%
	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	865.418	865.418	864.602	99,91%	99,91%	100%
	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	935.810	388.626	383.351	40,96%	98,64%	100%

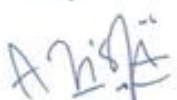
Kode	Rincian Output	Pagu (Rp Ribu)		Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)		
		Pagu DIPA	Pagu Efektif		Pagu DIPA	Pagu Efektif	Fisik
AEE	Penyiapan dan Dukungan Transaksi KPBU Infrastruktur SDA TA.2025	1.509.672	1.509.672	1.506.343	99,78%	99,78%	100%
	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Infrastruktur Bendungan dan Kawasan Infrastruktur SDA TA.2025	209.860	209.860	200.295	95,44%	95,44%	100%
EBD	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2025	230.600	230.600	222.958	96,69%	96,69%	100%
	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko, SMAP, dan ZI TA. 2025	249.400	249.400	249.143	99,90%	99,90%	100%
Dukungan Manajemen Internal							
EBA	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPISDA	761.098	424.550	422.022	26,22%	98,96%	100%
Total		5.737.982	4.136.710	4.104.609	71,53%	99,22%	100%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

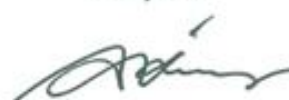
Jakarta, 15 Januari 2026

Yang Menyepakati,

Kepala Subdirektorat PPISDA
Wilayah I


Annisa Dian Pratiwi

Kepala Subdirektorat PPISDA
Wilayah II


Arfin

Kepala Subdirektorat PPISDA
Wilayah III


Andri Yusandra

Yang Menyetujui,

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air


Mohammad Firman



DOKUMENTASI KEGIATAN

Kegiatan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Proyek Sitingau Lauik



Kegiatan CreatIFF 2025



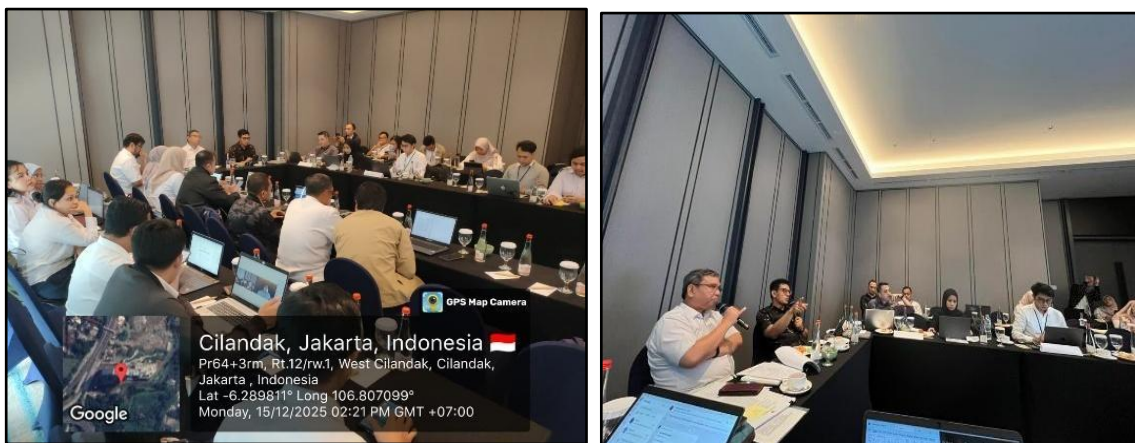
Greenhouse Gas Emissions Reduction in Infrastructure (GERIN)



Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Bogor – Serpong (Via Parung)



Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021



Pembekalan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum



Sosialisasi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umu

